11. Buku Pengantar_Sosiologi.docx

by Turnitin.

Submission date: 21-Oct-2025 07:34AM (UTC-0500)
Submission ID: 2787848357
File name: 11._Buku_Pengantar_Sosiologi.docx (1.04M)
Word count: 33564
Character count: 255770

PENGANTAR SOSIOLOGI

Konsep Dasar Untuk Memahami Realitas Sosial

Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami konsep-konsep mendasar dalam sosiologi. Buku ini membahas berbagai tema penting, mulai dari pengertian sosiologi, sejarah perkembangannya, hingga aspek-aspek kunci seperti interaksi sosial, struktur masyarakat, lembaga sosial, serta nilai dan norma yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, buku ini tidak hanya menyajikan teori tetapi juga menghubungkannya dengan fenomena sosial nyata. Topik-topik seperti stratifikasi sosial, perubahan sosial, dan mobilitas sosial dibahas untuk memberikan wawasan tentang dinamika masyarakat modern. Selain itu, buku ini menyoroti peran sosiologi dalam memahami dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang kompleks.

Dirancang untuk mahasiswa dan pembaca umum, buku ini menjadi referensi yang relevan untuk mendalami realitas sosial sekaligus meng-inspirasi pembaca untuk berkontribusi pada perubahan sosial yang positif. Dengan gaya penulisan yang mudah dipahami, buku ini cocok bagi siapa saja yang ingin mengeksplorasi dunia sosiologi secara mendalam namun tetap aplikatif.

Literasi Indonesia
Jl. Wanggu, Kendari 93231
editor@literacyinstitute.org
www.literacyinstitute.org
0852-9979-3323

ISBN 978-623-8303-29-8
9 786238 303298

PENGANTAR SOSIOLOGI
Konsep Dasar Untuk Memahami Realitas Sosial
Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.



PENGANTAR SOSIOLOGI

Konsep Dasar Untuk Memahami Realitas Sosial

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.

PENGANTAR SOSIOLOGI

Konsep Dasar Untuk Memahami Realitas Sosial

Literasi Indonesia, 2025

PENGANTAR SOSIOLOGI

Konsep Dasar Untuk Memahami Realitas Sosial

Penulis
Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.

ISBN: 978-623-8303-29-8
vi+134 hlm.; 15,5 x 23 cm

Editor
Dr. Hasruddin Nur, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul
Wawan Abdulah

Penerbit
Literasi Indonesia
Anggota IKAPI (010/SULTRA/2024)
Bumi Wanggu Permai II Blok D/12
Kota Kendari, 93231, Telp. 085299793323
Email: editor@literacyinstitute.org
Website: www.literacyinstitute.org
Cetakan Pertama: Januari, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Pengantar Sosiologi: Konsep Dasar Untuk Memahami Realitas Sosial* dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai bagian dari kontribusi dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang publikasi ilmiah, yang merupakan salah satu kewajiban utama seorang dosen.

Sebagai sebuah pengantar, buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendasar tentang konsep-konsep utama dalam sosiologi. Berbagai tema penting dalam sosiologi dibahas dalam buku ini, mulai dari konsep dasar dan sejarah sosiologi, hingga dinamika interaksi sosial, struktur masyarakat, lembaga sosial, serta nilai dan norma yang membentuk kehidupan bermasyarakat. Buku ini juga menggali lebih dalam tentang fenomena perubahan sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, serta peran sosiologi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sosial.

Disusun secara sistematis dan komprehensif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca umum dalam memahami realitas sosial di sekitar mereka. Tidak hanya sebagai materi akademik, buku ini juga bertujuan untuk menginspirasi pembaca dalam menganalisis fenomena sosial dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Harapan saya, buku ini dapat memberikan wawasan yang luas dan menjadi jembatan bagi pembaca untuk memahami kompleksitas interaksi sosial serta peran mereka dalam menciptakan perubahan yang positif. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi sumber ilmu yang berharga bagi semua pembaca.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Makassar, Desember 2024

Penulis

Daftar Isi

Bab 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi 1
A. Pengertian Sosiologi 1
B. Pokok Bahasan Sosiologi 1
C. Ciri dan Hakikat Sosiologi 5
D. Hakikat Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan 5
E. Kegunaan Sosiologi 7
F. Objek Sosiologi 7
G. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi 7

Bab 2 Sejarah Perkembangan Sosiologi 9
A. Sejarah Kemunculannya 9
B. Para Perintis Sosiologi 10
C. Perkembangan Sosiologi 10

Bab 3 Proses Sosial dan Interaksi Sosial 19
A. Pengertian Proses Sosial 19
B. Tindakan Sosial 19
C. Proses Terbentuknya Tindakan Terorganisasi 20
D. Tipe Tindakan Sosial 20
E. Kontak Sosial 21
F. Bentuk Proses Sosial 22
G. Interaksi Sosial 22
H. Faktor Pendorong Interaksi Sosial 24

Bab 4 Masyarakat Sebagai Suatu Sistem Sosial 27
A. Pengertian Masyarakat 27
B. Masyarakat Sebagai Sistem Sosial 28
C. Sembilan Unsur Masyarakat Sebagai Sistem Sosial 29
D. Pandangan Sosiologi tentang Masyarakat 31
E. Karakteristik Masyarakat 33
F. Hubungan Masyarakat dan Budaya 35

Bab 5 Kelompok Sosial dalam Kehidupan Masyarakat 39
A. Kelompok Sosial 39
B. Ikatan Kelompok Sosial 42
C. Faktor Pembentuk Kelompok Sosial 43

D. Pembentukan Norma Dalam Kelompok Sosial 45
E. Landasan, Faktor dan Teori Pembentukan Kelompok Sosial 45

Bab 6 Lembaga Sosial dan Pranata Sosial 49
A. Pengertian Lembaga Sosial 49
B. Fungsi Lembaga Sosial 49
C. Perkembangan Lembaga Sosial 50
D. Tingkatan Norma dalam Lembaga Sosial 50
E. Ciri Umum, Karakteristik, dan Syarat Lembaga Sosial 51
F. Peranan Lembaga Sosial 53

Bab 7 Stratifikasi Sosial 59
A. Pengertian Stratifikasi Sosial 59
B. Dimensi Stratifikasi Sosial 60
C. Dasar Ukuran Stratifikasi Sosial 62
D. Dampak, Pengaruh, dan Analisis dari Stratifikasi Sosial 64

Bab 8 Status Sosial, Peranan Sosial dan Organisasi Sosial 69
A. Pengertian Status Sosial 69
B. Peranan Sosial 70
C. Organisasi Sosial dalam Masyarakat 71
D. Mobilitas Sosial 79

Bab 9 Kekuasaan dan Pengendalian Sosial 83
A. Pengertian Kekuasaaan 83
B. Bentuk Umum Kekuasaan 84
C. Sumber Kekuasaan 85
D. Pengendalian Sosial 86

Bab 10 Perubahan Sosial 91
A. Pengertian Perubahan Sosial 91
B. Ruang Lingkup Perubahan Sosial 92
C. Teori Moderen Mendukung Perubahan Sosial 94
D. Proses Perubahan Sosial 95
E. Dampak Perubahan Sosial 98
F. Modernisasi Bagian dari Perubahan Sosial 100

Bab 11 Nilai dan Norma Sosial 107
A. Pengertian Nilai Sosial 107
B. Norma Sosial 108
C. Sosialisasi, Penyimpangan, dan Pengawasan Sosial 111

Bab 12 Masalah Sosial dan Fungsi Sosiologi 121
A. Mengidentifikasi Masalah Sosial dalam Masyarakat 121
B. Fungsi Sosiologi dalam Kehidupan Masyarakat 130
C. Peran Sosiologi dalam Penanganan Kemiskinan 130

Daftar Pustaka 131

Tentang Penulis 132

Bab 1
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi

A. Pengertian Sosiologi

Secara etimologis, sesungguhnya sosiologi berasal dari kata Latin "*Socius*" yang berarti kawan (dapat juga diartikan sebagai pergaulan hidup manusia atau masyarakat), dan kata Yunani "*Logos*" berarti kata atau pembicaraan sehingga akhirnya berarti Ilmu. Jadi secara sederhana sosio-logi adalah suatu ilmu tentang hubungan antara teman dan teman. Secara lebih luas, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat.

Dalam pandangan Selo Soemardjan dan Soeleman Soemantri Sosio-logi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, misalnya antara kehdiupan ekonomi dan kehidupan politik atau antara kehidupan hukum dan kehidupan agama. Selanjutnya pandangan Rocek dan Warren Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Pandangan Pitirim Sorokin Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari; (1) hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial; dan (2) hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala non sosial.

B. Pokok Bahasan Sosiologi

Pokok bahasan sosiologi terbagi atas 4 bagian, yakni; (1) fakta sosial; (2) tindakan sosial; (3) khayalan sosiologi; dan (4) realitas sosial. Adapun uraian penjelasan dari pokok bahasan sosiologi disajikan sebagai berikut:

1. Fakta sosial

Sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Contoh, di sekolah seorang murid diwajibkan untuk datang tepat waktu, menggunakan seragam, dan bersikap hormat kepada guru. Kewajiban-kewajiban tersebut dituangkan ke dalam sebuah aturan

dan memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Dari contoh tersebut bisa di- lihat adanya cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu (sekolah), yang bersifat memaksa dan mengendalikan individu (murid). Selain dari pada itu, fakta sosial juga memosisikan individu sebagai aktor yang lemah, pasif dan tidak memiliki daya, disebabkan cara bertindak dan berpikir serta berperasaannya dikendalikan oleh segala se- suatu yang berada diluar dirinya dan bersifat memaksa. Contoh, pada pusat rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, para pecandu/ pengguna wajib untuk ikut program rehabilitasi sesuai dengan aturan jadwal yang telah ditentukan, mengenakan seragam guna membedakan dengan petugas rehabilitasi, menanamkan sikap hormat kepada konselor. Adapun kewajiban tersebut, tertuang dalam bentuk peraturan pusat rehabilitasi yang memiliki sanksi bilamana terdapat pelanggaran. Contoh, pengaturan protokol lalu lintas tentang penggunaan nomor polisi ganjil-genap yang diberlakukan oleh DKI Jakarta mulai pkl. 06.00-21.00 WIB. Bilamana ada pengguna jalan yang melanggar akan diberikan sanksi tilang. Berdasarkan penjelasan contoh tersebut, maka dapat dicermati adanya perasaan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu yang memiliki kencenderungan memaksa dan bersifat mengendalikan individu. Dapat juga ditarik simpulan bahwasanya fakta sosial yang seperti ini, memberikan indikasi bahwa individu tidak punya pilihan lain, kecuali wajib patuh, taat, tertib, dan hormat.

Selanjutnya fakta sosial juga dikategorikan menjadi dua, yaitu material dan non material. Fakta sosial material adalah fakta yang berbentuk atau berwujud, dapat diamati, didokumentasikan, berbentuk arsitektur, teknologi dan dapat juga berupa hukum atau perundang-undangan. Fakta sosial yang berbentuk artsitektural adalah dapat diamati dalam pembangunan gedung pencakar langit. Terdapatnya regulasi yang wajib untuk ditaati misalnya, kekuatan konstruksi bangunan, ketahanan bangun- an terhadap guncangan gempa, tersedianya fasilitas lift, fasilitas untuk penyandang disabilitas, terdapatnya akses keluar dari gedung bilamana terjadi bencana (jalur evakuasi), memiliki *basement* sebagai sarana parkir kendaraan, dilengkapi saluran air untuk memadamkan api bilamana terjadi kebakaran, dan sebagainya. Aturan tersebut kemudian tertuang dalam standardisasi pembangunan gedung yang diatur oleh pemegang otoritas. Sementara fakta sosial non material adalah fakta yang tidak berbentuk/ tidak berwujud, namun kehadirannya dapat diamati dan dirasakan, seperti

yang terdapat pada kesadaran moralitas, kesadaran kolektif, representative kolektif dan aliran sosial. Contoh, memberikan dan membuka kesempatan bagi masyarakat ekonomi ke bawah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan adanya bantuan beasiswa pendidikan dari pemerintah.

2. Tindakan sosial

Tindakan sosial adalah sebagai tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contoh, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, tetapi menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian orang lain, merupakan tindakan sosial.

3. Khayalan sosiologis

Khalayan/imajinasi sosiologis adalah sebagai cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Pandangan C. Wright Mills dengan khayalan sosiologis, kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Alat untuk melakukan khayalan/ imajinasi sosiologis adalah permasalahan (*troubles*) dan isu (*issues*). Permasalahan pribadi individu merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. Isu merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan pribadi individu. Contoh, jika suatu daerah hanya memiliki satu orang yang menganggur, maka peng- angguran itu adalah masalah. Masalah individual ini pemecahannya bisa lewat peningkatan keterampilan pribadi. Sementara jika di kota tersebut ada 12 juta penduduk yang menganggur dari 18 juta jiwa yang ada, maka pengangguran tersebut merupakan isu yang pemecahannya menuntut kajian lebih luas lagi.

Elemen mendasar dalam khalayan/imajinasi sosiologis yaitu kemampuan dalam mengamati masyarakat sendiri sebagai orang luar, bukan dari pendekatan terbatas pengalaman pribadi. Khayalan/imajinasi sosiologis memberikan peluang untuk melampaui pengalaman pribadi dan mencoba untuk memahami perilaku sosial, sosiolog mengandalkan yang tidak biasa dalam menciptakan pemikiran. Mills berpendapat ibaratnya *imagination-sociology* yaitu kesadaran akan hubungan antara individu dengan masyarakat luas. Kesadaran ini memberikan peluang bagi orang dalam memahami hubungan langsung terhadap pengaturan sosial individu dengan dunia sosial impersonal.

Terdapatnya kasus pengangguran yang kesulitan mengakses pekerjaan, sehingga berakibat pada terjadinya pengangguran, dimana C. Wright Milss, memandang bahwa manakala pengangguran merupakan masalah sosial, maka akan berdampak pada terstruktur atau terorganisasinya masyarakat dalam rangkaian komunitas. Demikian adanya Mills, memandang penggunaan khayalan/ imajinasi sosiologis dalam melihat kasus perceraian tidak hanya bersumber pada masalah pribadi (pria dan wanita) melainkan sebagai struktural masalah yang kompleks, karena merupakan hasil dari pada kemufakatan.

Khalayan/imajinasi sosiologis diperlukan untuk dapat memahami apa yang masyarakat alami maupun yang terdapat dalam diri individu. Mills, mendefinisikan khalayan/imajinasi sosiologis sebagai kesadaran yang jelas tentang hubungan antara pengalaman dan masyarakat yang lebuh luas. Khalayan/imajinasi sosiologis adalah kemampuan untuk ber- alih dari satu perspektif yang lain; dari politik ke psikologis, dari pemeriksaan, dari keluarga tunggal untuk penilaian komparatif dari anggaran nasional dunia, dari sekolah teologi untuk pembentukan militer, dari pertimbangan industry minyak untuk studi puisi kontemporer. Pandangan Mills, dengan khalayan/ imajinasi sosiologis, diharapkan akan mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Adapun alat untuk melakukan khalayan/imajinasi sosiologis adalah *troubles* dan *issue*. *Troubles* merupakan permasalahan pribadi individu dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. Masalah pribadi berdasarkan pada pada masalah yang memberikan pengaruh ke-pada individu maupun anggota masyarakat yang terkena dampak, umum- nya cenderung menyalahkan kegagalan dan pribadi seseorang. Contoh, masalah yang berbeda seperti tidak naik kelas, putus sekolah, pengangguran, dan perceraian. Sementara *issue* merupakan hal yang terdapat di luar jangkauan kehidupan pribadi individu. *Issue* berdasar pada struktur sosial dan budaya masyarakat, mengacu pada masalah sosial yang mem- berikan pengaruh terhadap individu dan masyarakat.

Dalam hal ini, khalayan/ imajinasi sosiologis dapat disandingkan dengan contoh kemiskinan dipahami sebagai masalah pribadi (*trouble*), disebabkan faktor kemalasan, kurang gigih dan giat dalam bekerja, rendahnya motivasi untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, maka kemiskinan adalah masalah individual. Bilamana di tengah masyarakat terdapat ribuan bahkan jutaan masyarakat miskin, maka kemiskinan dapat

dipahami sebagai *issue public* (masalah umum) yang memerlukan kebija-kan sosial dan program sosial dalam menurunkan jumlah kemiskinan di masyarakat. Mills menganggap bahwa terdapatnya masalah yang biasanya dianggap sebagai masalah pribadi (*trouble*) paling baik dipahami sebagai masalah public (*issue*) dan menciptakan khalayan/ imajinasi sosiologis dalam merujuk pada kemampuan menghargai dasar struktural untuk masalah individu.

4. Realitas sosial

Realitas sosial adalah pengungkapan tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga oleh sosiolog dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi, dan pengamatan tabir secara jeli serta menghindari penilaian normatif.

C. Ciri dan Hakikat Sosiologi

Sosiologi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu telah memenuhi semua unsur ilmu pengetahuan. Dalam buku Soerjono Soekanto berjudul Sosiologi Suatu Pengantar (2013), mendefinisikan bahwa sosiologi sebagai ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut; (1) Empiris, yaitu didasarkan pada observasi (pengamatan) dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi (menduga-duga), (2) Teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori, (3) Komulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori-teori yang lama, dan (4) Nonetis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam.

D. Hakikat Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan

Dapatkah kita memberikan pengakuan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan (*science*) atau tidak, itu tergantung dari sudut pandang kita dalam mendefinisikan ilmu. Dalam hal ini, pemaknaan ilmu dapatlah kita gunakan secara luas dan komprehensif, sebagaimana dalam bahasa Jawa dan Indonesia *ngelmu* atau dan ilmu kebatinan. Dalam artian ilmu

pengetahuan atau *sains* merupakan pengetahuan abstrak yang memberikan penjelasan suatu gejala berdasarkan sebab-akibat atau biasa juga disebut sebagai hukum kausalnya. Pada bidang sosiologi akan sering diketemukan uraian yang dinamakan analisis kausal. Namun demikian, masih banyak yang mempertanyakan dalam menerangkan perilaku sosial manusia berdasarkan faktor-faktor penyebab atau hukumnya, dengan alasan kebebasan berpikir dan tindakan manusia. Contoh, dapatlah diketemukan dalam gejala-gejala alam yang terjadi yang tentunya disebabkan hukum-hukum alam, tetapi gejala sosial kemasyarakatan ditentukan pula oleh tindakan sosial masyarakat itu sendiri. Para sosiolog terkemuka mencoba mengurai-kan hukum-hukum sosial, seperti misalnya Aguste Comte mendalami tentang hukum perkembangan akal budi, Herbert Spencer tentang hukum evolusi dan Karl Marx tentang hukum pertentangan kelas sosial.

Adapun hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan diuraikan sebagai berikut:

1. Sosiologi adalah ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pasti (*eksakta*) karena yang dipelajari adalah gejala-gejala kemasyara-katan.
2. Sosiologi termasuk disiplin ilmu kategori, bukan merupakan disiplin ilmu normatif karena sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi.
3. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dan dalam perkembangannya sosiologi menjadi ilmu pengetahuan terapan (*applied science*).
4. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan ilmu pengetahuan konkret, artinya yang menjadi perhatian adalah bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya peristiwa itu sendiri.
5. Sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, serta mencari prinsip-prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia, sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia.
6. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional yang menyangkut metode yang digunakan.
7. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, artinya sosiologi mempunyai gejala-gejala umum yang ada pada interaksi antara manusia.

Sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, serta mencari prinsip-prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia, sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia. Dengan demikian, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional menyangkut metode yang digunakan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, artinya sosiologi mempunyai gejala-gejala umum yang ada pada interaksi antara manusia.

E. Kegunaan Sosiologi

Kegunaan Sosiologi dalam masyarakat, antara lain:

1. Untuk pembangunan adalah sosiologi berguna untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan.
2. Untuk penelitian adalah tanpa penelitian dan penyelidikan sosiologis tidak akan diperoleh perencanaan sosial yang efektif atau pemecahan masalah-masalah sosial dengan baik.

F. Objek Sosiologi

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia yang memengaruhi kesatuan manusia itu sendiri.
2. Objek formal adalah sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian objek formal sosiologi adalah hubungan manusia antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.
3. Objek budaya adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi hubungan satu dengan yang lain.
4. Objek agama adalah pengaruh dari objek dari agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial masyarakat, dan banyak juga hal-hal ataupun dampak yang memengaruhi hubungan manusia.

G. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi

Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi mengkaji lebih mendalam pada bidangnya dengan cara bervariasi. Misalnya seorang sosiolog meng- kaji dan mengamati kenakalan remaja di Indonesia saat ini, mereka akan

mengkaji mengapa remaja tersebut nakal, mulai kapan remaja tersebut berperilaku nakal, sampai memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Hampir semua gejala sosial yang terjadi di desa maupun di kota baik individu ataupun kelompok, merupakan ruang kajian yang cocok bagi sosiologi, asalkan menggunakan prosedur ilmiah. Ruang lingkup kajian sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelom-pok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup kajian sosiologi tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya antara lain:

1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber ke-kayaan alam.
2. Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian, ber-kaitan dengan apa yang dialami warganya.
3. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, misalnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat, dan sebagainya.

Bab 2
Sejarah Perkembangan Sosiologi

A. Sejarah Kemunculannya

Pandangan Peter Berger pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal yang selama ini dianggap sebagai hal yang memang seharusnya demikian. Apa yang selama ini menjadi pegangan manusia mengalami krisis maka mulailah orang melakukan renungan sosiologi. Pandangan Berger yang dianggap sebagai ancaman pada abad ke 18 adalah "disintegrasi dalam agama. Sementera itu Pandangan L. Laeyendecker kelahiran sosiologi dengan serangkaian perubahan-perubahan jangka panjang yang melanda Eropa Barat di abad pertengahan. Kelahiran sosiologi dengan serangkaian perubahan melalui proses jangka panjang khususnya yang melanda Eropa Barat yang terjadi pada abad pertengahan. Proses tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tumbuhnya kapitalisme akhir abad ke 15
2. Terjadinya perubahan sosial dan politik
3. Perubahan sejalan dengan reformasi Martin Luther
4. Individualisme meningkat
5. Munculnya ilmu pengetahuan modern
6. Berkembangnya kepercayaan pada diri

Berbagai proses perubahan sosial berjangka panjang yang telah diungkapkan L. Laeyendecker dan George Ritzer yang disebutnya sebagai ancaman tatanan sosial (*threats of the taken for garanted world*) yang memberikan pengaruh besar dalam masyarakat dan memberikan rangsangan untuk bangkit dari keterpurukan selama beberapa abad lamanya. Muncul pertanyaan yang menjadi dasar utama dalam sejarah kemunculan sosiologi. Pertanyaan ini adalah mengapa muncul suatu ilmu yang dinamakan sosiologi? Pertanyaan ini lahir dari landasan filosofis akademik yang membutuhkan jawaban ilmiah. Adapun Pandangan Peter Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal yang selama ini dianggap sebagai hal yang memang seharusnya demikian. Lebih lanjut Berger mengatakan bahwa apa yang selama ini menjadi pegangan manusia mengalami krisis maka mulailah orang melakukan renungan sosiologi.

Selanjutnya pandangan pemikiran pandangan Laeyendecker kelahiran sosiologi dengan serangkaian perubahan-perubahan jangka panjang yang melanda Eropa Barat di abad 18 pertengahan. Lebih lanjut Laeyendecker mengidentifikasi perubahan jangka panjang yakni; (1) tumbuhnya kapitalisme pada abad ke 15 yaitu; (2) terjadi perubahan di bidang sosial politik; (3) perubahan berkenaan dengan reformasi Martin Luther; (4) meningkatnya individualisme; (5) lahirnya pengetahuan moderen; dan (6) berkembangnya kepercayaan diri sendiri.

B. Para Perintis Sosiologi

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap sebagai perintis. Misalnya ilmu pengetahuan alam yaitu Sir Izaak Newton, Psikologi oleh Sigmund Freud, sosiologi pun mengenal sejumlah orang-orang yang dianggap sebagai perintisnya. Sosiologipun mengenal sejumlah orang yang dianggap sebagai perintis yaitu Sosiologi membeda-kan antara perintis awal yang hidup pada abad 18 dan 19 dan para tokoh sosiologi masa kini yang hidup di abad 20. Perintis awal Sosiologi Auguste Comte (1798-1857), Karl Marx (1818-1883), Emile Durkheim (1859-1917) dan Max Weber (1864-1920). Sementara perintis masa kini adalah George Herbert Mead (1863-1931), Erving Goffman (1922-1982), George Casper Homans (1910-1989), Jhon Thibaut (1917-1986), dan George A. Kelly (1905-1967), Peter Blau (1918-2002), Talcott Parsons (1902-1979), Robert King Merton (1910-2003), Charles Wright Mills (1916-1962), Ralf Dahrendorf (1929-2009), Lewis Alfred Coser (1913-2003), dan Randall Collins (1941).

C. Perkembangan Sosiologi

1. Auguste Comte (1798-1857)

Auguste Comte lahir di Montpelier, Perancis, 19 Januari 1798. Auguste Comte adalah seorang ahli filsafat berasal dari Prancis yang secara umum dianggap sebagai *bapak* sosiologi. Namun demikian, tidak adanya ditemukan kesepakatan hal ini. Pandangan pandangan Reiss, Jr. (1968), bahwa Comte lebih tepatnya dianggap sebagai *godfather* (wali) daripada *progenitor* (leluhur) sosiologi oleh karena sumbangan pemikiran Comte hanya terbatas pada pemberian nama dan filsafat dalam membantu perkembangan sosiologi. Salah satu sumbangan Auguste Comte bagi sosiologi adalah filsafat yang mendorong sosiologi. Pemikiran Comte

tersebut nampak dalam tulisan bukunya yang berjudul Hukum Kemajuan Manusia/Hukum Tiga Tahap. Dalam bukunya Comte memberikan asumsi bahwa sejarah perkembangan pengetahuan manusia melewati tiga jenjang tahap, yaitu tahap teologi, tahap metafisika dan tahap positif. Pada umum- nya Comte dianggap sebagai aliran positivisme oleh karena memperkenal- kan metode positif.

Auguste Comte dalam teori evolusionernya mengenai *hukum tiga tahap* memberikan asumsi bahwa ada tiga tahap intelektual yang dilalui di sepanjang sejarah dunia (termasuk kelompok, masyarakat, ilmu, individu, hingga pikiran tidak terlepas dari pengaruh hukum tiga tahap). *Pertama,* Pada *tahap teologis* yang berada pada tahun 1300, selama periode tersebut sistem ide utama menekankan kepercayaan bahwa akar permasalahan segala sesuatu adalah kekuatan supernatural dan tokoh agama yang diteladani oleh manusia. Secara khusus, dunia sosial dan fisik dianggap dihasilkan oleh tuhan. *Kedua,* tahap *metafisik,* yang terjadi kisaran tahun 1300-1800. Era tersebut ditandai dengan adanya kepercayaan bahwa ada- nya daya abstrak seperti alam, bukan lagi kekuatan dewa-dewa yang di- anggap hampir menjelaskan segala sesuatu. Akhirnya, pada tahun 1800, dunia mulai memasuki tahap *positivistik,* yang ditandai dengan keper- cayaan ilmu pengetahuan. Pada tahap ini, orang cenderung membuang pencarian sebab-sebab yang bersifat absolut, sebagai gantinya memusat- kan perhatiannya pada pengamatan dunia sosial dan fisik untuk mencari hukum yang mengaturnya.

Adapun ciri utama metode positif adalah objek yang dikaji harus berupa fakta, dan kajiannya juga memberikan manfaat dan memiliki manfaat pada kepastian, ketelitian dan kecermatan. Untuk melakukan kajian metode positif hendaknya memiliki landasan sebagai berikut:

a. Metode Pengamatan
b. Metode Perbandingan
c. Metode eksperiman
d. Metode historis

Auguste Comte berpandangan bahwa sosiologi harus menggunakan metode positif karena dalam pandangannya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang sama dengan ilmu pengetahuan alam yang sebelumnya lebih dahulu ada. Ruang lingkup sosiologi yang tidak menggunakan metode pengamatan, perbandingan eksperimen, atau historis dianggap bukan sebagai kajian ilmiah, melainkan dianggap sebagai sebuah

renungan atau khayalan. Selanjutnya pemikiran lainnya Auguste Comte, tentang pembagian sosiologi dalam statistika sosial. Kajian statistika sosial ini melingkupi terhadap kemajuan dan perubahan sosial. Perlu diketahui bahwa statistika mewakili stabilitas, sementara dinamika mewakili per- ubahan. Dalam hal ini, hubungan diantara statistika sosial dengan dina- mika sosial dapat disamakan hubungan antara anatomi dan fisiologi.

Dengan demikian bahwa di dalam teorinya mengenai dunia, Comte berfokus pada faktor-faktor intelektual. Argumentasi utamanya bahwa kekacauan intelektual adalah penyebab kekacauan sosial. Kekacauan sosial berasal dari sistem-sistem yang lebih awal muncul (teologis dan metafisik) yang berlanjut ke zaman positivistik (ilmiah). Pergolakan sosial baru akan berhenti bilamana positivism telah mendapat kendali total. Oleh karena hal tersebut merupakan proses evolusioner, pergolakan sosial dan revolusi tidak perlu dimunculkan.

Istilah Sosiologi sebagai cabang Ilmu Sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Perancis, bernama August Comte tahun 1842 dan kemudian dikenal sebagai *Bapak Sosiologi*. Salah satu pemikiran Comte dalam bukunya adalah *Course De Pholosophie Positive* dalam bukunya comte mengemukakan pandangannya mengenai "Hukum Kemajuan Manusia" atau lebih popular dikenal sebagai Hukum Tiga Tahap/Jenjang.

a. Jenjang Teologis atau yang sering disebut tahap mitos merupakan tahap di mana manusia masih mempercayai hal-hal mistik, sehingga mereka tidak menanyakan sebab akibat dari gejala alam yang terjadi di sekitarnya. Misalnya terjadinya pelangi yang mereka anggap merupakan selendang bidadari, terjadinya petir yang dianggap dewa murka, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini Comte membaginya menjadi tiga periode yaitu; (1) Periode Fetisisme. Kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. (2) Politeisme. Munculnya anggapan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupannya atau gejala alam. (3) Monoteisme. Kepercayaan dewa mulai digantikan dengan yang tunggal.
b. Jenjang metafisik adalah merupakan tahap perpindahan antara tahap teologis ke tahap positif. Tahap ini ditandai oleh suatu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang dapat ditemukan dengan akal budi. Jadi dalam masa ini, masyarakat telah menggunakan nalar mereka untuk menentukan logis tidaknya kejadian alam yang ada.

c. Jenjang positif adalah ditandai oleh kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, tetapi sekali lagi pengetahuan itu sifatnya sementara dan tidak mutlak atau sering disebut dengan dinamis. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat positivisme yang selalu terbuka secara terus menerus terhadap data baru yang terus mengalami pembaharuan dan menunjukkan dinamika yang tinggi. Analisa rasional mengenai data empiris akhirnya akan memungkinkan manusia untuk memperoleh hukum-hukum yang bersifat uniformitas.

Dalam perkembangannya Comte juga dianggap sebagai perintis positivisme. Sumbangan pikiran penting lain yang diberikan Comte adalah pembagian sosiologi kedalam dua bagian besar yaitu; (1) statistika sosial adalah dimaksudkan semua unsur struktural yang melandasi dan menunjang orde, tertib, dan kestabilan masyarakat. Antara lain disebut: sistem perundangan, struktur organisasi, dan nilai-nilai seperti keyakinan, kaidah dan kewajiban yang semuanya memberi bentuk yang konkret dan mantap kepada kehidupan bersama; dan (2) Dinamika Sosial adalah di-maksudkan semua proses pergolakan yang menuju perubahan sosial.

2. Karl Marx (1818-1883

Karl Marx lahir di Trier, Prussia, 5 Mei 1818 (Beilharz, 2005; Ritzer, G, 2012; 81). Karl Marx berasal dari keluarga rohaniawan Yahudi. Lebih dikenal sebagai tokoh sejarah ekonomi, ahli filsafat, dan aktivis. Marx mengembangkan teori mengenai sosialisme yang lebih dikenal se- bagai Marxisme daripada perintis sosiologi. Sumbangan Marx bagi sosio- logi terletak pada teorinya mengenai sosial. Penggunaan istilah kerja bagi Marx tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan ekonomi. Melainkan meliputi tindakan produktif yang mengubah aspek-aspek material alam sesuai dengan maksud manusia. Apapun yang diciptakan melalui kegiatan ber-maksud yang bebas adalah ungkapan hakikat kemanusiaan dan juga trans-formasi kebudayaan manusia.

Penggunaan istilah kerja oleh Marx, tidak hanya terbatas pada ke-giatan-kegiatan yang bersifat ekonomi, namun meliputi tindakan produktif yang mengubah aspek material alam sesuai dengan maksud dan tujuan manusia. Adapun yang diciptakan melalui kegiatan bermaksud dan bebas ini adalah ungkapan hakikat kemanusiaan dan juga transformasi dalam kehidupan manusia. Kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, namun demikian kerja itu sendiri dapat mentransformasikan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, serta dapat menimbulkan bentuk baru kegiatan yang

bersifat produktif. Pandangan selanjutnya dari Marx tentang kerja adalah pengembangan-pengembangan kekuasaan dan potensi manusia. Kerja juga dipandang sebagai suatu kegiatan sosial. Kerja juga melibatkan orang lain yang memberikan dampak pada kebutuhan dalam memenuhi pekerjaan manusia, atau dapat juga dikatakan kerja akan memberikan hasil bagi manusia.

Selanjutnya Karl Marx, juga dikenal melalui pandangannya tentang modal, kaum kapitalis dan kaum proletariat. Dalam pandangannya masyarakat yang didominasi oleh benda-benda dengan nilai utamanya adalah pertukaran, menghasilkan kategori-kategori manusia tertentu. Dua tipe utama yang diperhatikan Marx adalah kaum proletariat dan kapitalis. Para pekerja menjual tenaga kerja mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi (modal usaha) sendiri adalah disebut sebagai kaum proletariat. Marx percaya bahwa kaum proletariat yang pada akhirnya kehilangan keahliannya sendiri ketika mereka semakin melayani mesin-mesin yang sudah menggantikan keahlian mereka. Karena para anggota kaum proletariat berproduksi hanya untuk pertukaran, mereka juga merupakan konsumen. Karena mereka dibatasi dengan kepemilikan alat-alat produksi bagi kebutuhan hidup mereka sendiri, mereka juga menggunakan upahnya untuk membeli kebutuhannya. Sebagai akibat, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kaum proletariat sepenuhnya bergantung pada upah yang yang diterimanya. Hal tersebut kemudian kaum proletariat memiliki ketergantungan pada orang-orang (pengusaha) yang memberikan upah kepadanya.

Selanjutnya orang-orang yang membayar upah adalah disebut sebagai kaum kapitalis (pengusaha). Kaum kapitalis dalam hal ini adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi/mereka yang memiliki modal usaha/mereka yang memiliki perusahaan produksi barang dan jasa. Pandangan H. Wolf, bahwa kapital (*modal*) uang yang menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Modal adalah uang ditanamkan daripada diguna- kan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan manusia.

Pandangan Marx (1867/1967: 333) bahwa, modal adalah uang yang telah menghasilkan uang lebih banyak. Selain dari pada itu, modal adalah suatu relasi sosial yang khusus. Uang akan menjadi modal relasi sosial diantara satu pihak kaum proletariat yang melakukan pekerjaan dan harus membeli produk dan pihak lain orang-orang yang telah menanamkan modalnya (uang) tersebut. Kemampuan modal untuk menghasilkan ke-

untungan nampak sebagai suatu kekuatan yang bersumber dari *alam* suatu kekuatan produktif yang selalu ada didalam modal yang dapat juga disebut sebagai relasi kekuasaan. Perlu diingat bahwa, modal tidak dapat bertambah kecuali dengan mengeksploitasi orang yang telah mengerjakan tersebut. Para pekerja dieksploitasi oleh suatu sistem, atau dapat juga dikatakan bahwa sistem tersebut diproduksi melalui tenaga kerja para pekerja itu sendiri. Sistem kapitalis ialah struktur sosial yang muncul dari hubungan eksploitasi tersebut. Dengan demikian para kapitalis adalah orang-orang yang hidup dari keuntungan modal. Pada hakikatnya modal memiliki suatu relasi sosial diantara mereka yang memiliki alat produksi/ modal usaha dan pekerja yang bekerja ditempat tersebut diberikan upah.

Karl Marx lebih dikenal sebagai tokoh sejarah ekonomi, ahli filsafat dan sejarah, ekonomi politik dan aktivis yang mengembangkan teori me- ngenai sosialisme yang kemudian dikenal dengan nama Marxisme. Sumbangan utama Marx pada teorinya mengenai Kelas. Marx berpandangan bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Pandangan Marx perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda. Kelas yang terdiri atas orang yang menguasai alat produksi atau kaum *Bourgeoisie*, dan kelas yang terdiri atas orang yang tidak menguasai alat produksi atau kaum *Proletar*.

3. Emile Durkheim (1859-1917)

Emile Durkheim lahir pada 15 April 1858 di Epinal Prancis. Durkheim dibesarkan dilingkungan keturunan *Rabi* dan belajar menjadi seorang *Rabi.* Dalam pandangan Durkheim, memberikan usulan agar pokok masalah sosiologi harusnya mempalajari fakta-fakta sosial. Fakta sosial adalah struktur sosial, norma, nilai kultural yang eksternal bagi dan bersifat memaksa pada aktor. Contoh mahasiswa yang dibatasi oleh struktur sosial seperti birokrasi perguruan tinggi dan juga norma dan nilai masyarakat yang memberikan dampak pada aspek pendidikans.

Dalam perjalanan pemikirannya, Durkheim memberikan dua cara penafsiran suatu fakta sosial, sehingga sosiologi dibedakan dari psikologi. *Pertama,* fakta sosial dialami sebagai suatu paksaan ensternal dibanding suatu dorongan internal; *kedua,* fakta sosial merupakan hal yang bersifat umum di seluruh cakupan masyarakat dan tidak melekat pada setiap individu yang khusus. Durkheim juga memberikan argumentasi terhadap

fakta sosial yang tidak direduksi menjadi kepentingan individu, melainkan harus dipelajari dan dimaknai sebagai realitasnya sendiri.

Durkheim, mengacu fakta sosial dengan istilah latin *sui generis* (unik). Durkheim, menggunakan istilah ini untuk mengklaim bahwa fakta sosial memiliki karakter unik tersendiri yang tidak dapat direduksi menjadi kesadaran individual. Secara sederhana fakta sosial dapat dipelajari secara empiris, bersifat eksternal bagi individu, bersifat memaksa individu dan dijelaskan dengan fakta sosial yang lain. Contoh aturan hukum yang berlaku dikalangan masyarakat, kewajiban moral bagi mahasiswa terhadap dosennya, dan lain sebagainya. Selanjutnya Durkheim, membagi ke dalam dua kelompok fakta sosial, yakni; fakta sosial material dan fakta sosial non material. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa fakta sosial material dapat dikategorikan sebagai gaya arsitektural, bentuk teknologi, peraturan hukum dan lain sebagainya.

Hal yang lebih utama dalam fakta sosial material adalah dapat mengungkapkan ranah kekuatan moral yang lebih besar dan kuat yang setidaknya menghampiri bagi para individu dan bersifat memaksa. Semen-tara fakta sosial non material adalah pada tingkat tertentu fakta sosial dapat diketemukan pada pikiran para individu. Apa yang kini disebut oleh sosiolog norma dan nilai atau secara umum kebudayaan adalah bagian dari penafsiran fakta sosial non material. Dalam hal ini Durkheim, mengu-raikan fakta sosial non material, yakni; (1) moralitas yaitu suatu fakta sosial yang dapat dipelajari secara empiris, eksternal, bersifat memaksa dan menjelaskan fakta sosial yang lain; (2) nurani kolektif yaitu masya-rakat yang memiliki suatu nurani kolektif yang lebih kuat dimana terdapat norma, kepercayaan yang diyakini lebih banyak dimiliki oleh masyarakat seperti yang terdapat pada masyaralat primitive; (3) representasi kolektif adalah cara masyarakat mencerminkan dirinya melalui gambaran keper- cayaan, norma, dan nilai kolektif; dan (4) arus sosial merupakan gambaran dimana masyarakat dibawa serta oleh arus sosial dan arus itu memiliki suatu daya memaksa kapada masyarakat, meskipun kita baru menyadari bahwa kita sedang berada dalam perasaan yang sama didalam masyarakat. Emile Durkheim dalam buku berjudul *The Division of Labor in Society* (1893/1964), secara garis besar menggambarkan mengkaji suatu gejala yang sedang melanda masyarakat yaitu pembagian kerja. Dalam bidang perekonomian, seperti industri moderen, terjadi penggunaan mesin serta konsentrasi modal dan tenaga kerja yang mengakibatkan pembagian

kerja dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan okupasi yang semakin terperinci. Gejala tersebut juga dapat dijumpai pada pada bidang perniagaan dan pertanian dan tidak terbatas pada bidang ekonomi saja, namun juga pada sector kehidupan lainnya, yaitu hukum, politik, kesenian bahkan hingga lingkungan keluarga.

Durkheim, juga menguraikan tentang solidaritas mekanis dan organik. Durkheim, memiliki ketertarikan pada tatanan sosial yang menghasilkan solidaritas sosial dengan kata lain cara yang berubah dapat mempersatukan masyarakat sebagaimana para anggota masyarakat melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Untuk itu, Durkheim, mengelaborasikan perbedaan tersebut yang dicirikan sebagai solidaritas mekanis dan organic. Durkeim merupakan seorang ilmuan yang produktif. Karya utamanya adalah *The Division of Labor in Society* (1968) Durkheim melihat bahwa masyarakat manusia memerlukan solidaritas. Dalam buku *The Vision of Labor in Society* (1968) merupakan upaya Durkheim untuk memahami fungsi pembagian kerja dalam masyarakat, serta mengetahui faktor penyebabnya. Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat. Manusia memerlukan solidaritas Durkheim membedakan antara dua tipe utama solidaritas: (1) Solidaritas Mekanik (2) Solidaritas Organik. Lambat laun pembagian kerja dalam masyarakat semakin berkembang sehingga solidaritas mekanik berubah menjadi solidaritas organik.

4. Max Weber (1864-1920)

Weber seorang ilmuan yang sangat produktif. Salah satu bukunya yang terkenal adalah *The Protestant Etic and The Spirit of Capitalim* mengemukakan bahwa keterkaitan antara etika dengan munculnya kapital- isme di Eropa barat. Sumbangan Weber yang tidak pentingnya adalah mengenai konsep dasar dalam sosiologi. Dalam uraiannya Weber menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial.

Bab 3
Proses Sosial dan Interaksi Sosial

A. Pengertian Proses Sosial

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyah-nya pola-pola kehidupan yang telah ada. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial karena interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Sedangkan interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang-per-orangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang per-orangan dan kelompok manusia. Selanjutnya kriteria interaksi sosial yakni; (1) harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu; (2) ada komunikasi antar pelaku; (3) ada dimensi waktu; dan (4) ada tujuan-tujuan tertentu.

B. Tindakan Sosial

Para ahli sosiologi memahami tindakan manusia dari sudut pandang perilakunya. Tindakan manusia dipahami sebagai perbuatan, perilaku atau aksi yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tindakan manusia sangat beragam dan kompleks, artinya jika tindakan yang dilakukan untuk memperoleh benda-benda kebutuhan pokok dalam kehidupannya, maka tindakan tersebut disebut tindakan ekonomi. Tindakan yang berkaitan dengan aktivitas memilih dan dipilih dalam suatu kepemimpinan disebut tindakan politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya tindakan manusia dibedakan dalam dua macam, yakni:

1. Tindakan yang terorganisasi. Artinya tindakan yang dilatarbelakangi oleh seperangkat kesadaran sehingga apa yang dilakukan tersebut didorong oleh tingkat kesadaran yang berasal dalam dirinya.
2. Tindakan yang dilakukan tanpa kesadaran, yaitu tindakan refleks yang tidak dikategorikan tidakan sosial, sebab tindakan tersebut tidak terorganisasi melalui kesadaran diri.

C. Proses Terbentuknya Tindakan Terorganisasi

Proses terbentuknya tindakan terorganisasi akan diuraikan sebagai berikut.

1. Imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa saja yang dimiliki orang lain. Imitasi bisa membawa dampak positif dan negatif, tergantung dari yang ditiru.
2. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan sugesti tersebut menuruti apa yang disugestikannya tanpa berfikir lagi secara kritis dan rasional (bersifat negatif).
3. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain yang ditirunya.
4. Simpati adalah suatu proses kejiwaan, di mana seorang individu merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang, karena sikapnya, penampilannya, wibawanya, atau perbuatannya yang sedemikian rupa.
5. Empati adalah mirip dengan simpati, tapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja tapi dibarengi perasaan yang sangat dalam.
6. Motivasi adalah rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab (bersifat positif).

D. Tipe Tindakan Sosial

Tindakan sosial pandangan Max Weber adalah Tindakan seorang individu yang dapat memengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat. Jika dilihat dari tekanan, cara, dan tujuan tindakan sosial, maka tindakan sosial dapat dibedakan menjadi empat, yakni; (1) tindakan sosial rasional instrumental; (2) tindakan sosial berorientasi nilai; (3) tindakan sosial tradisional; dan (4) tindakan sosial efektif.

1. Tindakan sosial rasional instrumental adalah Tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan yang dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dan lebih menekankan pada rasio (akal) sebagai alat yang digunakan untuk mendasari tindakan tersebut dan diikuti tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

2. Tindakan sosial berorientasi nilai adalah tindakan yang selalu didasarkan pada nilai-nilai dasar yang berlaku dimasyarakat.
3. Tindakan sosial tradisional adalah lebih menekankan pada aspek-aspek kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dimasyarakat. Tindakan ini terjadi tanpa melalui perencanaan terutama yang berkenaan dengan aspek tujuan. Pertimbangan pokok dari tindakan ini adalah faktor kebiasaan artinya sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang.
4. Tindakan sosial efektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan perasaan atau emosi. Kebanyakan tindakan ini dikuasai oleh perasaan atau emosi yang tanpa perhitungan atau pertimbangan rasional tetentu.

E. Kontak Sosial

Kata "kontak" (Inggris: *contact*) berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum* yang artinya bersama-sama dan *tangere* yang artinya menyentuh. Jadi, kontak berarti bersama-sama menyentuh. Dalam pengertian sosio- logi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadi-nya kontak. Selanjutnya macam-macam kontak sosial dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya; (1) berdasarkan cara; (2) berdasarkan sifat; (3) berdasarkan bentuk; dan (4) berdasarkan tingkat hubungan.

Jika dilihat dari caranya, maka kontak sosial dibagi menjadi dua, yakni; (1) kontak sosial langsung; dan (2) kontak sosial tidak langsung. Jika dilihat dari sifatnya dilihat menjadi 3 yaitu; (1) kontak sosial antara individu-individu; (2) kontak sosial antara individu dan kelompok; dan (3) kontak sosial antara kelompok dan kelompok. Jika dilihat dari bentuknya, kontak sosial dibagi menjadi 2 yakni; (1) kontak sosial Positif; dan (2) kontak sosial negatif.

Berdasarkan tingkat hubungannya, kontak sosial dapat dibedakan menjadi dua, yakni; (1) kontak sosial primer. Artinya jika seseorang atau sekelompok orang yang mengadakan hubungan langsung bertemu atau bertatap muka secara lansung seperti saling berjabat tangan, bercakap-cakap secara berhadap-hadapan saling senyum dan lain sebagainya; dan (2) kontak sosial sekunder, dimana bentuk hubungan sosial yang terjadi

baik antara individu mapun antar kelompok tidak terjadi secara langsung tetapi dengan menggunakan perantara (mediator), misalnya; menggunakan telepon dan media lain sebagainya.

F. Bentuk Proses Sosial

Adapun bentuk proses sosial terbagi dalam dua kategori, yakni;

1. Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang didalam realitas sosial anggota-anggota masyarakat dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Harmoni sosial ini menciptakan kondisi sosial yang teratur atau disebut sosial order. Proses sosial asosiatif dibedakan menjadi kelompok, yakni; (1) kerja sama adalah (terjadi karena kesamaan tujuan); (2) akomodasi adalah (upaya untuk men-capai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai yang mengarah pada kondisi atau keadaah selesainnya suatu konflik atau pertikaian tersebut; dan (3) asimilasi adalah (proses sosial yang ditandai oleh adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan antar kelompok sosial yang diikuti usaha-usaha untuk mencapai kesatuan tindakan, sikap dan proses-proses mental dengan memprehatikan kepentingan bersama.
2. Proses sosial disosiatif adalah keadaan realita sosial dalam keadaan disharmoni sebagai akibat adanya pertentangan antar anggota masya-rakat ini dipacu adanya ketidaktertiban sosial atau disorder. Proses sosial disosiatif dibagi dalam tiga kelompok, yakni; (1) persaingan adalah (proses sosial di mana orang perorangan atau sekelompok manusia yang terlibat dalam proses saling berebut untuk mencari ke-untungan melalui bidang-bidang kehiupan yang pada masa tetentu menjadi pusat perhatian publik; (2) kontravensi adalah (pertikaian yang di tandai oleh gejala-gejala adanya ketidak pastian tentang diri seseorang atau keragu-raguan atas diri seseorang; dan (3) konflik adalah (proses sosial di mana masing-masing pihak berinteraksi ber-usaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa benci atau rasa permusuhan.

G. Interaksi Sosial

Istilah ini dipopulerkan oleh George Herbert Mead melalui sumber pemikirannya tentang interaksionisme simbolik. Dari kata interaksionisme

sudah nampak bahwa sasaran pendekatan ini ialah interaksi sosial kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Sementara pandangan Leslie White mendefenisikan simbol adalah sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepada yang mempergunakannya.

Secara Bahasa: *inter* (antar/saling); *action* (tindakan). Sedangkan secara Etimologis: hubungan timbal balik antarsesamanya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu manusia dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dan individu. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu manusia dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dan individu.

Adapun ciri-ciri interaksi sosial yakni; (1) jumlah pelaku lebih dari satu orang; (2) komunikasi antar pelaku menggunakan simbol; (3) ada dimensi waktu; dan (4) ada tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial, yakni; (1) terjadi kontak sosial; dan (2) terjadi komunikasi.

1. Kontak sosial adalah kata "kontak" (Inggris: "*contact*") berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum* yang artinya bersama-sama dan *tangere* yang artinya menyentuh. Jadi, kontak berarti bersama-sama menyentuh. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi apabila para peserta interaksi bertemu muka secara langsung. Misalnya, kontak antara guru dan murid di dalam kelas, penjual dan pembeli di pasar tradisional, atau pertemuan ayah dan anak di meja makan. Sementara itu, kontak sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui suatu perantara. Misalnya, percakapan melalui telepon. Kontak sekunder dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kontak sekunder langsung misalnya terjadi saat ketua RW mengun- dang ketua RT datang ke rumahnya melalui telepon. Sementara jika Ketua RW menyuruh sekretarisnya menyampaikan pesan kepada

ketua RT agar datang ke rumahnya, yang terjadi adalah kontak sekunder tidak langsung.

2. Komunikasi adalah memuat komponen-komponen yakni; (1) komunikator berperan penyampai pesan; (2) komunikan berperan penerima pesan; (3) pesan berperan segala sesuatu yang disampaikan komunikator; (4) media berperan sarana untuk menyampaikan pesan; dan (5) efek berperan perubahan yang terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Adanya komunikasi menimbulkan kontak sosial. Akan tetapi, adanya kontak sosial belum tentu menimbulkan komunikasi. Interaksi sosial juga dapat terjadi melalui komunikasi nonverbal. Setiap pihak menyadari keberadaan pihak lain yang dapat menyebabkan perubahan perasaan. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku (pembicara- an, gerakan-gerakan fisik, atau sikap) dan perasaan-perasaan yang disampaikan.

H. Faktor Pendorong Interaksi Sosial

Interaksi sosial dilandasi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri manusia itu sendiri maupun dari luar, antara lain;

1. Faktor dari dalam manusia yakni meliputi; (1) dorongan kodrati sebagai makhluk sosial; (2) dorongan untuk memenuhi kebutuhan; dan (3) dorongan untuk mengembangkan diri
2. Faktor dari luar manusia yakni meliputi; (1) imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa saja yang dimiliki orang lain. Imitasi bisa membawa dampak positif dan negatif, tergantung dari yang ditiru; (2) identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain yang ditirunya; (3) sugesti adalah *rangsangan*, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan sugesti tersebut menuruti apa yang disugestikannya tanpa berfikir lagi secara kritis dan rasional (bersifat negatif);
   (4) motivasi adalah rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberi- kan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab

(bersifat positif); (5) simpati adalah suatu proses kejiwaan, di mana seorang individu merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang, karena sikapnya, penampilannya, wibawanya, atau perbuatannya yang sedemikian rupa; dan (6) empati adalah mirip dengan simpati, tapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja tapi dibarengi perasaanyangsangatdalam.

Bab 4
Masyarakat Sebagai Suatu Sistem Sosial

A. Pengertian Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Pandangan Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Pandangan Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat adalah merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

Pandangan J.L Gillin dan J.P Gillin masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Pandangan Ralph Linton masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Pandangan Emile Durkheim masyarakat adalah suatu sisitem yang dibentuk dari hubungan antar anggota, sehingga menampilkan suatu realitas tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. Sedangkan pandangan Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Selanjutnya pandangan Roucek dan Warren masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa dan kesadaran bersama, di mana mereka berdiam (bertempat tinggal) dalam daerah yang sama yang sebagian besar atau seluruh warga-nya memperlihatkan adanya adat istiadat serta aktivitas yang sama pula.

Masyarakat dapat dibedakan dalam pengertian natural dan kultural, yakni; (1) masyarakat dalam pengertian natural adalah *community* yang ditandai oleh adanya persamaan tempat tinggal (*the same geographic area*). Misalnya masyarakat Sunda, masyarakat Jawa, masyarakat Batak, dan sebagainya; dan (2) masyarakat dalam pengertian kultural adalah *society*

yang keberadaannya tidak terikat oleh *the same geographic area*, melain- kan hasil dinamika kebudayaan peradaban manusia. Misalnya masyarakat pelajar, masyarakat petani, dan sebagainya.

Pandangan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya, yakni; (1) manusia yang hidup bersama, se- kurang-kurangnya terdiri atas dua orang; (2) bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbul- kan manusia manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia; dan (3) sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan. Merupa- kan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

B. Masyarakat Sebagai Sistem Sosial

Sebagai suatu sistem, individu-individu yang terdapat di dalam masyarakat saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain, misalnya dengan melakukan kerja sama guna memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

1. Sistem sosial adalah bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat berfungsi melakukan suatu kerja sama dalam tujuan tertentu. Sistem sosial itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen sosial. Elemen tersebut terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi, sehingga ter- cipta hubungan-hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial ter- sebut membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yang akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut.
2. Struktur sosial adalah mencakup susunan status dan peran yang ter- dapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antarstatus dan antarperan sosial. Dalam struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah- kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Bagaimana sebetulnya unsur-unsur sosial itu terbentuk, berkembang, dan dipelajari oleh individu dalam masya- rakat? Melalui proses-proses sosial semua itu dapat dilakukan. Proses sosial itu sendiri merupakan hubungan timbal balik antara bidang-

bidang kehidupan dalam masyarakat dengan memahami dan mematuhi norma-norma yang berlaku.

3. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial adalah apabila kita mengikuti pengertian masyarakat baik secara natural maupun kultural, maka akan tampak bahwa keberadaan kedua masyarakat itu merupakan satu-kesatuan. Dengan demikian, kita akan tahu bahwa unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat yang masing-masing saling bergantung merupakan satu-kesatuan fungsi. Adanya mekanisme yang saling bergantung, saling fungsional, saling mendukung antara berbagai unsur dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain itulah yang disebut sebagai sistem. Masyarakat sebagai suatu sistem selalu mengalami dinamika yang mengikuti hukum sebab akibat (kausal). Apabila ada perubahan pada salah satu unsur atau aspek, maka unsur yang lain akan me- nerima konsekuensi atau akibatnya, baik yang positif maupun yang negatif. Oleh karena itu, sosiologi melihat masyarakat atau perubahan masyarakat selalu dalam kerangka sistemik, artinya perubahan yang terjadi di salah satu aspek akan memengaruhi faktor-faktor lain secara menyeluruh dan berjenjang.

C. Sembilan Unsur Masyarakat Sebagai Sistem Sosial

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial harus terdiri atas sembilan unsur berikut ini.

1. Kepercayaan dan Pengetahuan. Unsur ini merupakan unsur yang paling penting dalam sistem sosial, karena perilaku anggota dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ketahui tentang kebenaran, sistem religi, dan cara-cara penyembahan kepada sang pencipta alam semesta.
2. Perasaan. Unsur ini merupakan keadaan jiwa manusia yang berkenaan dengan situasi alam sekitarnya, termasuk di dalamnya sesama manusia. Perasaan terbentuk melalui hubungan yang menghasilkan situasi kejiwaan tertentu yang sampai pada tingkat tertentu harus dikuasai agar tidak terjadi ketegangan jiwa yang berlebihan.
3. Tujuan. Manusia sebagai makhluk sosial dalam setiap tindakannya mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah hasil akhir atas suatu tindakan dan perilaku seseorang yang harus dicapai, baik melalui perubahan maupun dengan cara mempertahankan ke- adaan yang sudah ada.

4. Kedudukan/status dan peran. Kedudukan/status adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestasi, hak, serta kewajiban-nya. Kedudukan menentukan peran atau apa yang harus diperbuatnya bagi masyarakat sesuai dengan status yang dimilikinya. Selanjutnya peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sehubu- ngan dengan status yang melekat padanya. Contohnya seorang guru (status) mempunyai peranan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan atau menyampaikan materi pelajaran kepada siswa-siswanya.
5. Kaidah/norma. Merupakan pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat atau biasa disebut dengan peraturan sosial. Norma sosial merupakan landasan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu dan merupakan unsur paling penting untuk meramalkan tindakan ma- nusia dalam sistem sosial. Norma sosial dipelajari dan dikembangkan melalui sosialisasi, sehingga menjadi pranata-pranata sosial yang me- nyusun sistem itu sendiri.
6. Kedudukan/pangkat. Norma adalah pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat atau biasa disebut dengan peraturan sosial. Norma sosial merupakan landasan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu dan merupakan unsur paling penting untuk meramalkan tindakan manusia dalam sistem sosial. Norma sosial dipelajari dan dikembangkan melalui sosialisasi, sehingga menjadi pranata-pranata sosial yang menyusun sistem itu sendiri.
7. Kekuasaan. Setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak-pihak lain. Apabila seseorang diakui oleh masyarakat sekitarnya, maka itulah yang disebut dengan kekuasaan.
8. Sanksi. Merupakan suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Sanksi dapat berupa hadiah (*reward*) dan dapat pula berupa hukuman (*punishment*). Sanksi diberikan atau ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
9. Fasilitas/sarana. Merupakan segala bentuk cara, jalan, metode, dan benda-benda yang digunakan manusia untuk menciptakan tujuan sistem sosial itu sendiri. Dengan demikian fasilitas di sini sama

dengan sumber daya material atau kebendaan maupun sumber daya imaterial yang berupa ide atau gagasan.

D. Pandangan Sosiologi tentang Masyarakat

Meskipun fokus utama sosiologi tentang masyarakat, keberadaan individu tidak dapat dinafikan. Bukankah terbentuknya masyarakat oleh karena adanya himpunan individu-individu yang saling berinteraksi? Interaksi antarindividu menciptakan kelompok. Selanjutnya kelompok (*group*) yang beranggotakan individu dalam jumlah yang lebih besar disebut komunitas (*community*). Komunitas dalam jumlah yang lebih besar dan luas, menciptakan konsep masyarakat (*society*). Himpunan masyarakat yang paling besar adalah negara (*state*), maka negara merupakan bentuk kelompok yang paling besar. Oleh karena itu, objek formal sosiologi merentang dalam sebuah garis kontinum dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dimulai dari individu, kelompok, komunitas, masyarakat, bahkan sampai negara dan dunia. Mulai dari level yang terkecil (mikro/individu) sampai level besar (makro/negara). Mulai dari proses pemaknaan sampai proses sosial. Konsep individu dan masyarakat bukan hanya bersifat kontinum, melainkan juga seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Individu tidak dapat hidup, bersosialisasi dan berkembang tanpa adanya masyarakat. Masyarakat tidak mungkin ada, jika tidak ada sekumpulan individu.

Oleh karena itu, dalam perkembangannya, level analisis sosiologi dibagi dalam kelompok besar, yaitu level mikto dan level makro. Level mikro menciptakan sosiologi mikro dan level makro menciptakan sosio- logi makro. Dengan demikian, maka sudah jelas dalam sosiologi makro tersebut berskala luas struktur kajian masyarakatnya dan mempertanyakan bagaimana mereka memiliki hubungan satu sama lainnya. Versi sosiologi makro ini adalah versi yang sangat riuh dan sangat banyak menggunakan berbagai konsep, teori dan temuan dari dua ilmu sosial yang berbeda yaitu Antropologi dan Sejarah. Berkaitan dengan luasnya kajian sosiologi makro, secara ringkas paling tidak terdapat enam strategi teoretis, yakni;

1. *Materialisme*: mengasumsikan bahwa kondisi-kondisi material dari eksistensi manusia seperti tingkat teknologi, pola kehidupan ekonomi, dan ciri-ciri lingkungan alamiah merupakan penyebab yang menentukan pengorganisasian masyarakat manusia dan berbagai perubahan penting yang terjadi di dalamnya.

2. *Idealisme*: menegaskan signifikansi pikiran manusia dan kreasinya pemikiran, gagasan, kode simbolik, Bahasa, dan seterusnya dalam menentukan pengorganisasian masyarakat dan perubahan sosial.
3. *Fungsionalisme*: berusaha menjelaskan ciri-ciri dasar kehidupan manusia sebagai respon terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat sebagai sistem sosial yang tidak pernah tetap. Mengasumsikan bahwa trait-trait sosial yang ada memberikan kontribusi yang penting dalam mempertahankan kehidupan kesejahteraan seluruh masyarakat atau subsistem utamanya.
4. *Strategi konflik*: memandang masyarakat sebagai arena di mana masing-masing individu dan kelompok bertarung untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Konflik dan pertentangan menimbulkan dominasi dan subordinasi, kelompok yang dominan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menentukan struktur masyarakat, sehingga menguntung bagi kelompok-kelompok mereka sendiri. Teori konflik Marxian adalah teori konflik materialis dan menekankan pertentangan kelas, sementara teori konflik Weberian lebih luas sifatnya dan menekankan sifat multidimensional dari konflik dan dominasi.
5. *Strategi evolusioner*: memusatkan perhatian kepada upaya mendeskripsikan dan menjelaskan transformasi sosial jangka panjang yang diasumsikan akan memperlihatkan arah transformasi untuk seluruh perubahan dalam masyarakat manusia. Teori-teori fungsionalis evolusioner memusatkan perhatian kepada kompleksitas masyarakat yang selalu berkembang. Teori-teori evolusi materialis menekankan evolusi sosial yang merespons terhadap kondisi-kondisi material yang berubah, dan bersikap skeptis terhadap penyamaan evolusi dan kemajuan.
6. *Strategi elektisisme*: memberikan toleransi kepada semua sudut pandang yang ada, dalam praktiknya berarti menggunakan bagian-bagian dari setiap yang ada untuk menjelaskan banyak keadaan kehidupan sosial. Klaim bahwa kenyataan tertentu harus dijelaskan dengan satu pendekatan, dan kenyataan lainnya dengan pendekatan yang berbeda.

Interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan sebaliknya, kelompok dengan kelompok yang terjadi secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama, pada akhirnya melahirkan pola sosial (*sosial pattern*). Dalam hal ini sosio- logi mencoba mengidentifikasi pola-pola umum dengan mengkaji perilaku

individu yang hidup dalam masyarakat yang sama dan mengalami tekanan sosial yang sama. Sosiolog tertarik pada pengalaman individu dan bagaimana pengalaman-pengalaman dibentuk oleh interaksi dengan kelompok-kelompok sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi seorang sosiolog, Keputusan yang dibuat dan diambil oleh individu tidak berada di dalam ruang hampa. Pola sosial dan kekuatan sosial memberikan efek tekanan dan kontribusi pada individu dalam membuat keputusannya.

Sosiolog mengidentifikasi dan mempelajari pola yang berhubungan dengan semua jenis masalah sosial kontemporer. Munculnya istilah *parlemen jalanan* dalam demokrasi, solidaritas sosial yang melampaui batas-batas negara, penggunaan media sosial, gerakan sosial dari kaum homoseksual, munculnya budaya tanding, terorisme global, munculnya *e-government*, kelompok radikal yang menebar teror merupakan contoh topik yang bisa dieksplor oleh sosiolog. Istilah komunitas telah digunakan dalam berbagai cara dan pada berbagai tingkatan oleh sosiolog. Kekurangan analisis sosiologis masyarakat untuk pengembangan kebijakan sosial yang kritis dapat dilihat dalam antusiasisme yang diterima oleh kebijakan kepedulian masyarakat.

E. Karakteristik Masyarakat

Masyarakat memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Masyarakat terdiri dari individu-individu: masyarakat merupakan Kumpulan individu yang berbagai sikap, keyakinan dan cita-cita yang sama. Tanpa individu tidak akan ada masyarakat.
2. Adanya saling pengakuan: anggota yang berbeda-beda dalam masyarakat menyadari kehadiran satu sama lain dan mengarahkan perilaku pada yang lainnya.
3. Saling berinteraksi: individu berinteraksi secara terus-menerus dengan individu lain dari masyarakat. Hal ini mengacu pada kontak timbal balik antara dua indviduatau lebih.
4. Reksa kesadaran: masyarakat adalah jaringan hubungan sosial. Hubungan sosial hanya ada ketika anggota menyadari satu sama lain. Kesadaran bahwa individu menjadi bagian dari entitas masyarakat tertentu.
5. Memiliki ras bersama: masyarakat harus terdiri dari individu-individu yang berbagi sikap, keyakinan dan cita-cita yang sama.

6. Interdependensi: hubungan sosial yang ditandai dengan saling ketergantungan. Masyarakat sebagai kelompok inklusif besar, terdiri dari hanya dari individu-individu terkait satu sama lain, tetapi juga *intens* dan kelompok tumpang tindih. Pedagang harus bergantung pada sopir angkutan barang yang dapat mengangkut beras dari petani. Petani juga bergantung pada sopir dan pedagang beras. Petani tergantung pada penjual dan pabrik pupuk. Pedagang beras juga bergantung pada pembeli, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga atau untuk kebutuhan penjual nasi.
7. Kerjasama: pembagian kerja melibatkan tugas untuk masing-masing unit atau kelompok bagian tertentu dari tugas Bersama. Pembagian kerja mengarah ke spesialisasi. Pembagian kerja ini dimungkinkan karena kerjasama. Kerjasama adalah sangat dasar dan esensi dari ke- hidupan sosial. Kerjasama dan pembagian kerja mempromosikan so- sialitas. Dalam menciptakan keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan keadilan sosial di masyarakat dibutuhkan kerja sama antar-berbagai kelompok. Misalnya, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat (Linmas dan lain sebagainya), Kehakiman dan Kejaksaan.
8. Masyarakat adalah dinamis: masyarakat sama sekali bukan fenomena statis, melainkan merupakan entitas yang dinamis. Masyarakat tunduk pada perubahan konstan. Perubahan sosial terjadi di semua masyarakat dan setiap saat. Dinamika masyarakat, disebabkan karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Dinamika masyarakat karena faktor internal, misalnya pertumbuhan penduduk, konflik sosial, penemuan cara-cara baru dan lain sebagainya. Dinamika masyarakat karena faktor eksternal, misalnya karena penjajahan, pengaruh budaya luar/ asing, regulasi internasional dan lain sebagainya.
9. Kontrol sosial: kontrol sosial menyiratkan suatu sistem perangkat melalui mana masyarakat mengontrol kegiatan anggota individu. Kontrol sosial membawa kesesuaian sosial dan solidaritas sosial. Kontrol sosial dilakukan dengan cara membuat dan menegakkan peraturan yang disepakati bersama dan dikendalikan oleh lembaga yang memiliki wewenang.
10. Budaya: setiap masyarakat adalah unik, karena memiliki cara sendiri budaya. Ini adalah warisan sosial manusia. Masing-masing masyarakat

memiliki budaya yang berbeda dan dari waktu ke waktu budaya mengalami perubahan. Sebuah masyarakat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi atas dasar berbagai keyakinan, adat istiadat, nilai- nilai dan sikap budaya adalah pola perilaku masyarakat.

F. Hubungan Masyarakat dan Budaya

Munculnya pertanyaan tentang mempelajari sosiologi adalah apakah masyarakat dan budaya itu? Jawaban secara sosiologis atas pertanyaan tersebut adalah sosiologi mempelajari semua aspek sosial dan lapisan masyarakat. Secara sosiologis masyarakat dapat diterjemahkan sebagai sekelompok individu yang anggotanya saling berinteraksi, berada di wilayah yang di maknai sama, dan saling berbagi budaya. Budaya dalam konteks ini mencakup praktik-praktik kelompok Bersama, adat istiadat, nilai-nilai dan keyakinan. Konsep masyarakat dan budaya, secara sosiologis tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak ada masyarakat tanpa budaya dan tidak ada budaya yang tumbuh dan berkembang tanpa masyarakat. Kebiasaan bercocok tanam padi yang mengandalkan air irigasi hanya ditemukan pada masyarakat agrikultur saja. Begitupun dengan kebiasaan transaksi secara *online* hanya diketemukan pada masyarakat yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih.

Masyarakat mengacuh kepada manusia-manusia yang tinggal di wilayah dan berbagai budaya yang didefinisikan secara bersama. Istilah masyarakat berasal dari kata latin *socius* yang berarti persahabatan. Manusia membutuhkan masyarakat untuk hidup, bekerja dan menikmati hidup. Masyarakat adalah kelompok individu-individu yang menghuni tempat yang sama dengan cara hidup yang sama sebagai hasil berinteraksi terus menerus secara teratur dan pada akhirnya melahirkan pola perilaku yang relatif sama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya hidup berdampingan, melainkan juga terus berinteraksi. Setiap orang membentuk tindakan dan perilaku dalam kaitannya dengan perilaku orang lain dengan siapa ia datang ke dalam kontak sosialnya.

Jika ada empat orang sosiolog yang sama-sama sedang melakukan penelitian tentang masyarakat dan budaya, maka bisa jadi sosiolog per-tama mungkin menganalisis *video* orang-orang dari dari masyarakat yang berbeda karena melakukan percakapan sehari-hari untuk mempelajari aturan percakapan yang sopan dari budaya dunia yang berbeda. Sosiolog

kedua mungkin mewawancarai sampel yang representatif dari orang-orang untuk melihat bagaimana SMS atau WA telah mengubah cara mereka berkomunikasi. Sosiolog ketiga mungkin mempelajari bagaimana migrasi menentukan cara di mana penyebaran bahasa dan berubah dari waktu ke waktu. Sosiolog keempat mungkin menjadi bagian dari sebuah tim berkembang tanda-tanda untuk memperingatkan orang-orang yang hidup ribuan tahun di masa depan, dan berbicara banyak Bahasa yang berbeda, untuk tinggal jauh dari limbah nuklir yang masih berbahaya.

Budaya adalah salah satu konsep yang paling penting dalam ilmu- ilmu sosial. studi tentang masyarakat manusia segera dan selalu membawa kita untuk mempelajari budayanya. Studi tentang masyarakat atau aspek itu menjadi tidak lengkap tanpa pemahaman yang tepat dari budaya masyarakat dan masyarakat pergi bersama-sama. Hal ini penting untuk membedakan antara konsep budaya dan masyarakat.

Kadang-kadang konsep digunakan secara sinonim berarti semua kebiasaan belajar total cara hidup kelompok sosial, atau warisan sosial suatu kelompok. Dalam penggunaan sosiologis, budaya khusus mengacu pada struktur sosial manusia, sementara masyarakat mengacu pada struktur sosial seberapa apa selain mendasari nilai-nilai dan ide-ide. Studi tentang masyarakat atau struktur sosial, suatu kelompok, di sisi lain, terutama berkaitan dengan pola-pola organisasi dan interaksi yang dibangun di atas latar belakang budaya. Meskipun budaya dan masyarakat adalah konsep erat terkait yang tidak pernah dapat sepenuhnya dipisahkan. Budaya adalah milik unik manusia. Setiap manusia dilahirkan ke dalam masyarakat adalah sam dengan mengatakan bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke dalam sebuah budaya. Setiap orang dapat dianggap sebagai wakil dari budaya. Budaya adalah kualitas yang unik dari semua yang memisahkan dari hewan yang lebih rendah. Seperti yang digunakan oleh sosiolog dan antropolog budaya, budaya memiliki arti yang berbeda pula.

Untuk seorang sosiolog budaya adalah sistem ide, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma, adat istiadat dan teknologi dimiliki oleh hamper semua orang dalam masyarakat tertentu. Budaya dapat dikatakan mencakup semua fenomena manusia dalam masyarakat. Budaya mencakup semua perilaku yang dipelajari, benda-benda dan teknologi yang diciptakan serta dipergunakan. Budaya adalah istilah yang sangat mapan yang mencakup dalam diri semua lapisan hidup manusia, mode perilaku,

filsuf dan etika, moral dan perilaku, kebiasaan dan tradisi, agama, ekonomi dan lainnya jenis kegiatan.

Bab 5
Kelompok Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

A. Kelompok Sosial

1. Pengertian kelompok sosial

Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya. Selanjutnya ciri kelompok sosial, yakni; (1) setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan; (2) ada hubungan timbal balik antara ang-gota yang satu dengan anggota yang lainnya; (3) ada suatu faktor yang di- miliki bersama, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, misal- nya: nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain; (4) berstruktur, berkaidah, dan mem- punyai pola perilaku; dan (5) bersistem dan berproses.

Selanjutnya kelompok sosial memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis yang melingkupi; (1) kelompok statistik, yaitu ke-lompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan ke- sadaran jenis di antaranya. Contoh: Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan; dan (2) kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompk yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubu- ngan sosial di antara anggotanya; (3) kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terukat dalam ikatan organisasi. Contoh: Kelom- pok pertemuan, kerabat; dan (4) kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Contoh: Negara dan sekolah.

2. Ciri-ciri kelompok sosial

Kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri dari atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Dalam proses pem-bentukan suatu kelompok sosial, terdapat beberapa ciri dasar dari suatu

kelompok. Adapun ciri dasar tersebut adalah sebagai berikut (Abdulsyani, 2012).

a. Terdiri atas paling sedikit dua orang dan dapat terus bertambah jumlah anggotanya. Dua orang ini haruslah orang yang dapat memberikan respons mental.
b. Tidak selalu terbentuk karena memenuhi persyaratan jumlah anggota-nya yang terpenting adalah di antara mereka terdapat saling interaksi dan komunikasi.
c. Komunikasi dan interaksi yang merupakan unsur pokok suatu kelom- pok harus bersifat timbal balik. Komunikasi satu arah tidak mem- bentuk interaksi dalam kelompok. Anggota-anggota kelompok harus saling memengaruhi satu sama lainnya.
d. Kelompok-kelompok tersebut dapat berlaku seumur hidup atau jangka panjang, tetapi dapat pula bersifat sementara atau jangka pendek. Kelompok-kelompok ini ada hanya selama adanya interaksi timbal balik.
e. Minat dan kepentingan bersama merupakan ciri utama pembentukan kelompok. Sekalipun demikian, dapat juga pembentukan kelompok tanpa adanya persamaan minat dan kepentingan.
f. Pembentukan kelompok berdasarkan situasi yang beragam yang dalam situasi itu manusia dituntut untuk bersatu.
g. Merupakan satu kesatuan dalam dirinya. Ia memiliki warna dan ciri sendiri yang berbeda dari lainnya, bahkan berbeda dengan anggota-anggotanya secara pribadi.

3. Syarat kelompok sosial

Kelompok sosial merupakan himpunan manusia atau kesatuan manusia yang hidup bersama melakukan hubungan. Melalui hubungan tersebut terdapat *symbiosis mutualisme,* saling memengaruhi, dan satu kesadaran untuk tolong-menolong. Kelompok sosial memeliki beberapa persyaratan berikut (Soekanto, S, 2013).

a. Kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan.
b. Hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut.
c. Faktor pengikat yang dimiliki Bersama oleh anggota kelompok, berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain sebagainya.
d. Struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama.

e. Bersistem dan berproses.

Dalam pandangan sosiolog Emile Durkheim (Razak, Y, 2008), membedakan antara kelompok yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan kelompok yang didasarkan pada solidaritas organik.

a. Kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik

Solidaritas mekanik merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Dalam masyarakat ini, kelompok manusia tinggal secara tersebar dan hidup terpisah satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerja sama dengan kelompok lain. Dalam kelompok ini yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap.

Masyarakatnya diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama memiliki tiga karakteristik mencakup keseluruhan, kepercayaan, perasaan kelompok dan bersifat memaksa. Kesadaran bersama dalam solidaritas mekanik menjaga persatuan, sedangkan hukumannya bertujuan agar kondisi yang tidak seimbang akibat perilaku menyimpang dapat pulih kembali.

b. Kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik

Solidaritas organik adalah bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang terperinci dan dipersatukan oleh saling bergantung antar-bagian. Pada masyarakat ini, ikatan yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif atau hati nurani, melainkan kesepakatan yang terjalin di antara berbagai kelompok profesi. Solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga saling memiliki ketergantungan, karena adanya sifat ini, ketiadaan salah satu unsur mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. Hukum yang menonjol bukan hukum pidana, melainkan ikatan hukum perdata dan bersifat *restitutif*.

c. Kelompok sosial yang didasarkan pada kelompok formal dan informal

Kelompok formal dan informal merupakan suatu gejala yang menarik perhatian banyak ilmuwan. Suatu gejala yang telah diamati oleh para ilmuwan sosial adalah bahwa organisasi formal sering terbentu oleh kelompok informal yang nilai dan normanya dapat bertentangan dengan nilai dan aturan yang berlaku dalam organisasi formal. Pada kalangan pelajar, misalnya sering terjalin ikatan kesetiakawanan yang bertentangan dengan aturan organisasi, misalnya kesetiakawanan dalam melakukan pe-

langgaran disiplin. Hubungan antar organisasi formal dan informal dapat pula kita jumpai dalam bidang pekerjaan. Pada satu pihak, kita dapat men- jumpai studi yang mengungkap bahwa hubungan persahabatan antara teman sekerja dapat memperlancar urusan kedinasan.

4. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok sosial

Penelaahan masyarakat manusia banyak berhubungan dengan kelompok sosial, baik yang kecil seperti kelompok keluarga maupun kelom- pok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa, dan lainnya. Pada prinsipnya, hampir semua manusia merupakan kelompok sosial yang dinamakan *keluarga.* Meskipun anggotanya menyebar, tetapi pada waktu tertentu mereka pasti akan berkumpul. Bilamana mereka berkumpul, terjadilah tukar-menukar pengalaman di antara mereka. Pada saat demikian, yang terjadi bukanlah pertukaran pengalaman semata, melainkan para anggota keluarga tersebut mungkin telah mengalami perubahan-perubahan, walaupun sama sekali tidak disadari. Saling tukar-menukar pengalaman memiliki peranan besar di dalam pembentukan kepribadian orang-orang yang bersangkutan. Saling tukar-menukar disebut sebagai *sosial experience.*

B. Ikatan Kelompok Sosial

Selanjutrnya kelompok sosial berdasarkan tipe ikatan kelompok sosial diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Paguyuban atau *gemeinschaft*

Paguyuban atau *gemeinschaft* adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Ciri-ciri kelompok paguyuban; (1) terdapat ikatan batin yang kuat antaranggota; dan (2) hubungan antar anggota bersifat informal. Kelompok sosial tipe paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*). Kelompok genealogis adalah kelompok yang terbentuk berdasar- kan hubungan sedarah. Kelompok genealogis memiliki tingkat solidaritas yang tinggi karena adanya keyakinan tentang kesamaan nenek moyang, Contoh: keluarga, kelompok kekerabatan. Selanjutnya Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*) komunitas adalah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan lokalitas. Contoh: beberapa keluarga yang ber- dekatan membentuk RT (Rukun Tetangga), dan selanjutnya sejumlah Rukun Tetangga membentuk RW (Rukun Warga). Contoh: Rukun

Tetangga, Rukun Warga. Paguyuban karena ideologi (*gemeinschaft of mind*). contoh: partai politik berdasarkan agama.

2. Patembayan atau *gesellschaft*

Patembayan atau *gesellschaft* adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Ciri-ciri kelompok patembayan; (1) hubungan antar anggota bersifat formal; (2) memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal; (3) memperhitungkan nilai guna (*utilitarian*); (4) lebih didasarkan pada kenyataan sosial, Contoh: ikatan antara pedagang, organiasi dalam suatu pabrik atau industri.

C. Faktor Pembentuk Kelompok Sosial

Tentunya dalam membentuk kelompok sosial tidak terlepas dari adanya faktor pembentuk kelompok itu sendiri, sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

1. Faktor kedekatan

Faktor kedekatan adalah pengaruh tingkat kedekatan, atau kedekatan geografis, terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuh-kan interaksi, yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan.

2. Faktor kesamaan

Faktor kesamaan adalah pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelejensi, atau karakter-karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga.

3. Norma pembentukan kelompok

Perilaku kelompok, sebagaimana semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok tersebut. Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, kegiatan dalam kelom- pok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki pandangan tentang perilaku yang dianggap pantas untuk dijalankan para anggotanya, dan norma-norma ini mengarahkan interaksi sosial.

Norma muncul melalui proses interaksi yang perlahan-lahan di antara anggota kelompok. Pada saat seseorang berperilaku tertentu, pihak lain menilai kepantasan atau ketidakpantasan perilaku tersebut, atau menyarankan perilaku alternatif (langsung atau tidak langsung). Norma terbentuk dari proses akumulatif interaksi kelompok. Jadi, Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, perlahan-lahan terbentuk norma, yaitu norma kelompok.

4. Proses pembentukan kelompok

Pada dasarnya, pembentukan kelompok diawali dengan adanya persepsi, perasaan, atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam proses selanjutnya, pembentukan kelompok didasarkan pada adanya hal-hal berikut ini (J.B.A.F. Mayor Polak, 1966).

a. Persepsi: pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan inteligensi yang dilihat berdasarkan pencapaian akademis. Misalnya, terdapat satu atau lebih anggota yang memiliki kemampuan intelek- tual, atau yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan anggota yang memiliki kelebihan ter- tentu dapat menginduksi anggota alinnya.
b. Motivasi: pembagian kekuatan yang berimbang akan motivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar dapat memotivasi diri untuk maju.
c. Tujuan: terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu.
d. Organisasi: pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat menyelesaikan secara lebih efisien dan efektif.

e. Independensi: kebebasan merupakan hal terpenting dalam proses dinamika kelompok. Dalam hal ini, kebebasan merupakan sesuatu yang dimiliki anggota kelompok untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Sekalipun demikian, kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang telah disepakati kelompok.
f. Interaksi: merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok oleh karena interaksi terjadi merupakan proses transfer ilmu yang dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut.

D. Pembentukan Norma Dalam Kelompok Sosial

Pembentukan norma dalam kelompok sosial tentunya tidak terlepas dari pengaruh perilaku kelompok dan norma kelompok, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Perilaku kelompok

Sebagaimana semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, kegiatan dalam kelompok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang dianggap pantas untuk dijalankan para anggotanya, dan norma-norma ini mengarahkan interaksi kelompok.

2. Norma kelompok

Muncul melalui proses interaksi yang perlahan-lahan di antara anggota kelompok. Pada saat seseorang berprilaku tertentu pihak lain menilai kepantasan atau ketidakpantasan perilaku tersebut, atau menyarankan perilaku alternatif (langsung atau tidak langsung). Norma terbentuk dari proses akumulatif interaksi kelompok. Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, perlahan-lahan akan terbentuk norma, yaitu norma kelompok.

E. Landasan, Faktor dan Teori Pembentukan Kelompok Sosial

1. Makna pembentukan kelompok sosial

Kelompok sosial merupakan bahasan penting yang berkaitan dengan *human science* karena secara esensial, hal tersebut tertanam secara fundamental dalam kehidupan manusia yang seolah-olah telah melekat dan tidak dapat dipisahkan. Kelompok sosial merupakan merupakan gejala alamiah dalam lingkaran kehidupan umat manusia. Hal ini dapat dilihat

dalam perjalanan sejarahnya, saat manusia saling memiliki keterkaitan dalam segi pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Dari sinilah, mereka terbentuk dalam sebuah kelompok sosial yang mengiringi perjalanan hidupnya.

Proses pengelompokan sosial dalam perjalanan sejarahnya terbentuk melalui faktor internal dan eksternal, yakni (Sunarto, K, 2004).

a. Kelompok sosial yang terbentuk melalui pengaruh faktor internal, lahir dari sebuah kesadaran individu dalam menciptakan sebuah kelompok dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi secara individual. Misalnya, kebutuhan pertahanan dari serangan lawan, dan lain sebagainya.
b. Pengelompokan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal lahir dari proses alamiah tanpa melibatkan kehendak pada awal pengelompokannya. Misalnya, seorang bayi yang dilahirkan dalam sebuah kelompok tertentu dan dinobatkan oleh mereka sebagai bagian dari kelompoknya.

2. Landasan terbentuknya kelompok sosial

Menurut Abdulsyani (2012), terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang senantiasa ingin hidup berdampingan. Manusia senantiasa hidup berkelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kelompok adalah kesatuan dari dua atau lebih individu yang mengalami interaksi psikologis satu sama lain. Manusia membutuhkan komunikasi dalam membentuk kelompok karena dengan komunikasi, manusia dapat mengadakan ikatan dan pengaruh psikologis secara timbal balik. Komunikasi dan interaksi ini selanjutnya mengakibatkan terbentuknya norma sosial. Hal ini dipengaruhi oleh dua dorongan, yaitu; (1) hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya; dan (2) hasrat untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya.

3. Faktor pembentukan kelompok sosial

Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan sesuatu yang murni dari diri sendiri maupun secara tidak sengaja. Misalnya, seseorang terlahir dalam keluarga tertentu. Ada juga yang merupakan sebuah pilihan. Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan.

a. Faktor kedekatan

Kedekatan geografis tempat tinggal. Pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah

kelompok tidak dapat diukur. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Dengan demikian, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Kedekatan geografis daerah asal. Ketika seseorang merantau ke suatu tempat dan bertemu dengan orang yang sama-sama merantau dan berasal dari daerah yang sama, orang tersebut merasa ada ikatan batin, meskipun semula belum saling mengenal ketika masih di daerah asal.

b. Faktor kesamaan

Pembentukan kelompok sosial tidak hanya bergantung pada kedekatan fisik, melainkan juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih senang berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Adapun faktor kesamaan yang dimaksud yakni; (1) kesamaan kepentingan dimana dengan adanya dasar utama kesamaan kepentingan, maka kelompok sosial bekerja sama demi mencapai kepentingan yang sama tersebut; (2) kesamaan keturunan dimana terbentuk atas dasar persamaan keturunan umumnya berorientasi menyambung tali persaudaraan; (3) kesamaan nasib dimana terbentuk kelompok sosial yang mewadahinya dalam meningkatkan taraf maupun kinerja masing-masing anggotanya.

4. Teori pembentukan kelompok

Secara sosiologis, beberapa teori yang dapat digunakan dalam pembentukan kelompok sosial, seperti berikut ini.

a. Teori kedekatan menjelaskan adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan ruang dan daerahnya.
b. Teori interaksi didasarkan pada aspek aktivitas, interaksi, dan sentimen (perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Adapun penjelasannya yakni; (1) semakin banyak aktivitas seseorang dengan orang lain, maka semakin beraneka interaksinya dan semakin kuat tumbuhnya sentimen mereka; (2) semakin banyak interaksi di-antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan kepada orang lain; dan (3) semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan kepada orang lain dan semakin banyak sentimen orang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak pula kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksinya.

c. Teori keseimbangan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain atas dasar kesamaan sikap (seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, dan otoritas) di dalam menanggapi suatu tujuan.
d. Teori pertukaran yang memiliki kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peranan di dalam teori ini. Secara praktis pembentukan kelompok dapat saja terjadi dengan alasan ekonomi, keamanan, atau alasan sosial. Para pekerja umumnya memiliki afiliasi dengan pihak lain.
e. Teori *practicalities* dapat dicontohkan dalam kasus karyawan suatu organisasi membentuk kelompok disebabkan alasan ekonomi, keamanan, atau alasan-alasan sosial lainnya.

Bab 6
Lembaga Sosial dan Pranata Sosial

A. Pengertian Lembaga Sosial

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah *social institution*, namun *social institution* juga diterjemahkan sebagai pranata sosial. Hal ini dikarenakan *social institution* merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ada pendapat lain mengemukakan bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakukan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pandangan Koentjaraningrat Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan tradisi sosiologi, lembaga merupakan suatu sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat dianggap penting. Sistem norma tersebut mencakup gagasan, aturan, tata cara kegiatan, dan ketentuan sanksi.

B. Fungsi Lembaga Sosial

Adapun lembaga sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menjaga keutuhan masyarakat.
2. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

C. Perkembangan Lembaga Sosial

Perkembangan lembaga sosial adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku.
2. Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar.Contoh: Dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus di-tetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli atau kah penjual.
3. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun demikian, tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan lembaga sosial karena untuk menjadi sebuah lembaga sosial sekumpulan norma mengalami proses yang panjang.

D. Tingkatan Norma dalam Lembaga Sosial

Terdapat tingkatan norma dalam lembaga sosial yang memiliki peran dalam proses pelembagaan itu sendiri, diuraikan berikut ini.

1. Cara (*usage*) yang menunjuk pada suatu perbuatan.
2. Cara bertingkah laku berlanjut dilakukan, sehingga menjadi suatu ke-biasaan (*folkways*), yaitu perbuatan yang selalu diulang dalam setiap usaha mencapai tujuan tertentu.
3. Apabila kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan di-kenakan sanksi.
4. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola ke-lakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Tata kelakuan se-macam ini disebut adat istiadat (*custom*). Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi yang lebih keras. Contoh, di Lampung suatu keaiban atau pantangan, apa-bila seorang gadis sengaja mendatangi pria idamannya karena rindu

yang tidak tertahan, akibatnya ia dapat dikucilkan dari hubungan bujang-gadis karena dianggap tidak suci.

Keberhasilan proses institusinalisasi dalam masyarakat dilihat jika norma-norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi terlembaga dalam masyarakat, akan tetapi menjadi terpatri dalam diri secara sukarela (*internalized*) dimana masyarakat dengan sendirinya ingin berkelakuan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

E. Ciri Umum, Karakteristik, dan Syarat Lembaga Sosial

Lembaga sosial umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama.

1. Ciri umum lembaga sosial diuraikan sebagai berikut.
   a. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelaku
   b. an, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional.
   c. Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan.
   d. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain-lain.
   e. Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama.
   f. Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambar tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan *badge* (lencana) untuk sekolah.

g. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.

2. Karakteristik lembaga sosial sebagai berikut.
   a. Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.
   b. Setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.
   c. Dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya.
   d. Ada saling ketergantungan antarlembaga sosial di masyarakat, perubahan lembaga sosial satu berakibat pada perubahan lembaga sosial yang lain.
   e. Meskipun antarlembaga sosial saling bergantung, masing-masing lembaga sosial disusun dan di- organisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang di-harapkan.
   f. Ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka ber-partisipasi.
   g. Suatu lembaga sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku.
   h. Setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu.
   i. Suatu lembaga sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.

3. Syarat lembaga sosial
   a. Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis.
   b. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas ber-sama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma ter-sebut.
   c. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan.
   d. Mempunyai perlengkapan dan peralatan.

e. Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama.

F. Peranan Lembaga Sosial

1. Lembaga keluarga

Keluarga adalah unit sosial dalam masyarakat dan institusi pertama yang dimasuki oleh seorang manusia.

a. Proses terbentuknya keluarga. Proses ini terbentuk melalui proses pernikahan yang sah menurut aturan pemerintah, agama, dan adat, yakni; (1) interaksi antara pria dan wanita; (2) interaksi dilakukan berulang-ulang dan menjadi hubungan sosial yang lebih intim, sehingga terjadi proses pernikahan; dan (3) setelah pernikahan, terbentuklah keturunan dan membentuk keluarga inti.
b. Karakteristik keluarga. Hal ini melingkupi; (1) merupakan hubungan pernikahan; (2) bentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan pernikahan yang dibina; (3) memiliki suatu sistem tata nama (*nomenclatur*) termasuk perhitungan garis keturunan; (4) memiliki fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggotanya; dan (5) merupakan tempat tinggal bersama, rumah dan rumah tangga.
c. Proses terbentuknya keluarga. Adapun beberapa tahapan dalam terbentuknya keluarga, yakni; (1) tahap formatif (*preneptual*) yang mana membentuk persiapan sebelum pernikahan, meliputi peminangan atau pertungan; (2) tahap perkawinan (*nuptial stage*) yaitu Ketika dilangsungkannya perkawinan dan sesudahnya, me- lainkan sebelum melahirkan anak-anak; (3) tahap pemeliharaan anak-anak (*child rearing stage*) yaitu keluarga dengan anak-anak hasil perkawinan; dan (4) tahap keluarga dewasa (*maturity stage*) yang mana keluarga dengan anak-anak yang telah mampu berdiri sendiri dan membentuk keluarga baru.

2. Lembaga Pendidikan

Pandangan Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2001), bahwa lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Dengan kata lain, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pem-

budayaan. Lembaga pendidikan juga termasuk tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dimana dalam lembaga pendidikan terdapat dua fungsi, yakni; (1) fungsi manifest lembaga pendidikan; dan (2) fungsi latent lembaga pendidikan.

a. Fungsi manifest lembaga pendidikan dibagi kedalam sembilan uraian, yakni (1) membantu orang untuk mencari nafkah; (2) menolong mengembangkan potensi demi pemenuhan kebutuhan hidupnya; (3) melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkannya dari generasi ke generesi berikutnya; (4) merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara dan mengembangkan cara berpikir rasional; (5) memperkaya kehidupan dengan cara menciptakan kemungkinan untuk berkembangnya cakrawala intelektual dan cinta rasa keindahan; (6) meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan pribadi dan berbagai kursus; (7) meningkatkan taraf kesehatan para pemuda bangsa melalui latihan dan olah raga; (8) menciptakan warga negara yang *patreotik* melalui pelajaran yang menggambarkan kejayaan bangsa; dan (9) membentuk kepribadian, dengan cara menyusun unsur dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu.
b. Fungsi latent lembaga pendidikan dibagi kedalam empat uraian, yakni; (1) mengurangi pengendalian orang tua, melalui pendidikan sekolah orangtua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah; (2) menyediakan sarana untuk menolak sesuatu, sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai yang bertolak belakang di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang suatu hal, misalnya Pendidikan seks dan sikap terbuka; (3) mempertahankan sikap kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat menyosialisasikan kepada para anak didiknya dalam menerima perbedaan *prestise, privelese,* dan status yang ada dalam masyarakat; dan (4) memperpanjang masa remaja, pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih bergantung secara ekonomi kepada orangtuanya.

3. Lembaga ekonomi

Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat.

a. Tipe sistem ekonomi di dunia yang dibagi kedalam empat golongan, yakni; (1) campuran adalah gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis; (2) komunis adalah dipimpin oleh partai tunggal; (3) masyarakat fasis adalah masyarakat yang dipimpin oleh suatu partai; dan (4) diktator yang diorganisasikan oleh seorang pimpinan yang karismatik.
b. Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi. Pada hakikatnya tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat. Adapun fungsi lembaga ekonomi dibagi kedalam sepuluh golongan, yakni; (1) memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan; (2) memberikan pedoman dalam melakukan pertukaran barang/ barter; (3) memberi pedoman tentang harga jual beli barang; (4) memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja; (5) memberikan pedoman tentang cara pengupahan; (6) memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja; (7) memberi identitas bagi masyarakat; (8) mengatur kehidupan sosial dan ekonomi; (9) tempat pertukaran bebas; dan (10) mengubah struktur sosial dan budaya.
c. Struktur lembaga ekonomi. Secara sederhana, lembaga ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yakni; (1) sektor agraris yang melingkupi sektor pertanian, seperti sawah, ladang, perikanan, dan peternakan, dan pengumpulan; (2) sektor industri ditandai dengan kegiatan produksi barang (*production*); dan (3) sektor perdagangan merupakan aktivitas penyaluran barang dari produsen kepada konsumen, *distributing,* yaitu proses pembagian barang dan komoditas pada subsistem lainnya.
d. Unsur Lembaga ekonomi yang diklasifikasikan kedalam lima golongan, yakni; (1) pola perilaku yaitu efisiensi, penghematan, profesionalisme, dan mencari keuntungan; (2) budaya simbolis yang mana termasuk merek dagang, hak paten, slogan, dan lagu komersial; (3) budaya manfaat yaitu took, pabrik, pasar, kantor,

blangko dan formal; (4) kode spesialisasi yaitu kontrak, lisensi, kontrak monopoli, dan akte Perusahaan; dan (5) ideologi yaitu liberalisme, tanggung jawab, manajerial, kebebasan beruaha, dan hak buruh.

e. Macam ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan pertukaran pasar.

4. Lembaga politik

Lembaga politik merupakan lembaga sosial yang mengatur hubungan kekuasaan warga masyarakat, sehingga keteraturan sosial dapat terpelihara. Lembaga politik memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur dan memberi sanksi kepada anggotanya yang menyimpang. Terbentuknya suatu lembaga politik dalam arti terbentuknya suatu bangsa (*nation*) dalam suatu negara adalah sebagai berikut.

a. Mengadakan kegiatan dan proyek yang dapat menjawab keinginan warga masyarakat.
b. Menekan persamaan nilai, norma atau sejarah melalui pengajaran di sekolah, media massa.
c. Membentuk Tentara Nasional dari suatu negara merdeka dengan partisipasi semua golongan yang ada dalam masyarakat.
d. Mengadakan upacara pada kesempatan tertentu.

Selanjutnya lembaga politik memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Menghubungkan antara kekuasaan dengan warga masyarakat, sehingga keteraturan tertib sosial terpelihara.
b. Menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi terciptanya keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentunya suatu lembaga memerlukan kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian, kehidupan politik tidak terlepas dari sistem pengaturan pembagian kekuasaan dan kewenangan. Pembagian kekuasaan dan kewenangan di negara Indonesia dibagi menjadi kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sebagai wujud nyata atau pelaksana dari kekuasaan, lembaga politik memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Melembagakan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh legislatif.
b. Melaksanakan undang-undang yang telah disetujui.

c. Menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masya-rakat berkaitan dengan kepentingan tertentu warga masyarakat yang bersangkutan.
d. Menyelenggarakan pelayanan, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan seterusnya.
e. Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain.
f. Memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan dalam menghadapi bahaya.

5. Lembaga agama

Lembaga keagamaan adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keagamaan masing-masing umat beragama.

a. Lembaga keagamaan. Setiap agama di Indonesia memiliki Lembaga keagamaan, yakni; (1) Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI); (2) Kriten yaitu Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI); (3) Katolik yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI); (4) Hindu yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI); dan (5) Buddha yaitu Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).
b. Fungsi lembaga keagamaan, yakni; (1) tempat membahas dan menyelesaikan segala masalah yang berkaitan dengan keagamaan; (2) memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama umat yang bersangkutan; (3) memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup antarumat yang bersangkutan; (4) mewakili umat dalam berdialog dan mengembangkan sikap saling menghormati serta kerja sama dengan umat beragama lain; (5) menyalurkan aspirasi umat kepada pemerintah dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah kepada umat; dan (6) wahana silaturrahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

Dalam mewujudkan keurukunan antarumat beragama, pemerintah mengadakan serangkaian kegiatan yang bermuara pada terbentuknya wadah musyawarah antarumat beragama pada tahun 1980. Melalui wadah tersebut, dialog-dialog antarumat beragama di Indonesia dapat terselenggara dengan baik, dengan harapan agar

kerukunan antarumat beragama dapat menciptakan keurukunan dan kesatuan bangsa serta dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Melalui wadah tersebut, umat beragama di Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati antara para pemeluk agama yang berbeda-beda. Pembentukan wadah musyawarah antarumat beragama didukung sepenuhnya oleh Lembaga keagamaan yang hidup di Indonesia.

Bab 7
Stratifikasi Sosial

A. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah Pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat). Merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara berjenjang. Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan didalam masyarakat, ada lapisan tinggi dan ada lapisan dibawah (Pitirim A Sorokin). Golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa ter-tentu dan menurut gengsi kemasyarakatan (Bouman & Max Weber).

1. Ukuran kekayaan adalah barang siapa memiliki kekayaan paling banyak termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, sebaliknya yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. *Indikatornya*: Bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaian, maupun kebiasaan dalam berbelanja.
2. Ukuran kekuasaan dan wewenang adalah individu yang mempunyai kekuasaan/wewenang paling besar menempati lapisan teratas dalam masyarakat. Ukuran kekuasaan tidak terlepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.
3. Ukuran kehormatan adalah ukuran kehormatan tidak terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakat. Ukuran kehormatan ini biasanya sangat terasa pada masyarakat tradisonal, Contohnya*:* orang-orang yang banyak berjasa pada masyarakat, para orang tua atau orang-orang yang berprilaku dan berbudi luhur.
4. Ukuran ilmu pengetahuan adalah ukuran ini sering digunakan oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi. Penguasaan ilmu pengetahuan ini dicirikan gelar akademik atau profesi yang disandang oleh seseorang. Contohnya: dr., Ir., Drs., M.Si., Dr., atau jabatan fungsional lainnya seperti Prof. Namun sering

timbul akibat negatif dari kondisi ini, jika gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya.

B. Dimensi Stratifikasi Sosial

1. Status stratifikasi sosial

   Dalam pengklasifikasian stratifikasi sosial tentunya ditentukan berdasarkan jenjang yang diperolehnya sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

   a. Status karena Warisan (*Ascribed Status*): status sosial yang didapat sejak lahir. Contohnya; jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain-lain.
   b. Status karena Pencapaian (*achieved status*): status sosial yang didapat sesorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contohnya: harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
   c. Status karena penugasan (*assigned status*): Status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan. Contohnya; kepala kampung, kepala RW/RT.

2. Jenis stratifikasi sosial

   Jenis stratifikasi sosial juga terdiri dari oleh dua, yakni stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

   a. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi dimana tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya: sistem kasta di India dan Bali serta di Jawa ada golongan darah biru dan golongan rakyat biasa.
   b. Stratifikasi sosial terbuka adalah sStratifikasi di mana anggota masyarakatnya dapat berpindah-pindah dari satu strata/ tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain. Contohnya; tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Seseorang yang tadinya miskin dan bodoh bisa merubah penampilan serta strata sosialnya menjadi lebih tinggi mengubah diri menjadi lebih baik dengan cara: sekolah, kuliah, kursus dan sebagainya.

3. Penyebab terjadinya stratifikasi sosial

Penyebab terjadinya stratftikasi sosial disebabkan oleh dua hal, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

a. Karena adanya sesuatu dimiliki oleh masyarakat yang dapat di-nilai atau dihargai. Bisa berupa: kepandaian, kekayaan, kekuasa- an, profesi, keaslian keanggotaan masyarakat dan lain sebagainya. Adanya perbedaan yang dimiliki tersebut menimbulkan strata yang berbeda-beda dalam masyarakat.
b. Karena adanya penghargaan terhadap jasa atau pengabdiannya se-seorang ditempatkan pada posisi yang tinggi. Misalnya: pahlawan, pelopor, penemu, dan lain sebagainya. Dapat juga karena keahlian dan keterampilan dalam pekerjaan tertentu menduduki posisi tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak mempunyai keterampilan.

4. Proses terjadinya stratifikasi sosial

Proses terjadinya stratifikasi sosial disebabkan oleh dua hal, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Terjadinya secara otomatis, karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir. Misalnya*:* kepandaian, usia, jenis kelamin, faktor keturunan, sifat keaslian keanggotaan seseorang dalam masyarakat.
b. Terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organi- sasi-organisasi formal. Misalnya: pemerintahan, partai politik, perusahaan, perkumpulan, dan angkatan bersenjata.

5. Kriteria dasar penentu stratifikasi sosial

Terdapat empat dasar utama dalam menentukan kriteria penentu dalam stratifikasi sosial, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

a. Faktor kekayaan adalah kekayaan atau sering juga disebut ukuran ekonomi. Orang yang memiliki harta benda berlimpah (kaya) akan lebih dihargai dan dihormati daripada orang yang miskin.
b. Faktor kekuasaan adalah kekuasaan dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar akan menempati lapisan sosial atas, sebaliknya orang yang tidak mempunyai kekuasaan berada di lapisan bawah.

c. Keturunan adalah ukuran keturunan tidak terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan berdasarkan golongan kebangsawanan atau kehormatan. Seperti gelar: Andi di masyarakat Bugis, Raden di masyarakat Jawa, Tengku di masyarakat Aceh, dan lain sebagainya.
d. Kepandaian/penguasaan ilmu pengetahuan adalah seseorang yang berpendidikan tinggi dan meraih gelar kesarjanaan atau yang memiliki keahlian/profesional dipandang berkedudukan lebih tinggi, jika dibandingkan orang berpendidikan rendah. Status seseorang juga ditentukan dalam penguasaan pengetahuan lain. Misalnya; pengetahuan agama, keterampilan khusus, kesaktian, dan lain sebagainya.

6. Fungsi Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai berikut.

a. Distribusi hak-hak istimewa yang obyektif. Seperti: menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, kekuasaan dan wewenang pada jabatan/pangkat/kedudukan.
b. Sistem pertanggaan (tingkatan) pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut *prestige* dan penghargaan. Misal-nya: seseorang menerima anugerah penghargaan/gelar/kebangsawanan, dan sebagainya.
c. Kriteria sistem pertentangan yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang atau kekuasaan.
d. Penentu lambang-lambang (simbol status) atau kedudukan. Seperti: tingkah laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah.
e. Tingkat mudah tidak bertukar kedudukan.
f. Alat solidaritas diantara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat.

C. Dasar Ukuran Stratifikasi Sosial

Selama dalam masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai, pelapisan sosial akan terjadi. Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial adalah ukuran kekayaan, kehormatan, kekuasaan, keturunan, dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Faktor kekayaan

Kekayaan atau materi dapat dijadikan sebagai ukuran penempatan status seseorang dalam lapisan masyarakat. Oleh karena itu, orang yang memiliki harta benda melimpah (kaya) akan lebih dihormati dan dihargai daripada orang miskin. Ukuran kekayaan ini dapat dilihat dari bentuk rumah modern, jenis pakaian yang digunakan, pemilikan sarana komunikasi dan transportasi, serta kebiasaan mengonsumsi barang-barang mewah.

2. Faktor kehormatan

Ukuran kehormatan mungkin saja terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat tradisional.

3. Faktor kekuasaan

Ukuran kekuasaan, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar, menempati lapisan atas. Kekuasaan dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar akan menempati lapisan sosial atas. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kekuasaan berada di lapisan bawah. Contoh, pimpinan perusahaan dengan karyawannya.

4. Faktor keturunan

Ukuran keturunan terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Keturunan berdasarkan golongan kebangsawanan atau kehormatan. Contoh, gelar Andi di masyarakat Bugis, Karaeng di masyarakat Makassar, Raden di masyarakat Jawa, dan Tengku di masyarakat Aceh. Semua gelar ini diperoleh berdasarkan kelahiran atau keturunan. Bilamana seseorang berasal dari keluarga bangsawan secara otomatis ia menempati lapisan atas berdasarkan keturunannya.

5. Faktor kepandaian atau ilmu pengetahuan

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran, digunakan oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadangkala menyebabkan terjadinya akibat-akibat negative. Hal ini karena bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, melainkan gelar kesarjana-an. Hal ini memacu segala bentuk usaha untuk mendapatkan gelar sekali- pun dengan cara yang tidak halal (Soekanto, 1997).

Kepandaian serta kemampuan mengusasi ilmu pengetahuan dapat pula menjadi dasar dalam pelapisan sosial. Seseorang yang berpendidikan

tinggi atau bergelar sarjana memiliki status yang lebih tinggi pula. Sebagaimana orang yang menguasai ilmu pengetahuan akan menempati posisi yang paling tinggi dalam sistem pelapisan masyarakat. Contoh, Doktor, Magister, Sarjana dan lain sebagainya.

D. Dampak, Pengaruh, dan Analisis dari Stratifikasi Sosial

1. Dampak Stratifikasi Sosial

Perbedaan stratifikasi sosial memberikan dampak cara menyapa, bahasa, dan gaya bicara. Gaya bicara orang kaya kepada orang miskin, atau orang berkuasa kepada bawahan akan berbeda cara berbicaranya. Begitu pula, penyebutan gelar, pangkat atau jabatan memberikan petunjuk mengenai status seseorang dalam masyarakat. Cara berpakaian pun merupakan salah satu dampak lain dari stratifikasi sosial. Selain menimbul- kan dampak tertentu, stratifikasi sosial juga diperlukan dalam suatu ling- kungan masyarakat. Melalui stratifikasi sosial, setiap masyarakat harus menempati individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, maka masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dalam mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya.

2. Pengaruh

Setiap bentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat (sistem lapisan sosial) memiliki konsekuensi. Adapun konsekuensi yang dimaksud akan dijelaskan berikut ini.

a. Munculnya kelas sosial. Stratifikasi sosial menggolongkan masyarakat dalam kelompok sosial yang berbeda. Kelompok sosial atas akan mengembangkan pola-pola tertentu dan sangat membatasi anggotanya agar berbeda dari kelompok lainnya. Sebaliknya, kelompok yang ada di bawah berusaha meniru kelompok sosial yang berada di atasnya. Kelompok yang berada di atas adalah kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, yaitu kelompok orang kaya. Mereka mengukur segala sesuatu dengan uang. *Prestise* atau gengsi menjadi bagian dari hidupnya. Mereka ingin menjadi kelompok yang dipandang tinggi, sehingga tidak segan menghamburkan uang demi menjaga gengsinya tersebut.
b. Kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan perbedaan jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Tentu saja, kesenjangan

sosial lebih didominasi oleh perbedaan tingkat ekonomi. Kelom- pok atas yang kaya, dengan kekayaannya akan semakin kuat untuk bertahan hidup. Sebaliknya, kelompok bawah yang miskin akan menjadi kelompok yang terpinggirkan.

c. Polarisasi kekuatan (*power*). Kondisi ini menjelaskan tentang pembagian suatu unsur menjadi dua bagian yang berlawanan, sedangkan *power* diartikan sebagai kekuatan. Jadi, secara bebas, polarisasi *power* dapat didefinisikan sebagai pembagian kekuatan. Dalam hal ini, pembagian masyarakat menjadi dua kelas yaitu kelas atas dan kelas bawah tidak lagi didasarkan hanya pada ke- hormatan, tetapi lebih pada unsur kepentingan dan kekuatan dari dua kelompok masyarakat tersebut saling berlawanan.

3. Analisis Mengenai Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial merupakan masalah yang pelik dalam hubungan sosialisasi masyarakat. Stratifikasi sosial sering menimbulkan konflik sosial. Bagaimana nasib masyarakat yang berada di kelas/lapisan bawah? Mereka terus menjadi masyarakat tertutup karena merasa rendah, sehingga perkembangan dalam kelompok tersebut sangat sulit terjadi.

Stratifikasi sosial ini memberikan fasilitas hidup tertentu (*life change*) dan membentuk gaya tingkah laku hidup (*life style*) bagi masing-masing anggotanya. Seseorang atau sekelompok masyarakat yang berada dilapisan atas dan memiliki status yang tinggi lebih mudah berkembang dan terbuka dalam hubungan sosialnya. Sulitnya memasuki lapangan atas dalam status sosial oleh masyarakat lapisan bawah juga merupakan masalah tersendiri yang sulit untuk dipecahkan. Kesulitan untuk berpindah lapisan sosial ini akan menimbulkan masalah dalam kelompok sosial, misalnya rasa tidak adil, merasa tidak mendapatkan hak yang semestinya ataupun kesenjangan sosial yang akhirnya akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Stratifikasi sosial akan selalu ditemukan dalam masyarakat selama dalam masyarakat tersebut terdapat sesuatu yang dihargai. Mungkin berupa uang atau benda-benda bernilai ekonomis, atau tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan agama, atau keturunan keluarga terhormat. Seseorang yang banyak memiliki sesuatu yang dihargai akan dianggap sebagai orang yang menduduki laipsan atas. Sebaliknya, mereka yang hanya sedikit memiliki atau bahkan sama sekali tidak memiliki sesuatu yang dihargai, dianggap sebagai orang-orang yang menempati lapisan

bawah atau berkedudukan rendah. Pelapisan sosial dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, seperti adanya perbedaan gaya hidup dan perilaku masyarakat terhadap orang-orang yang menduduki pelapisan tertentu. Stratifikasi sosial juga menyebabkan perbedaan sikap dari orang-orang yang berada dalam strata sosial tertentu berdasarkan kekuasaan, *privilege*, dan *prestise*.

Orang kaya akan ditempatkan pada lapisan atas dan sebaliknya orang yang miskin akan ditempatkan pada lapisan rendah. Mereka yang berpendidikan tinggi berada dilapisan atas, sedangkan yang tidak sekolah pada lapisan bawah. Dari perbedaan lapisan sosial ini terlihat adanya kesenjangan sosial. Hal ini tentu merupakan masalah sosial dalam masyarakat. Perbedaan sikap tersebut tercermin dari gaya hidup sesorang sesuai dengan strata sosialnya.

Pengaruh atau dampak stratifikasi sosial pada kehidupan masyarakat sangat besar dan berpengaruh. Hal ini dikarenakan kelas sosial yang ada akan menyediakan masyarakat dengan hal-hal yang mereka butuhkan. Stratifikasi sosial dalam masyarakat digambarkan mengerucut seperti poiramida. Kondisi disebabkan semakin tinggi kelas sosial, maka semakin sedikit pula jumlah yang menempatinya.

Adapun dampak stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat adalah dijelaskan berikut ini.

a. Ekslusivitas. Dalam kondisi ini, stratifikasi sosial yang membentuk lapisan sosial juga merupakan *subculture* yang telah menjadikan mereka lapisan-lapisan tertentu menunjukkan eksklusivitas masing-masing. Ekslusivitas dapat berupa gaya hidup, perilaku, dan kebiasaan mereka yang sering berbeda antara satu dengan lapisan yang lain. Gaya hidup dari lapisan atas cenderung memiliki perbedaan dengan gaya hidup lapisan menengah dan lapisan bawah. Demikian juga dengan perilaku masing-masing anggotanya dapat pula dibedakan, sehingga kita dapat mengetahui dari kalangan kelas sosial mana sesorang tersebut berasal. Ekslusivitas yang ada sering membatasi pergaulan antara kelas sosial tertentu. Orang yang berada pada lapisan atas enggan bergaul dengan orang yang berada dengan kelas sosial di bawahnya atau membatasi diri hanya bergaul dengan kelas yang sama dengan kelas mereka.

b. Etnosentrisme. Pada kondisi ini dipahami sebagai mengagungkan kelompok sendiri. Etnosentrisme dapat terjadi dalam stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Mereka yang ada dalam stratifikasi sosial atas akan menganggap dirinya sebagai kelompok yang paling baik dan menganggap rendah dan kurang bermartabat kepada mereka yang berada pada stratifikasi sosial rendah. Pola perilaku kelas sosial atas dianggap lebih berbudaya dibandingkan dengan kelas sosial di bawahnya. Sebaliknya, kelas sosial bawah akan memandang mereka sebagai orang boros dan konsumtif dan menganggap yang mereka lakukan kurang manusiawi dan tidak memiliki kesadaran dan solidaritas terhadap mereka yang menderita. Pemujaan terhadap kelas sosialnya masing-masing adalah wujud dari etnosentrisme.
c. Konflik sosial. Dalam kondisi ini perbedaan yang ada di antara kelas sosial dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Jika kesenjangan karena perbedaan tersebut tajam, terjadinya konflik sosial antara kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain semakin tajam pula. Sebagaimana yang digambarkan pada demonstran mahasiswa menuntut penurunan Uang Kuliah Tambahan (UKT) di perguruan tinggi mereka. Meskipun demikian, stratifikasi sosial juga memiliki dampak positif bagi masyarakat. Pengaruh positif dari stratifikasi sosial adalah orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena ada-nya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong orang untuk bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. Contohnya seorang anak miskin berusaha belajar dengan giat agar mendapatkan kekayaan pada masa depan. Mobilitas sosial tersebut akan lebih mempercepat Tingkat perubahan sosial masya-rakat kearah yang lebih baik.

Bab 8
Status Sosial, Peranan Sosial dan Organisasi Sosial

A. Pengertian Status Sosial

Status adalah Posisi seseorang di tengah masyarakat. Misalkan, di tengah sebuah kelompok mikro masyarakat yang disebut keluarga, ada sebuah status yang bernama Ayah atau Ibu. Status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajian yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah.

Secara empiris, perbedaan status mempengaruhi cara bersikap seseorang dalam berinteraksi sosial. Orang yang menduduki status tinggi mempunyai sikap berbeda dengan orang yang statusnya rendah. Contohnya, cara bersikap dan cara berbicara seorang pemilik perusahaan tentu berbeda dengan seorang karyawan rendah. Status seseorang menentukan perannya dan peran seseorang menentukan apa yang diperbuat (perilaku).

Status sosial (kedudukan) status sosial atau kedudukan merupakan posisi seseorang secara umum dimasyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulan, prestige, hak-hak, dan kewajibannya. Secara abstrak, status/kedudukan berarti tempat seseorang dalam satu pola tertentu. Bahkan seseorang bisa mempunyai beberapa status/kedudukan karena memiliki beberapa pola kehidupan. Contohnya, Mister X, mempunyai kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Ketua RT, Anggota Majelis Pengajian, dan ayah dari anak-anak-nya.

Adapun cara memperoleh status sosial adalah; (1) *Ascribed* status, merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status tersebut bisa diperoleh sejak lahir. Contoh, anak yang lahir dari keluarga bangsawan dengan sendirinya langsung memperoleh status bangsawan; (2) *Achieved* status, merupakan status yang diperoleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Status ini diperoleh atas dasar kemampuan individu dalam mencapai tujuan-tujuannya. Status ini bersifat terbuka bagi siapa saja.

Contoh, setiap orang bisa menjadi pengusaha sukses asalkan mempunyai kemampuan untuk mencapainya; dan (3) *Assigned* status, merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. *Assigned* status mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status, suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Status ini diberikan karena orang tersebut telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Contoh- nya, gelar pahlawan, siswa teladan, penghargaan kalpataru dan pemberian jasa lainnya.

B. Peranan Sosial

Peranan Sosial Peranan sosial merupakan aspek yang timbul dari status/kedudukan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki- nya. Status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena peranan selalu me- lekat sesuai dengan status yang diembannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, peranan menjadi penting karena berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang disekitarnya. Jika seseorang dalam waktu bersamaan mempunyai status yang harus dipilih sehingga mengakibatkan konflik status, maka dalam peranan pun demikian. Konfilk peranan adalah suatu peranan yang harus dilakukan seseorang dalam waktu bersamaan, dalam hal ini peranan-peranan yang terdapat dalam satu status. Contoh, Pak Lurah sedang menghadiri rapat penting dengan stafnya, pada waktu bersamaan di ujung desa ada konflik antar warga. Saat itu terjadi konflik peranan yang dialami pak lurah, apa- kah ia melanjutkan rapat penting tersebut ataukah melerai warga yang ber- tikai.

Selain melekat status sosial, pada diri seseorang melekat pula peran sosial. Tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai peran tertentu sesuai dengan status sosial yang disandangnya. Karena peran sosial merupakan dinamika dari status sosial. Peran sosial berisi tentang hak dan kewajiban dari status sosial. Peran memiliki fungsi mengatur perilaku individu yang berhubungan dengan status sosialnya. Status sosial yang berbeda menyebabkan terjadinya peran sosial yang berbeda pula. Peran sosial adalah suatu tingkah laku yang diharapkan dari individu sesuai dengan status sosial yang di-

sandangnya, sehingga peran dapat berfungsi pula untuk mengatur perilaku seseorang.

Peran sosial pada seseorang dapat berbeda-beda ketika ia menyandang status yang berbeda. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus berada di sebelah kanannya/samping luar. Peranan mencakup tiga hal; (1) Peran meliputi norma-norma, karena peran merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; (2) Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang; dan (3) Peran merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Bentuk peran sosial dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Pak Arda adalah orang yang berstatus sosial sebagai guru. Pada diri Pak Arda akan memiliki peran yang berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang dosen. Peran yang berbeda akan Pak Arda jalankan saat ia harus menyan-dang status sosial sebagai kepala keluarga. Ia harus mengatur bagaimana kehidupan di rumah yang berbeda dengan tata kehidupan di kampus. Jadi, pada diri seseorang dapat memiliki berbagai peran sosial yang berbeda- beda pada saat bersamaan. Contoh lainnya dalam suatu acara arisan keluarga, seseorang dapat sekaligus menyandang peran yang berbeda, yaitu sebagai ketua arisan, suami, ayah, paman, adik, kakek, dan se- bagainya.

C. Organisasi Sosial dalam Masyarakat

1. Konsep dasar organisasi sosial
   a. Pengertian organisasi sosial

      Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki fungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam Pembangunan bangsa dan negara. Sebagai mahluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Terdapat istilah yang seringkali digunakan, yaitu *sosial institution* dan Lembaga kemasyarakatan. Antroplog mengistilahkan- nya sebagai, *sosial institution* (penekanan sistem nilainya). Sementara

sosiolog, mengistilahkannya sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial (menekankan sistem norma yang memiliki bentuk dan yang abstrak).

Istilah lembaga sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang juga merupakan istilah asing *social institution.* Pada mulanya, lembaga sosial atau organisasi sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentukya Lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan, lalu memunculkan aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering juga dikatakan sebagai pranata sosial.

Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memnuhi kompleks kebutuhan secara khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial merupakan tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam sebuah wadah yang disebut dengan asosiasi. Asosiasi memiliki seperangkat aturan, tata tertib, anggota, dan tujuan yang jelas, sehingga berwujud konkret. Organisasi sosial adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat. Pengertian organisasi sosial adalah unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan Kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

b. Hakikat organisasi sosial

Keberadaan organisasi sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai merupakan sesuatu yang baik, di cita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Hal inilah awalnya Lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses *institutionalization* menghasilkan organisasi sosial.

c. Ciri-ciri organisasi sosial

Organisasi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1) Formalistik, menunjuk pada adanya perumusan tertulis dari peraturan,

2) Hierarki, menunjuk pada adanya pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut,
3) Besar dan kompleksnya, yaitu memiliki banyak anggota, sehingga impersonal, gejala ini biasanya dikenal sebagai gejala birokrasi,
4) Memiliki durasi waktu (*duration*), menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa organisasi sosial memiliki beberapa ciri lain yang berhubungan dengan keberadaan organisasi yaitu sebagai berikut.

1) Memiliki Batasan rumusan organisasi yang jelas. Organisasi akan mengutamakan pencapaian tujuan berdasarkan Keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan oprasional sebuah organisasi dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.
2) Memiliki identitas yang jelas. Organisasi cepat diakui oleh masyarakat sekelilingnya bilamana memiliki identitas yang jelas. Identitas berkaitan dengan informasi mengenai organisasi, tujuan pembentukan organisasi maupun tempat organisasi tersebut berdiri, dan lain sebagainya.
3) Memiliki keanggotaan formal, status dan peran. Setiap anggota-nya memiliki peran serta tugas masing-masing sesuai dengan Batasan yang telah disepakati bersama.

d. Alasan berorganisasi

Alasan individu untuk melakukan kegiatan organisasi adalah sebagai berikut.

1) Alasan sosial (*sosial reason*) manusia sebagai *zoon politicon* karena hidup secara berkelompok, maka manusia dianggap perlu untuk berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat kita temui pada organisasi yang memiliki sasaran intelektual, atau ekonomi.
2) Alasan materi (*material reason*), melalui bantuan organisasi, manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri, yakni; (1) memperbesar kemampuannya; (2)

menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi; dan (3) menarik manfaat dari pengetahuan generasi-genari sebelumnya yang telah dihimpun.

2. Teori dan sasaran organisasi
   a. Teori organisasi
   1) Teori aksi: Talcot Parsons

Strategi Talcot Parsons dalam menyusun teori berpegang teguh pada suatu posisi ontologis yang jelas, yaitu keadaan sosial memperlihatkan ciri-ciri secara sistematis yang harus dicakup oleh pengaturan konsep abstrak secara pararel. Hal yang lebih menonjol adalah asumsi-asumsi mengenai hakikat dunia sosial yang voluntaristik (Soerjono Soekanto, 1997), yakni; (1) teori aksi voluntaristic menyaji-kan sintesis asumsi-asumsi yang bermanfaat dan memiliki konsep utilitarianisme, positivisme, maupiun idealism bagi Parsons; dan (2) memiliki formulasi tertib sosial, menyajikan berbagai masalah bagi Parsons misalnya, apakah manusia senantiasa berperilaku rasional? Apakah mereka benar-benar bebas dan tidak diatur? Bagaimana ketertiban mungkin ada dalam sistem kompetitif yang tidak teratur?

Parsons mengesampingkan formulasi ekstrem para positivis radikal, yang cenderung memandang dunia sosial dalam kerangka hubungan sebab akibat yang dapat diamati di antara gejala-gejala fisik, sehingga tidak memperhitungkan fungsi simbolis jiwa manusia. Selanjutnya, Parsons berpendapat bahwa tekanan pada hubungan sebab akibat yang dapat diamati akan menuju pada reduksionisme tanpa batas, misalnya; (1) kelompok dijabarkan dalam hubungan sebab akibat anggota-anggotanya secara individu; dan (2) individu dijabarkan dalam hubungan sebab akibat proses fisiologis, sampai pada hal yang sekecil-kecilnya.

Aksi voluntarisme yang dikemukakan oleh Talcott Parsons mencakup unsur-unsur, yakni; (1) pelaku merupakan pribadi individual; (2) pelaku mencari tujuan-tujuan yang akan dicapai; (3) pelaku memiliki cara-cara untuk mencapai tujuan; (4) pelaku dihadapkan pada berbagai kondisi situasional; (5) pelaku dikuasi oleh nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan gagasan-gagasan lain yang memengaruhi penetapan tujuan dan pemilihan cara untuk mencapai tujuan; dan (6) aksi mencakup pengambilan Keputusan secara subjektif oleh pelaku untuk

memilih cara mencapai tujuan, yang dibatasi oleh berbagai gagasan dan kondisi situasional.

Sebagai sosiolog, Parsons mengakui bahwa pusat perhatiannya pada teori mencakup analisis sistem sosial. Empat belas tahun setelah terbit *The Structure of Sosial Action,* Parsons menulis *The Sosial System.* Dalam buku tersebut Parsons meyajikan perbedaan analitis antara sistem sosial kepribadian dan pola-pola kebudayaan. Karena sistem sosial menjadi pusat perhatian Parsons, ia menelaah masalah integrasi dalam sistem sosial dengan pola-pola kebudayaan.

Parsons memandang institusionalisasi sebagai proses dan struktur. Pada mulanya, ia membicarakan proses institusionalisasi dan hanya mengacu pada hal itu sebagai suatu struktur. Sebagai suatu proses, institusionalisasi dapat digolongkan dalam tipe-tipe tertentu dengan cara sebagai berikut.

a) Para pelaku dengan beragam orientasi memasuki situasi tempat mereka harus berinteraksi,
b) Cara pelaku berorientasi merupakan pencerminan dari struktur kebutuhannya dan cara struktur kebutuhan diubah oleh penjiwaan pola-pola kebudayaan,
c) Melalui proses interaksi tertentu, muncullah kaidah-kaidah pada saat pelaku saling menyesuaikan orientasi masing-masing,
d) Kaidah-kaidah itu timbul sebagai suatu cara saling menyesuiakan diri, dan membatasi pola-pola kebudayaan umum,
e) Selanjutnya kaidah-kaidah itu mengatur interaksi yang terjadi kemudian, sehingga tercipta keadaan stabil.

Pola-pola institusionalisasi tercipta, dipelihara, dan diubah. Apabila interaksi telah melembaga, dapat dikatakan terdapat suatu sistem sosial. Suatu sistem sosial tidak harus merupakan masyarakat yang menyeluruh sebab setiap pola interaksi yang diorganisasi baik secara mikro maupun makro merupakan suatu sistem sosial. Apabila pusat perhatian diarahkan pada masyarakat secara total atau bagian-bagiannya yang mencakup himpunan pola peranan yang terlembaga, Parsons menyebutnya sebagai subsistem. Parsons menyusun suatu sistem konseptual yang cukup rumit yang memberikan tekanan pada proses pelembagaan interaksi menjadi pola-pola mantap yang disebut sistem sosial, yang dipengaruhi oleh kepribadian dan dibatasi oleh kebudayaan.

Pola kedua sistem aksi yang sesungguhnya-kepribadian dan sosial merupakan pencerminan pola dominan orientasi nilai dalam kebudayaan. Tekanan secara implisit pada pengaruh pola-pola kebudayaan dalam mengatur dan mengendalikan sistem-sistem aksi lain- nya, menjadi semakin nyata dalam karya-karya Parsons selanjutnya. Setelah menyusun suatu kerangka analisis, Parsons kembali pada pertanyaan yang diajukannya dalam *The Structure of Sosial Action* yang menjadi patokan bagi semua formulasi teoretisnya, yaitu bagaimanakah sistem sosial bertahan? Secara tegas, mengapa pola- pola interaksi yang telah melembaga dapat bertahan? Jawaban atas pertanyaan itu adalah dengan jalan mengembangkan konsep tambahan yang menunjukkan bagaimaria sistem-sistem kepribadian dan kebuda- yaan terintegrasi dalam sistem sosial, sehingga menjamin kesatuan normatif dan keterikatan para pelaku untuk mematuhi kaidah-kaidah dan memainkan peranannya.

Bagaimanakah sistem kepribadian terintegrasikan dalam sistem sosial sehingga mempertahankan keserasian? Pada taraf yang paling abstrak, Parsons menyusun konsep dua mekanisme yang mengintegrasikan kepribadian dalam sistem sosial, yaitu mekanisme sosialisasi dan pengendalian sosial. Melalui pengoperasian kedua mekanisme itu, sistem kepribadian menjadi struktur, sehingga sepadan dengan struktur sistem sosial. Dalam pengertian abstraknya, Parsons memandang mekanisme sosialisasi sebagai sarana tempat pola kebudayaan nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, dan lambang lainnya yang diinternalisasikan ke dalam sistem kepribadian, sehingga mencakup struktur kebutuhannya. Melalui proses ini, para pelaku menyimpan energi motivasionalnya dalam peranan dan kepada para pelaku diberikan keterampilan untuk memainkan peran masing-masing.

Fungsi lain sosialisasi dan mekanismenya adalah menjamin kestabilitasan ikatan-ikatan antara pribadi yang menimbulkan berbagai tekanan. Mekanisme pengendalian sosial mencakup cara-cara yang kedudukan dan peranan diorganisasikan dalam system sosial untuk mengurangi tekanan dan penyimpangan. Kedua mekanisme tersebut dipandang sebagai unsur yang memecahkan salah satu masalah integratif yang dihadapi oleh sistem sosial. Masalah integratif lainnya yang dihadapi system sosial adalah bagaimana pola-pola kebudayaan berperan dalam memelihara tertib sosial dan keserasiannya? Parsons

menyatakan bahwa mekanisme sosialisasi dan pengendalian sosial tidak selalu berhasil, sehingga ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dan perbahan sosial.

2) Teori: Organisasi sosial (elemen budaya)

Organisasi sosial merupakan unit sosial yang beragam yang terkandung dalam suatu budaya. Institusi tersebut, antara lain keluarga, pemerintah, sekolah, dan suku bangsa yang berfungsi untuk mengatur kehidupan anggota suatu budaya. Sistem sosial ini menetapkan jaringan komunikasi dan mengatur norma pribadi, keluarga, dan tingkah laku sosial.

Suku Baduy pun memiliki sistem sosial yang dijadikan pedoman. Masyarakatnya mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional, yang mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perbenturan. Secara nasional, penduduk dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai *jaro pamarentah*, yang ada di bawah camat, sedangkan adat, Masyarakat Baduy tunduk pada pimpinan adat Baduy yang tertinggi, yaitu *puun*. Jabatan tersebut berlangsung turun-temurun, tetapi tidak otomatis dari bapak ke anak, tetapi dapat juga kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan *pun* tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut.

b. Sasaran organisasi

Organisasi yang didirikan tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai secara maksimal. Oleh karena itu, suatu organisasi menentukan sasaran pokok berdasarkan kriteria organisasi tertentu. Sasaran yang ingin dicapai organisasi sosial, pada umumnya adalah sebagai berikut:

1) Organisasi berorientasi pada pelayanan (*service organization*), yaitu organisasi yang berupaya memberikan pelayanan yang professional kepada anggotanya ataupun kepada kliennya. Selain itu, organisasi siap membantu orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari klien.
2) Organisasi yang berorientasi pada aspek ekonomi (*economic organization*), yaitu organisasi yang menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan pembayaran dalam bentuk tertentu.

3) Organisasi yang berorientasi pada aspek religious (*religious organizations*).
4) Organisasi-organisasi perlindungan (*protective organizations*).
5) Organisasi-organisasi pemerintah (*government organizations*).
6) Organisasi-organisasi sosial (*sosial organizations*).

3. Proses pembentukan organisasi sosial

Pada dasarnya, pembentukan kelompok dan organisasi sosial dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam proses selanjutnya didasarkan adanya hal-hal berikut:

a. Persepsi, yaitu pembagian kelompok didasarkan pada Tingkat kemampuan inteligensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya, terdapat satu atau lebih anggota berkemampuan intelek- tual, atau yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Dengan demikian, diharpakan anggota yang memiliki kelebihan tertentu mampu menginduksi anggota lainnya.
b. Motivasi, yaitu pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehag dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar dapat memotivasi diri untuk maju.
c. Tujuan, yaitu terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu.
d. Organisasi, yaitu pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efesien dan efektif.
e. Independensi, yaitu kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan di sini merupakan kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Meskipun demikian, kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok.
f. Interaksi, yaitu interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok karena dengan interaksi akan ada proses transfer ilmu yang dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut.

D. Mobilitas Sosial

1. Landasan Filosofis Mobilitas Sosial

Dalam pandangan sosiologi dikenal yang dinamakan dengan Mobilitas Sosial artinya adalah perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas sosial dapat mengacu pada individu maupun kelompok. Mobilitas individu misalnya perubahan status dari tukang menjadi dokter. Mobilitas kelompok misalnya mobilitas antargenerasi, yaitu antara orangtua dengan anaknya. Pandangan Paul. B. Horton, mobilitas sosial adalah Gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya.

Adapun bentuk mobilitas sosial adalah sebagai berikut.

a. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan dari satu kelompok ke kelompok lain yang sederajat. Misalnya guru matematika yang berpindah mengajar dari SMK ke SMA. Dapat disimpulkan bahwa pada diri guru matematika tersebut tidak ada perubahan status, dia tetaplah guru matematika pada sekolah yang sederajat.
b. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu strata ke strata lain yang tidak sederajat. Misalnya seorang dosen karena memenuhi persyaratan tertentu diangkat menjadi Rektor, disini ada perubahan status, yaitu dari hanya mengajar lalu harus memimpin institusi.
c. Mobilitas antar generasi adalah perpindahan strata dikarenakan peralihan generasi. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik atau turun dalam sebuah generasi. Misalnya ayah si Doel adalah supir oplet, namun si Doel berhasil meraih gelar Insinyur dan bekerja dengan pendapatan yang lebih dari cukup, sehingga keluarga si doel telah terjadi mobilitas.

Selanjutnya mobilitas sosial tidak dapat dilepaskan dari sifat sistem lapisan masyarakat yakni; (1) bersifat tertutup adalah membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain, baik ke atas atau ke bawah. Dalam sistem ini, cara untuk menjadi anggota suatu lapisan masyarakat adalah kelahiran. Contoh: Sistem kasta pada masyarakat India. Apharteid pada masyarakat di Afrika Selatan. Pemisahan warna kulit di Amerika Serikat; (2) bersifat

terbuka adalah dalam sistem terbuka setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik pada lapisan diatasnya.

2. Faktor Penghambat Mobilitas Sosial
   Adapun faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut.
   a. Perbedaan rasial dan agama contohnya adalah sistem kasta di India dan *apartheid* di Afrika Selatan.
   b. Kemiskinan merupakan dapat membatasi perkembangan, misalnya keluarga yang tidak menyekolahkan anaknya, maka tidak akan ada perubahan drastis di keluarga tersebut.
   c. Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat merupakan Perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan dan status sosial. Bagi wanita yang di desa dan masih sederhana pola pikir- nya, maka peran ibu rumah tangga yang hanya mengurus dapur, sumur dan kasur dianggap sudah cukup. Sehingga tidak terjadi mobilitas di dirinya.
3. Faktor yang Memengaruhi Mobilitas Sosial
   Mobilitas sosial tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam pengaruh sebagaimana dijelaskan berikut ini.
   a. Perubahan kondisi sosial merupakan kemajuan industri yang dapat merubah cara hidup individu yang semula bertani beralih menjadi buruh.
   b. Gerak populasi merupakan perkembangan kota menyebabkan terjadinya transmigrasi maupun urbanisasi.
   c. Komunikasi yang bebas merupakan Pendidikan dan komunikasi yang bebas akan memudarkan semua batas dari strata sosial yang ada dan merangsang mobilitas.
4. Bentuk Perubahan Sosial
   Bentuk perubahan sosial terdiri dari.
   a. Evolusi merupakan Perubahan yang terjadi secara lambat, Contohnya Masyarakat pemburu → masyarakat agraris → masyarakat industri.
   b. Revolusi merupakan Perubahan yang terjadi secara cepat. Contoh Alam penjajahan → kemerdekaan → demokrasi liberal → demokrasi terpimpin → Orde Baru → Orde Reformasi.
   c. Perubahan skala kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa

pengaruh langsung/berarti kepada masyarakat. Contoh; Perubahan pada Mode Pakaian.

d. Perubahan skala besar merupakan perubahan-perubahan yang ter- jadi dan membawa pengaruh besar kepada masyarakat. Contoh Perubahan pada dunia Industri (Pabrik), VALAS.
e. Perubahan yang dikehendaki merupakan (*intended change*/ direncanakan*/planned change*). Adanya perencanaan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki (*agent of change*) yang di- percaya oleh masyarakat. Agen ini dapat berupa individu ataupun kelompok. Contoh: Ir. Soekarno dan Moh. Hatta adalah agen individu yang mewakili kelompok dalam perubahan ke arah ke- merdekaan. Mahasiswa adalah agen dalam proses reformasi. Reformasi merupakan hal yang dikehendaki.
f. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan tidak dikehendaki (*unintended change/*tidak direncanakan*/unplanned change*). Per- ubahan diluar jangkauan masyarakat dan tidak dikehendaki. Hal ini tentu menimbulkan akibat sosial yang tidak dikehendaki. Contoh: Krisis Moneter ➔ Krisis Ekonomi ➔ Krisis Sosial ➔ Krisis Moral.

5. Faktor Pendorong dari Desa ke Kota
   Faktor pendorong dari desa ke kota melingkupi sebagai berikut.
   a. Semakin terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan.
   b. Tradisi-tradisi yang kadang-kadang dianggap sebagai beban bagi masyarakat desa.
   c. Lebih tingginya upah buruh di kota daripada di desa.
   d. Transportasi dari desa ke kota semakin lancar.
   e. Tingkat pendidikan masyarakat desa yang mulai berkembang.
6. Faktor Penarik dari Kota
   Faktor penarik ke kota melingkupi sebagai berikut.
   a. Kesempatan kerja yang lebih luas dan bervariasi.
   b. Tingkat upah yang lebih tinggi.
   c. Tersedianya barang-barang kebutuhan yang lebih lengkap.
   d. Kegiatan produksi untuk dijual belikan terpusat di kota.
   e. Layanan pemerintah.

Dari uraian tersebut tentunya memiliki dampak yang ditimbul- kan di desa melingkupi: (1) berkurangnya SDM; dan (2) sikap meniru cara/gaya kehidupan kota yang tidak tepat. Selanjutnya dampak yang

ditimbulkan di kota melingkupi; (1) kekurangan bahan pangan, tempat tinggal & pekerjaan; (2) pengangguran ➔ dapat menyebabkan kriminalitas; (3) munculnya sektor informal seperti PSK; dan (4) munculnya daerah "SLUM" (perumahan kumuh).

Bab 9
Kekuasaan dan Pengendalian Sosial

A. Pengertian Kekuasaaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari individu. Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Selain dari pada itu kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah/dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat Undang-Undang (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada Undang-Undang (objek dari kekuasaan).

Dalam memaknai kuasa (*power*) Foucault berbeda dengan para ahli sebelumnya. Selanjutnya, konsep kuasa dalam perspektif Foucault bukan-lah sebagai fitur material yang dikuasai dan digunakan oleh klas tertentu yang bertujuan menindas klas lain. Seperti yang dikemukakan dalam pe- mikiran Marxis, juga berbeda dengan pandangan Weberian bahwa kuasa sebagai kemampuan subjektif aktor untuk mendominasi aktor yang lain. Dalam pandangannya, Foucault tidak sejalan dengan pandangan Jhon Locke bahwa kuasa sebagai hasil dari kontrak sosial, bukan pula sebagai milik Lembaga negara yang cenderung represif dan otoriter seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Oleh karenanya, menurut Foucault (1980) kekuasaan menyebar di mana-mana (*power is omnipresent*).

Sehubungan dengan hal tersebut kekuasaan beroperasi secara terus-menerus dalam menciptakan pengetahuan. Sehubungan dengan itu, kekuasaan selalu beroperasi melalui nalar konstruksi pengetahuan, di mana keduanya bersinergi satu sama lain. Dalam Sejarah pengetahuan, tidak ada dikenal istilah seri dalam babakan peradaban yakni pengetahuan tanpa adanya kekuasaan, demikian juga sebaliknya, melainkan kekuasaan selalu bersemayam di pengetahuan. Lebih lanjut Foucault (1977) bermaksud melakukan penataan kembali atas konsep kekuasaan yang selama ini di-

pamahami sebagai miliki negara yang mutlak memerintah, melarang, dan memberikan pemaksaan.

Kekuasaan bukanlah hak Istimewa yang patut dipertahankan klas dominan, melainkan sebagai akibat dari keseluruhan posisi strategisnya. Dengan demikian bahwa kekuasaan-kekuasaan tidak dimiliki (*power is not possessed*) dengan maksud lain semata-maya terkonsetrasi di tangan individu atau struktur yang dominan, baik oleh negara, Perusahaan, maupun organisasi, melainkan kekuasaan meresap dalam seluruh jalinan relasi-relasi sosial (Foucault, 1977).

Selanjutnya dalam pandangan Foucault, kuasa bukanlah hal negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan sarana atau pemaksaan, melainkan mengalir dengan sendirinya di seluruh masyarakat dalam jaringan pentehuan. Dengan car aini, maka kekuasaan menjadi terd-esentralisasi dan terplurasi (Neal, 2009). Setiap kekuasaan pada dasarnya berusahan membentuk pengetahuannya sendiri, menciptakan rezim ke-benaran sendiri. Kekuasaan senantiasa dating dengan memproduksi suatu kebenaran, melalui makna kekuasaan begitu dimapankan, disusun, dan di-wujudkan serta dilestarikan. Oleh karenanya, dalam kontestasi wacana sangat penting menelusuri bagaimana strategi produksi wacana, pola kontestasi, dan strategi melestarikan wacana melalui reproduksi wacana dalam masyarakat.

B. Bentuk Umum Kekuasaan

Secara umum bentuk kekuasaan melingkupi dua hal sebagai berikut.

1. Kekuasaan pribadi merupakan kekuasaan yang didapat dari para peng-ikut dan didasarkan pada seberapa besar pengikut mengagumi, respek dan terikat pada pemimpin.
2. Kekuasaan posisi, kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Kekuasaan tidak begitu saja diperoleh individu.

Secara implisit diuraikan lima proposisi kekuasaan sebagai berikut; (1) kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan bahkan di-gunakan sebagai sesuatu yang digenggam, namun kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak; (2) relasi kekuasaan bukanlah datang dari bawah yang menunjukkan relasi struktural hierarkis yang menampilkan adanya posisi yang mengusasi dan yang dikuasai; (3) kekuasaan itu datang dari bawah yang menunjukkan tidak adanya hubu-

ngan linieritas oleh karena kekuasaan mencakup aspek hubungan timbal balik; (4) relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif; dan (5) Dimana ada kekuasaan maka di situ pula terdapat anti kekuasaan dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan.

Dalam memaknai jejaring kuasa dalam relasi sosial, maka akan diuraikan lima pendekatan, yakni; (1) mendesentralisasikan analisis terhadap kekuasaan dengan menolak model kekuasaan sentralistik yang bertujuan untuk melihat eksternalitas dari kekuasaan dan berbagai Teknik material sejauh mana akan di intervensi dalam kehidupan sosial; (2) mengidentifikasi kekuasaan secara eksternal dengan cara lebih mendekat pada kajian empiris, di mana lokasi yang bentuk-bentuk kekuatan (*power*) memiliki efek; (3) tidak menganggap kekuasaan sebagai komoditas yang dapat dimiliki, sebagai rezim antara yang kuat dan yang tidak memiliki kekuatan, melainkan dalam jaringan yang melibatkan individu sebagai subjek yang sekaligus objek kekuasaan; (4) tidak bekerja dari atas ke bawah (*top down*), melainkan dari bawah ke atas (*bottom up*); dan (5) tidak memulai dengan ideologi dan mengeksplorasi instrument apa yang akan digunakannya, melainkan dimulai melalui mekanisme dan praktik-praktik serta menjelajahi bagaimana actor membantu ideologi dan pengetahuan.

Dengan demikian terdapat empat uraian yang mendasari perihal konsep relasi kuasa, yakni; (1) kuasa bukanlah milik, melainkan strategi. Hal ini disebabkan kuasa tidak dimiliki, melainkan disimpan, tidak pula dibagi, ditambah, bahkan dikurangi, melainkan kuasa dipraktikkan dalam arena sosial dengan menggunakan strategi; (2) kuasa tidak dibatasi me- lainkan tersebar dimana-mana. Kuasa dalam arena kelompok kekuasaan dengan kelompok tertentu (pengusaha/investor) tidak memiliki batas pada domain actor belaka, melainkan masuk ke dalam sistem pemerintahan, politisi, begitu pula dengan masyarakat pemilih, melainkan kuasa ada disetiap lini kekuasaan hingga pada tahap pengambilan Keputusan/ kebijakan; (3) kuasa tidak bekerja secara represif, melainkan normalisasi dan regulasi; dan (4) kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif.

C. Sumber Kekuasaan

Sumber kekuasaan melingkupi sebagai berikut.

1. Kekuasaan menghargai (*reward power*) merupakan kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh

untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah (bonus sampai senioritas atau persahabatan).

2. Kekuasaan memaksa (*coercive power*) merupakan kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan (teguran sampai hukuman).
3. Kekuasaan sah (*legitimate power*) Kekuasaan formal yang diper-oleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu.
4. Kekuasaan keahlian (*expert power*) merupakan kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh memiliki keahlian relevan atau pengetahuan khusus yangttidak dimiliki oleh individu yang dipengaruhi (professio-nal atau tenaga ahli).
5. Kekuasaan rujukan (*referent power*) merupakan Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada indentifikasi.
6. Pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi (charisma, simpatik, keberanian dan lain sebagainya).

D. Pengendalian Sosial

1. Pengertian Pengendalian Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain. Dalam hidup bersama, tentu seorang manusia tidak dapat bertindak seenaknya. Norma meletakkan pedoman dasar bagaimana manusia memainkan perannya dan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya. Akan tetapi sering terjadi norma-norma itu tidak diindahkan. Terjadi berbagai penyimpangan sosial. Akibatnya, timbul kekacauan dalam masyarakat.

Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat. Pengendalian sosial adalah suatu

istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana yang mengajarkan, membujuk atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok. Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya membangkang.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Pengendalian sosial juga merupakan proses yang bertujuan agar masyarakat mematuhi norma dan nilai sosial yang ada dalam masyarakatnya. Dengan pengendalian sosial, terciptalah masyarakat yang teratur. Dalam masyarakat yang teratur, setiap warganya menjalankan peran sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Sifat Pengendalian Sosial

Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial dapat dikelompokkan dalam pengendalian sosial yang bersifat preventif dan pengendalian sosial yang bersifat represif, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Pengendalian sosial yang bersifat preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pelanggaran tidak terjadi. Pengendalian sosial yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan, sehingga terbentuklah kebiasaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, nasihat guru terhadap siswanya. Dalam nasihatnya itu, guru meminta siswa untuk selalu belajar dan membuat pekerjaan rumah, jika nasihat itu didengar dan dilaksanakan oleh siswa tersebut, siswa tersebut akan dapat menguasai pelajaran yang diberikan oleh guru itu. Perannya sebagai seorang pelajar juga dapat dilakukannya dengan baik.
b. Pengendalian sosial yang bersifat represif adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran itu terjadi. Pengendalian ini dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan sosial. Pengendalian sosial yang bersifat represif biasanya diikuti dengan penjatuhan

sanksi bagi pelaku penyimpangan sosial. Misalnya, seorang pelajar yang melanggar peraturan sekolah- Pelajar tersebut dikenai sanksi. Tujuannya agar ketertiban sekolah kembali terjaga.

3. Cara Pengendalian Sosial

   Ada dua cara pengendalian sosial di masyarakat yaitu:

   a. Pengendalian sosial dengan cara persuasif, yakni tidak dilakukan melalui kekerasan, tetapi melalui ajakan atau bimbingan supaya orang dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
   b. Pengendalian sosial dengan cara koersif, yakni menekankan kekerasan atau ancaman dengan kekuatan fisik, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya yang menyimpang.

4. Bentuk Pengendalian Sosial

   Terdapat bentuk pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

   a. Agama merupakan pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi penganutnya. Oleh karena itu, seseorang yang memeluk suatu agama dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan yang telah digariskan dalam ajaran agamanya. Jika seseorang meyakini dan patuh pada agamanya, maka dengan sendirinya perilakunya akan terkendali dari bentuk perilaku menyimpang. Setiap pemeluk agama yang taat akan mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, berjudi, korupsi, menfitnah, menjelek-jelekkan orang lain (menghujat), berzina, dan membunuh.
   b. Pendidikan merupakan pengendalian sosial yang telah melembaga baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pendidikan membimbing seseorang agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Seseorang yang berhasil di dunia pendidikan akan merasa kurang enak dan takut apabila melakukan perbuatan yang tidak pantas atau menyimpang. Contohnya, dalam menghadapi era globalisasi di mana persaingan bebas akan diikuti oleh masyarakat internasional, sudah selayaknya seseorang sebagai warga negara harus menyadari pentingnya pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai bekal dalam mengikuti kompetisi atau persaingan dengan bangsa lain.

c. Desas-desus atau gosip merupakan berita yang menyebar secara cepat baik melalui media massa maupun melalui mulut ke mulut. Desas-desus sering disebut dengan istilah kabar angin atau kabar burung. Kebenaran berita desas-desus masih diragukan karena tidak selalu desas-desus berdasarkan fakta atau kenyataan. Rasa malu yang ditimbulkan oleh desas-desus membuat pelaku penyimpangan sosial yang didesas-desuskan sadar akan perbuatannya. Dia pun kembali berperilaku sesuai dengan norma-norma masya-rakat. Dia pun akan bertindak lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya.
d. Teguran atau peringatan diberikan kepada orang yang melakukan penyimpangan agar pelaku penyimpangan sosial sesegera mungkin menyadari kesalahannya. Teguran dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Teguran dalam organisasi formal dilakukan secara bertahap. Biasanya teguran dilakukan sebanyak tiga kali secara tertulis. Jika teguran demi teguran tidak diindahkan, maka pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi disiplin.
e. Hukuman adalah sanksi negatif yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan tertulis atau tidak tertulis. Lembaga formal yang berwenang melakukan hukuman adalah pengadilan. Selain pengadilan, terdapat juga lembaga adat yang mempunyai wewenang memberikan hukuman. Tetapi, wewenang ini terbatas kepada masyarakat adatnya saja. Contoh, pelanggaran terhadap undang-undang, seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, korupsi, dan manipulasi. Sedangkan pelanggaran terhadap adat istiadat, antara lain kumpul kebo dan kawin lari.

Bab 10
Perubahan Sosial

A. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya perubahan sosial juga sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Pandangan Mc. Iver Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Pandangan Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dari pengertian-pengertian tersebut, bahwa dalam perubahan sosial yang berubah adalah struktur dan fungsi sosialnya. Contoh: perubahan dalam struktur adalah perubahan jumlah penduduk, perubahan status sosial, perubahan pelapisan sosial, sedangkan perubahan dalam fungsi sosial antara lain ayah di rumah dan ibu bekerja. Dari sini terjadi perubahan fungsi ayah dengan fungsi ibu.

Masyarakat berkembang laksana suatu roda; kadangkala naik ke atas, kadangkala turun ke bawah disebut sebagai perubahan sosial siklus. Dalam hal ini, pemikiran Max Weber yang dinilai mengandung pemikiran siklus ialah pembedaannya antara tiga jenis wewenang: kharismatik, rasional-legal dan tradisional. Weber melihat bahwa wewenang yang ada dalam masyarakat akan beralih-alih; wewenang kharismatik akan mengalami rutinisasi sehingga beralih menjadi wewenang tradisional atau regional-legal; kemudian akan muncul lagi wewenang kharismatik, yang diikuti dengan rutinisasi; dan seterusnya. Pada pihak lain, Weber pun melihat adanya perkembangan linear dalam masyarakat, yaitu semakin meningkatnya rasionalitas.

Pandangan-pandangan para tokoh sosiologi klasik tersebut sudah banyak yang ditinggalkan oleh para tokoh sosiologi modern. Teori tiga

tahap Comte tidak dianut lagi. Meskipun di kalangan tokoh sosiologi modern pun terdapat penganut pendekatan konflik, seperti misalnya Ralf Dahrendorf, namun mereka pun sudah meninggalkan banyak di antara pemikiran asli Marx. Adapun teori-teori moderen mengenai pandangan perubahan sosial, yakni; (1) teori modernisasi dimana negara-negara terbelakang akan menempuh jalan sama dengan negara industri maju di Barat sehingga kemudian akan menjadi negara berkembang pula melalui proses modernisasi; (2) teori ketergantungan dimana yang didasarkan pada pengalaman negara-negara Amerika Latin ini perkembangam dunia tidak merata; negara-negara industri menduduki posisi dominan sedangkan negara-negara Dunia ketiga secara ekonomis tergantung padanya. negara-negara dunia ketiga yang mengalami kolonialisme dan neo-kolonialisme, khususnya di Amerika Latin, tidak mengalami "tinggal landas" tetapi justru menjadi semakin terbelakang; (3) teori sistem dunia dimana Immanuel Wallerstrein ini perekonomian kapitalis dunia kini tersusun atas tiga jenjang: negara-negara inti, negara-negara semi-periferi dan negara-negara periferi.

B. Ruang Lingkup Perubahan Sosial

Ruang lingkup perubahan sosial meliputi bidang yang sangat luas. Dalam pandangan Selo Soemardjan bahwa segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap, dan perilaku diantara kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial meliputi bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan teknologi. Perilaku sosial dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok sosial, kelompok besar, maupun kelompok yang sangat besar. Dalam kondisi ini terdapat tiga pola yang memengaruhi perubahan sosial, yakni;

1. Pola linear adalah masyarakat yang sederhana menuju Masyarakat yang maju dengan pembagian kerja yang kompleks. Dalam pandangan Auguste Comte: kemajuan suatu peradaban mengikuti suatu pola yang pasti dan terjadi secara bertahap. Perubahan peradaban manusia melalui tiga tahap secara berjenjang; dimana masing-masing tahap memiliki tingkat pemikiran dan struktur sosial yang khas atau berbeda satu dengan yang lainnya.
    a. Hukum Tiga Tahap yakni Tahap Teologis dan Militer: Sampai Tahun 1300. Dimana semua konsepsi teoritik berlandaskan pada

kekuatan-kekuatan adikodrati terdapat pelbagai fenomena dipahami sebagai hal atau kejadian yang berasal dari dewa atau Tuhan, sehingga penelitian tidak berkembang karena ide adikodrati mendominasi pemikiran umat manusia. Aktor yang berperan pada tahap ini adalah para pendeta karena mereka dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kekuatan adikodrati; mereka berperan sebagai penafsir pelbagai fenomena alam dan sosial. Oleh sebab itu, kendati pun pemerintahan berada di tangan para panglima militer, kedudukan para pendeta sebagai pimpinan agama dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh para panglima militer. Hubungan sosial bersifat militeristik; tampak dengan jelas di mana suatu masyarakat senantiasa bertujuan menundukkan masyarakat lain. Institusi perbudakan merupakan salah satu institusi sosial yang dominan dalam tahap ini.

b. Tahap Metafisik dan Yuridis: Tahun 1300-1800. Pemahaman terhadap pelbagai fenomena tidak lagi didominasi oleh imajinasi kekuatan adikodrati, tapi oleh imajinasi metafisik yang bersandarkan pada adanya kekuatan abstrak di alam semesta. Dengan demikian, pengaruh pemikiran teologis meredup dalam masyarakat. Tahap ini merupakan tahap transisi menuju tahap positif. Hubungan sosial yang bersifat militeristik masih dominant yang ditandai oleh masih banyaknya konflik dan perang di Eropa. Namun hubungan bersifat industrialistik lambat laun berkembang dengan ditandai dengan bertambah banyaknya orang-orang yang bekerja di gilda- gilda dan mereka yang menekuni bidang maritim dan perdaga-ngan antar benua dengan menggunakan kapal-kapal layar yang besar.

c. Tahap Ilmu Pengetahuan dan Industri: Mulai 1800-seterusnya. Pemahaman terhadap pelbagai fenomena telah berdasarkan ilmu pengetahuan, dimana konsep-konsep bersifat positivistik dengan mengandalkan observasi terhadap obyek (secara empirik). Ilmu pengetahuan difungsikan untuk memecahkan pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan sumber-sumber alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Bahkan Sosiologi merupakan ilmu terapan yang diarahkan untuk memecahkan pelbagai masalah sosial. Hubungan sosial dalam masyarakat didominasi oleh budaya industri yang rasional dan berorientasi pada pening-

katan produktivitas. Tehnologi industri merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menghasilkan *mass products* agar dapat dinikmati oleh warga masyarakat melalui pasar. Pada tahap ini para ilmuwan dan industrialis sangat berperan dalam membangun masyarakat industri.

2. Pola siklus Pola Siklus: Masyarakat berkermbang laksana suatu roda, kadangkala naik ke atas, kadangkala turun ke bawah. Oswald Spengler: menyatakan bahwa kebudayaan tumbuh, berkembang dan pudar laksana siklus gelombang yang muncul mendadak, berkembang dalam barisan-barisan gelombang yang rapi, dan kemudian lenyap; atau laksana tahap-tahap perkembangan seorang manusia dari masa anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya punah. Acuan Spengler dalam pola siklus adalah kebudayaan besar yang telah dianggapnya punah, seperti: Yunani, Romawi, dan Mesir. Pandangan Spengler di dalam bukunya yang berjudul *The Decline of the West* bahwa kebudayaan Barat pun akan mengalami kepunahan. Pandangan Vilfredo Pareto: Menyatakan bahwa sejarah merupakan kuburan para aristokrasi, perubahan sosial disebabkan oleh adanya sirkulasi elite, aristok-rasi bertahan dalam jangka waktu tertentu saja oleh karena akan ditumbangkan oleh aristokrasi baru yang berasal dari lapisan bawah me-lalui jalan kekerasan atau revolusi. Masyarakat secara hirarkis terdiri dari dua lapisan sosial yakni Elite dan lapisan bawah (non elite). Elite terdiri dari Elite yang berkuasa dan Elite yang tidak berkuasa.
3. Pola gabungan (linear dan siklus) menurut pandangan Etzioni dan Halevy bahwa beberapa teori perubahan sosial menunjukkan adanya perpaduan antara Pola Linear dan Pola Siklus. Karl Marx: menyatakan bahwa *The history of all hitherto existing society is the history of class struggles*.

C. Teori Moderen Mendukung Perubahan Sosial

Dalam pembahasan ini, adapun teori modern yang mendukung dalam terjadinya perubahan sosial dijelaskan sebagai berikut.

1. Teori Modernisasi: beranggapan bahwa perkembangan masyarakat Dunia Ketiga akan menempuh jalan yang sama seperti masyarakat industri maju—yakni terjadi secara evolusioner dan linear yang bergerak dari masyarakat yang sederhana (tradisi) menuju masyarakat yang kompleks dan maju (modernitas). Etzioni dan Halevy menyata-

kan transisi dari keadaan tradisional menjadi modernitas ditandai; (1) revolusi demografi yang ditunjukkan menurunnya angka kematian dan angka kelahiran; (2) menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga; (3) terbukanya sistim stratifikasi sosial; (4) menurunnya pengaruh agama; (5) munculnya budaya massa (pendidikan dan komunikasi); (6) munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi; dan (7) peralihan dari struktur feodal atau kesukuan ke struktur sosial yang birokratik

2. Teori Ketergantungan (*dependencia*): beranggapan bahwa karena perkembangan negara-negara Dunia Ketiga bergantung pada negara-negara Industri yang lebih maju dan dominan dalam hubungan eko-nomi, maka yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi yang menyolok dimana negara-negara Industri akan bertambah maju dan kaya sedangkan negara-negara Dunia Ketiga justru semakin terbelakang karena gagal untuk tinggal landas.
3. Teori Sistem Dunia: dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein bahwa perekonomian kapitalis Dunia tersusun secara hirarkis atas tiga jenjang: negara-negara inti yang terdiri dari negara-negara Eropa Barat, AS, dan Jepang yang mendominasi perekonomian Dunia. Negara-negara semi-periferi di Eropa Selatan yang melakukan hubungan ekonomi baik ke negara-negara inti maupun ke negara-negara periferi yang berada di Asia dan Afrika yang dieksploitasi sumber alamnya dan perekonomiannya. Akibatnya terjadi kesenjangan ekonomi yang lebar negara-negara periferi tidak mungkin menyusul perkembangan ekonomi negara-negara semi-periferi dan inti.

D. Proses Perubahan Sosial

1. Tahap perubahan sosial

Beberapa fase reorganisasi berkaitan dengan proses penyesuaian nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat, antara lain.

a. Kegelisahan dan ketidakpuasan sebagai penduduk (umumnya kaum terpelajar).
b. *Popular-stage* atau tersebarnya ide-ide perubahan.
c. Program perencanaan pembangunan secara sistematis.
d. Sistematika dalam pelaksanaan perencanaan (*formal stage*).
e. Badan yang menyalurkan stimulasi pembangunan terencana dengan akibat bahwa pendapat diterima (*institution stage*).

f. Kompromi pelaksanaan bahan penolakan maupun bahan penerimaan sepenuhnya.
g. Adanya perencanaan sosial atau organisasi sosial sebagai hasil penelitian.

2. Alternatif arah perubahan sosial

Fase perubahan sosial dalam masyarakat menghasilkan tiga alternatif arah perubahan sosial, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Bergerak ke arah baru dengan landasan pola perilaku dan nilai lama.
b. Bergerak menuju pada bentuk semi atau pertengahan antara nilai-nilai.
c. Bergerak ke arah suatu pola perilaku dan nilai yang baru.

3. Ciri-ciri perubahan sosial

Proses terbentuknya perubahan sosial dapat diketahui dari ciri- ciri berikut ini.

a. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat atau pun lambat.
b. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga sosial lainnya karena Lembaga-lembaga tersebut memiliki sifat interdependensi. Dengan demikian, sulit sekali mengisolasi perubahan-perubahan hanya pada lembaga-lembaga sosial tertentu karena proses yang dimulai dan proses yang selanjutnya merupakan suatu mata rantai.
c. Menyebabkan organisasi yang sifatnya sementara dalam proses penyesuaian. Disorganisasi tersebit akan diikuti oleh suatu organisasi yang mencakup pemantapan dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru.
d. Tidak dapat dibatasi hanya pada bidang kebendaan atau bidang spiritual, sehingga keduanya memiliki kaitan timbal balik.
e. Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan, yakni; (1) proses sosial adalah hubungan timbal balik antara segi kehidupan bersama, misalnya antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik, kehidupan hukum dengan kehidupan agama, dan sebagainya; (2) segmentasi adalah pembagian struktur sosial dalam beberapa segmen atau bagian tertentu sesuai dengan kriteria yang dimaksud; (3) perubahan struktur adalah perubahan yang terjadi

dalam sebuah susunan yang berupa jalinan antara unsur sosial yang utama, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial; dan (4) perubahan pada struktur kelompok adalah perubahan yang terjadi pada struktur kelompok sosial, misalnya perubahan organisasi sosial.

4. Bentuk perubahan sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk seperti berikut ini.

a. Perubahan evolusi.

Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dalam waktu yang cukup lama tanpa kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan tersebut mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.

b. Perubahan revolusi

Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlansung sangat cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis, perubahan revolusi merupakan perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Perubahan revolusi sering diawali oleh ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan yang sangat sulit untuk dihindari dan tidak dapat dikendalikan, sehingga menjelma menjadi tinda- kan revolusi.

c. Perubahan terencana

Perubahan terencana adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan oleh pihak-pihak yang mengadakan sutau perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakn agen perubahan, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Perubahan yang terencana, selalu berada di bawah kendali atau pengawasan dari agen perubahan tersebut.

Pelaksanaan rencana perubahan tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu, melainkan dapat juga

diarahkan pada perubahan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain dan dalam tubuh masyarakat yang lain pula. Perubahan terencana, paling ideal dilakukan pada masyarakat yang memiliki keinginan untuk mendapatkan perubahan, melainkan tidak mampu mengimplementasikannya. Perubahan terencana yang didahului oleh pengamatan tentang kehendak dan harapan masyarakat dapat pula merupakan rencana perubahan hasil-hasil perubahan sebelumnya yang tidak menguntungkan pihak masyarakat.

d. Perubahan tidak terencana

Perubahan tidak terencana adalah perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki biasanyan lebih banyak menimbulkan pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota masyarakat sulit diarahkan untuk melakukan perubahan, sebagai akibat kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan karena pengalaman buruk mereka terhadap akibat perubahan yang terjadi sebelumnya yang tidak membuahkan kesejahteraan dan kepuasan, atau karena masyarakat masih memiliki kepercayaan yang sangat terhadap kasakralan dan keampuhan lembaga sosial atau tradisi sosial yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

E. Dampak Perubahan Sosial

1. Dampak bagi kehidupan sosial

Dampak perubahan sosial yang menimbulkan ketidakpuasan, penyimpangan masyarakat, ketertinggalan, atau ketidaktahuan dengan adanya perubahan, yaitu sebagai berikut.

a. Perubahan yang diterima oleh masyarakat kadangkala tidak sesuai dengan keinginan. Hal ini disebabkan setiap orang memiliki gagasan mengenai perubahan yang mereka anggap baik, sehingga perubahan yang terjadi dapat ditafsirkan bermacam-macam, sesuai dengan nilai-nilai sosial yang mereka miliki.
b. Perubahan mengancam kepentingan pihak yang sudah mapan. Hak istimewa yang diterima dari masyarakat berkurang atau menghilang, sehingga perubahan dianggap akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Untuk mencegahnya, setiap perubahan

harus dihindari dan ditentang karena tidak sesuai dengan kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

c. Perubahan dianggap sebagai suatu kemajuan, sehingga setiap perubahan harus diikuti tanpa dilihat untung ruginya bagi kehidupan. Perubahan juga dianggap membawa nilai-nilai baru yang moderen.
d. Ketidaktahuan pada perubahan yang terjadi, sehingga seseorang tertinggal informasi tentang perkembangan zaman.
e. Masa bodoh terhadap perubahan karena perubahan sosial yang ter- jadi tidak menimbulkan pengaruh bagi dirinya.
f. Ketidaksiapan menghadapi perubahan, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

2. Masalah yang muncul dari perubahan sosial

Perubahan sosial mengakibatkan masalah-masalah sosial, seperti kejahatan atau kenakalan remaja. Sekalipun demikian, tidak setiap masalah yang terjadi pada masyarakat disebut masalah sosial. Adapun kriteria masalah sosial yang dapat disebutkan sebagai berikut.

a. Tidak ada kesesuaian antara ukuran dan nilai sosial dengan kenyataan, serta tindakan sosial.
b. Pihak-pihak yang menentukan apakah suatu kepincangan merupakan masalah-masalah sosial atau tidak, urutannya sangat relatif.
c. Timbul akibat terjadinya kepincangan masyarakat karena ketidaksesuaian tindakan dan norma-norma serta nilai-nilai masyarakat. Akibat hal tersebut, masyarakat tidak menyukai tindakan-tindakan yang menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang berlaku.
d. Merupakan proses terjadinya ketidaksesuaian antar unsur-unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok-kelompok sosial. Dengan kata lain, masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial atau rusaknya ikatan sosial.

F. Modernisasi Bagian dari Perubahan Sosial

1. Pemaknaan modernisasi sebagai bentuk perubahan sosial

Pada dasarnya, semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senantiasa terlibat dalam proses modernisasi, meskipun kecepatan dan arah perubahannya berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dan kekeliruan dalam menafsirkan istilah modernisasi, berikut ini.

a. Schoorl (1991), mendefinisikan modernisasi sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada aktivitas, semua bidang kehidupan, atau aspek-aspek masyarakat.
b. Soerjono Soekanto, mendefinisikan modernisasi sebagai suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah (*directed change*) yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan *sosial change*.
c. Astrid Susanto (1985), mendefinisikan modernisasi sebagai proses pembangunan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan.
d. Abdulsyani (2012), mendefinisikasi modernisasi sebagai proses perubahan dari cara-cara tradisional ke dalam cara-cara yang lebih maju, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dari berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya modernisasi yakni; (1) perubahan sosial yang terarah; (2) proses perubahan dari cara tradisional ke cara-cara yang lebih maju;
(3) penyerapan kepada semua kehidupan manusia. Pada dasarnya pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra-moderen dalam arti teknologi serta organisasi sosial, kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil.

Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas, sehingga batasnya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Misalnya, pada suatu daerah tertentu, modernisasi mencakup pemberantasan buta huruf, pada tempat lainnya modernisasi mencakup usaha-usaha penyemprotan rawa-rawa dengan DDT untuk mengurangi sumber-sumber penyakit malaria. Karakteristik umum modernisasi yang berkaitan dengan aspek-aspek sosio-demokrafis digamnarkan dengan istilah

gerak sosial (*sosial mobility*). Artinya, suatu unsur-unsur sosial eko- nomis dan psikologis mulai menunjukkan peluang kea rah pola baru melalui sosialisasi dan pola perilaku. Perwujudannya adalah aspek- aspek kehidupan moderen, seperti mekanisme, media masssa yang teratur, urbanisasi, peningkatan pendapatan perkapita, dan sebagainya.

Modernisasi adalah bentuk perubahan sosial. Umumnya merupakan perubahan terarah (*directed change*) yang didasarkan pada perencanaan yang dinamakan *sosial planning.* Modernisasi kadang-kadang merupakan persoalan yang harus dihadapi masyarakat karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang sangat luas, menyangkut proses disorganisasi, problema sosial, konflik antarkelompok, hambatan terhadap perubahan, dan sebagainya.

2. Proses dan indikator modernisasi

Proses modernisasi itu sangat luas, bahkan tidak dapat dibatasi ruang dan masalahnya, misalnya aspek sosial, ekonomi, politik budaya, pertanian, dan seterusnya. Secara historis, modernisasi merupakan perubahan masyarakat yang bergera dari masyarakat tradisional atau dari masyarakat pramoderen menuju masyarakat modern. Rostow (Abraham, M. Francis, 1991), menyebut pergerakan masyarakat dalam lima tahap sebagai berikut.

a. Tahap masyarakat tradisional (*the traditional society*), dengan indikator berikut;
   1) Pertanian pada tenaga kerja;
   2) Belum negenal ilmu pengetahuan dan teknologi (era Newton);
   3) Ekonomi mata pencaharian;
   4) Hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan; dan
   5) Adanya sistem barter.
b. Tahap pembentukan prasyarat tinggal landas (*the preconditions for take off*), dengan indicator berikut ini;
   1) Pendirian industri-industri pertambangan;
   2) Peningkatan penggunaan modal dalam pertanian;
   3) Perlunya pendanaan asing;
   4) Tabungan dan investasi meningkat;
   5) Terdapat Lembaga dan organisasi tingkat nasional;
   6) Adanya elite-elite baru; dan
   7) Perubahan sering dipicu oleh gangguan dari luar.

c. Tahap tinggal landas (*the takeoff*), dengan indikator berikut ini.
   1) Industrialisasi meningkat;
   2) Tabungan dan investasi semakin meningkat;
   3) Peningkatan pertumbuhan regional;
   4) Tenaga kerja di sektor pertanian menurun;
   5) Stimulus ekonomi berupa revolusi politik;
   6) Inovasi teknologi;
   7) Perubahan ekonomi internasional;
   8) Laju investasi dan Tabungan meningkat 5-10% dari pendapatan nasional;
   9) Sektor usaha pengolahan (manufaktur); dan
   10) Pengaturan kelembagaan.

d. Tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi (*the drive to maturity*), dengan beberapa indikator berikut ini.
   1) Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
   2) Diversifikasi industri;
   3) Penggunaan teknologi secara meluas;
   4) Pembangunan di sektor-sektor baru; dan
   5) Investasi dan tabungan meningkat 10-20% dari pendapatan nasional

e. Tahap era-konsumsi massal tingkat tinggi (*the age of high mass-consumption*), dengan indikator berikut.
   1) Proporsi ketenagakerjaan yang tinggi di bidang jasa;
   2) Meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa; dan
   3) Peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran.

Proses perubahan tersebut didorong oleh berbagai usaha masyarakat dalam memperjuangkan harapan dan cita-citanya, yaitu perbaikan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik.

3. Pengaruh modernisasi dan globalisasi

   Pengaruh modernisasi yang positif adalah sebagai berikut.
   a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja manusia sebagai akibat bertambahnya pengetahuan, peralatan yang secanggih, dan jarak komunikasi manusia di dunia;
   b. Meningkatkan produktivitas kerja manusia;
   c. Meningkatnya volume ekspor;
   d. Tersedianya berbagai macam barang konsumsi;

e. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. Meluasnya lapangan pekerjaan; dan
g. Munculnya profesionalisme dan spesialisasi ketenagakerjaan.

Adapun pengaruh positif globalisasi adalah sebagai berikut.

a. Lancarnya komunikasi antarindividu ataupun antarkelompok dalam ruang lingkup dunia; dan
b. Lancarnya proses transaksi ekonomi antarnegara maupun antarbenua.

Pengaruh negatif modernisasi yang sering Nampak sebagai munculnya peralatan-peralatan baru dan sistem-sistem berpikir yang rasional telah menimbulkan dampak negatif yang diuraikan berikut ini.

a. Perusakan alam dan pencemaran lingkunga;
b. Sikap konsumerisme;
c. Penurunan kualitas moral manusia (*demoralisme*);
d. Keresahan sosial;
e. Menurunnya kemandirian dalam menghadapi masalah; dan
f. Meningkatnya sikap egois dan materialis.

4. Dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat

Memperlajari modernisasi dan gejalanya yang terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, sebagai suatu gejala umum yang dewasa ini terjadi di masyarakat. Modernisasi dapat dipastikan akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif.

a. Memperkuat integrasi dalam masyarakat

Ciri manusia yang moderen adalah memiliki sikap yang terbuka terhadap segala bentuk pengalaman dan perubahan. Sikap ini, akan memperlancar proses komunikasi dan interaksi antarindividu dalam masyarakat. Proses interaksi yang lancar akan mempererat jalinan hubungan antarwarga dan memupuk integrasi, sehingga akan semakin utuh.

b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kesiapan manusia moderne untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka. Seperti masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat membantu meringankan beban pekerjaan serta menghemat waktu dan tenaga, membuat mereka yakin bahwa dengan iptek akan meningkatkan kesejahteraan dan tarafhidupnya.

Kemajuan iptek juga akan menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin mempelajari lebih lanjut, dan turut menciptakan hal baru yang lainnya. Hal inilah yang dimiiki masyarakat moderen dalam menyikapi kemajuan iptek dan perubahan sebagai hal positif yang dapat mengembangkan diri mereka. Peningkatan teknologi dirasakan akan menopang banyak lini kehidupan, seperti misalnya sistem pendidikan, sistem perekonomian, dan sebagainya. Dengan teknologi baru seperti adanya fasilitas internet, dapat dimanfaat-kan dalam menunjang Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, contohnya mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru secara cepat.

c. Kemajuan di bidang industri

Modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Hal ini disebabkan semua kemudahan, fasilitas teknis yng ada lebih mempercepat proses produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam proses produksi, kemajuan bidang teknologi, terutama penambahan jumlah mesin produksi dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang besar dan waktu yang singkat. Hal ini akan berdampak pada keuntungan yang besar pula.

d. Meiningkatkan kesadaran politik dan demokrasi

Semakin mudah mengakses informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik, semakin banyak pula pengetahuan politik yang didapatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, sikap kritis sebagai perwujudan kehidupan yang demokratis akan lebih mudah terbentuk.

e. Kamajuan di bidang transportasi

Pada kondisi saat ini, masyarakat sudah dimanjakan dengan fasilitas transportasi mengedepankan kenyamanan, keterjangkauan harga, dan ketepatan waktu. Semua bidang transportasi mulai kendaraan bermotor, seperti bus, taksi, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut, saat ini berlomba-lomba mengembangkan dan menambah fasilitas baru pada armada mereka untuk melayani masyarakat.

Meskipun demikian, modernisasi tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat, dalam arti mengubah masyarakat dari tradisional menjadi moderen. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan

masyarakat yang belum siap terhadap modernisasi akan memunculkan sikap yang menjadi dampak negatif dari modernisasi tersebut. Adapun dampak negative yang muncul akibat gejala modernisasi, yakni; (1) kesenjangan sosial dan ekonomi; (2) pencemaran lingkungan; (3) kriminalitas; dan (4) kenakalan remaja (*juvenille delinquency*).

Bab 11
Nilai dan Norma Sosial

A. Pengertian Nilai Sosial

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai.

Berdasarkan ciri-cirinya, nilai sosial dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu nilai dominan dan nilai mendarah daging (*internalized value*).

1. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut; (1) banyak orang yang menganut nilai tersebut. Contoh, sebagian besar anggota masyarakat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang, seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial; (2) Berapa lama nilai tersebut telah dianut oleh anggota masyarakat; (3) Tinggi rendahnya usaha orang untuk dapat melaksanakan nilai tersebut. Contoh, orang Indonesia pada umumnya berusaha pulang kampung (mudik) di hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran atau Natal; (4) Prestise atau kebanggaan bagi orang yang melaksanakan nilai tersebut. Contoh, memiliki mobil dengan merek terkenal dapat memberikan kebanggaan atau prestise tersendiri.
2. Nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi (bawah sadar). Biasa- nya nilai ini telah tersosialisasi sejak seseorang masih kecil. Umum-nya bila nilai ini tidak dilakukan, ia akan merasa malu, bahkan merasa sangat bersalah. Contoh, seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, Dosen yang melihat mahasiswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut.

3. Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. Pandangan Notonegoro,nilai sosial terbagi 3, yaitu: (1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi fisik/jasmani seseorang; (2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang mendukung aktivitas seseorang; dan (3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa/psikis seseorang.

Fungsi nilai sosial bagi kehidupan manusia; (1) dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan "harga" sosial dari suatu kelompok; (2) dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku; (3) sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya; (4) sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok; dan (5) sebagai alat pengawas perilaku manusia. Dapat memberikan harapan yang baik, sikap mandiri, dan bertanggungjawab serta mengarahkan cara berperasaan, berpikir, berkehendak, dan bertindak.

B. Norma Sosial

1. Makna norma sosial

Norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang menjelaskan perbuatan yang dapat dijalankan dan perbuatan yang harus dihindari. Norma bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat (Wiyono Hadi dan Isworo, 2007). Pengertian lain tentang norma adalah aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya. Norma dapat dikatakan sebagai seperangkat tatanan, baik yang tertulis maupun tidak tidak tertulis yang berlaku, dan merupakan pedoman sehari-hari dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan, norma berlaku dalam segala bidang kehidupan, misalnya kesenian, keagamaan, adat istiadat, dan pendidikan. Norma merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat dalam mengukur apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima atau tindakan yang menyimpang. Norma dibangun atas nilai sosial dan norma sosial diciptakan untuk mempertahankan nilai sosial.

Dengan demikian, sebuah norma adalah aturan, landasan atau ukuran, yaitu sesuatu bersifat pasti dan tidak berubah. Dengan adanya

norma, manusia dapat memperbandingkan sesuatu yang hakikatnya, ukurannya, serta kualitasnya diragukan. Norma berguna untuk menilai baik-buruknya tindakan masyarakat sehari-hari. Norma dapat bersifat objektif dan dapat pula bersifat subjektif. Norma objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya. Norma subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai.

Norma juga merupakan perangkat agar hubungan di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma mengalami proses pelembagaan atau melalui norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat, sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Norma juga merupakan perangkat agar hubungan di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma mengalami proses pelembagaan atau melalui norma kemasyarakatan yang baru untuk men-jadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat, sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehar-hari.

Selanjutnya norma sosial adalah aturan yang belaku di dalam masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi individu atau kelompok bilamana melanggar aturan tersebut. Sanksi dapat berupa teguran, denda, pengucilan, atau hukuman fisik. Untuk itu, individu wajib mematuhi norma yang telah dirumuskan. Norma sosial memiliki fungsi untuk mewujudkan suatu keadaan yang diharapkan oleh masyarakat, diperlukan suatu peraturan yang menjamin terbentuknya kondisi tersebut. Oleh sebab itu, dibuat norma sosial yang berisi perintah dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

2. Klasifikasi norma sosial

Norma yang ada dalam masyarakat, memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda, yaitu lemah, sedang, hingga yang terkuat daya ikatannya, sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Berdasarkan sanksi

Untuk membedakan kekuatan yang mengikat norma-norma tersebut, maka secara sosiologis dikenal empat bagian norma-norma sosial, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat.

1) Tata cara (*usage*), menunjuk pada sesuatu bentuk perbuatan atau sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Contohnya, aturan

memegang garpu dan sendok saat makan dan penyimpangannya, yaitu bersendawa saat makan.

2) Kebiasaan (*folkways*), cara bertindak yang digemari oleh masyarakat dan dilakukan berulang-ulang, memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar dari penyimpangannya membuang sembarangan dan mendapat teguran, bahkan digunjingkan masyarakat.
3) Tata kelakuan (*mores*), norma yang sumbernya pada filsafat, ajaran agama, dan ideologi yang dianut oleh masyarakat. Tata kelakuan pada satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan pada pihak lain melarang suatu perbuatan, sehingga secara langsung ia merupakan alat pengendalian sosial agar masyarakat dapat menyesuaikan Tindakan-tindakan itu.
4) Adat (*customs*), norma yang tidak tertulis, melainkan kuat mengikat, sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat akan menderita karena sanksi keras, seperti pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat atau mematuhi persyaratan tertentu.

Selain keempat norma tersebut, ada satu lagi norma, yaitu norma hukum (*laws*), yaitu norma yang memiliki sifat formal dan berupa aturan tertulis yang sanksi terhadap pelanggarannya paling tegas bilamana dibandingkan dengan norma-norma sosial lainnya. Hukum adalah rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berikisan ketentuan mengikat, kewajiban, maupun larangan agar tercipta suatu ketertiban dan keadilan.

b. Berdasarkan sumbernya

Dilihat dari sumbernya, maka norma diuaraikan seperti berikut ini.

1) Norma agama, yaitu ketentuan hidup yang bersumber dari ajaran agama (wahyu dan relevansi);
2) Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berlaku dalam interaksi sosial masyarakat;
3) Norma kesusilaan, yaitu ketentuan yang bersumber pada hati Nurani, moral, atau filsafat hidup;
4) Norma kezaliman, yaitu perilaku atau adat kebiasaan melakukan sesuatu yang didasarkan pada tradisi budaya;
5) Norma hukum, yaitu ketentuan tertulis yang berlaku dari kitab undang-undang suatu negara.

3. Fungsi norma sosial

   Adapun fungsi norma akan diuraikan sebagai berikut.

   a. Mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai yang berlaku;
   b. Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
   c. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat; dan
   d. Menjadi dasar untuk memberikan sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar norma.

C. Sosialisasi, Penyimpangan, dan Pengawasan Sosial

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar seseorang melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasa, dan bertindak yang semuanya merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi juga merupakan seluruh rangkaian proses yang dijalani seorang individu sejak masa kanak-kanak hingga dewasa yang berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan indi- vidu lain yang hidup dalam masyarakat sekitarnya.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto (2013), bahwa sosialisasi adalah proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tenpat ia menjadi anggota. Proses ini selanjutnya disebut sebagai penyesuaian diri individu dalam kehidupan sosial, atau singkatnya disebut sosialisasi.

Selanjutnya pandangan Soerjono Dirjosisworo (1985), bahwa sosialisasi mengandung tiga pengertian yang diuraikan sebagai berikut.

a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu proses akomodasi tenpat individu menahan, mengubah implus-implus dalam dirinya, dan mengambil alih cara hidup masyarakat.
b. Dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide, pola nilai, dan tingkah laku, serta ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat tempat ia hidup.
c. Semua sifat kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi disusun dan dikembangkan sebagai kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Berdasarkan pendapatr ahli tersebut, maka dapat kita katakan bahwa yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran, nilai, dan norma sosial. Seseorang berperan sesuai dengan nilai, kebiasaan, dan

norma yang berlaku dan diwarisi dari masyarakatnya. Oleh sebab itu, teori sosialisasi sering disebut sebagai teori tentang peran (*role theory*).

Pada prinsipnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan manusia, yaitu:

a. Dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat;
b. Kelestarian suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi, hanya ada satu generasi, sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

2. Penyimpangan sosial

Penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma kelompok atau masyarakat (Hassan Shadily, 1998). Selanjutnya pandangan G. Kartasapoetra (1994), bahwa perilaku penyimpangan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak.

Berdasarkan pandangan ahli tersebut, maka pengertian perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Perilaku-perilaku seperti ini terjadi karena seseorang mengabaikan norma atau tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat, sehingga seringkali dikaitkan dengan istilah-istilah negatif. Perilaku penyimpangan (deviasi sosial) adalah seluruh bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Perilaku penyimpangan dapat terjadi di mana saja, baik keluarga maupun masyarakat.

a. Faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku menyimpang
   Perilaku penyimpangan dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut.
   1) Tidak memiliki seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini lazim disebut sebagai hasil proses sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya, tidak dapat membedakan hal-hal yang baik ataupun yang buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan sebagainya.
   2) Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik. Misalnya, lingkungan yang sering terjadi tindak

penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya.

3) Proses bersosialisasi yang negatif karena bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya.

b. Penyebab terjadinya perilaku menyimpang

Beberapa penyebab terjadinya perilaku menyimpang seorang individu adalah sebagai berikut.

1) Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam pribadinya. Individu tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas.
2) Proses belajar yang menyimpang. Individu melakukan tindakan penyimpangan karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang yang disebabkan proses belajar yang menyimpang.
3) Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal tersebut dapat ter-jadi bilamana dalam upaya tujuannya tidak memperoleh pe-luang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, dengan demikian maka terjadilah perilaku menyimpang.
4) Ikatan sosial yang berlainan yang terjadi umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Bilamana pergaulan memiliki pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.
5) Akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang yang seringkali dapat diakses melalui media elektronik/cetak perihal kejahatan (perilaku menyimpang), menyebabkan anak secara tidak sengaja menganggap bahwa perilaku menyimpang tersebut sebagai sesuatu hal yang wajar.

c. Jenis-jenis perilaku menyimpang

Batasan perilaku menyimpang ditentukan oleh norma-norma masyarakat. Jenis penyimpangan sosial (perilaku menyimpang) adalah sebagai berikut.

1) Penyimpangan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan yang dapat dibedakan dengan dua karak-

teristik, yakni; (1) perzinaan, merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan, baik mereka yang sudah pernah melakukan pernikanan secara sah maupun yang belum; dan (2) menyukai sesama jenis dalam penyimpangan seksual dapat dibedakan menjadi dua kelom- pok, yakni; (a) *lesbian,* merupakan hubungan seksual yang di- lakukan sesama Wanita; dan (b) *homoseks,* merupakan hubu- ngan yang dilakukan oleh sesama pria.

2) Hubungan seksual di luar nikah adalah hubungan suami-istri tanpa adanya ikatan pernikahan sah. Hal tersebut merupakan perilaku seks bebas yang dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit kelamin yang membahayan seperti virus HIV AIDS.
3) Pemerkosaan adalah tindakan pemaksaan dengan kekerasan pada orang lain untuk melakukan hubungan seksual. Penyim- pangan seksual ini, selain bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan juga berbahaya bagi masyarakat.
4) Penyalahgunaan narkotika adalah digunakan tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat, sehingga penggunaan narkotika dapat membahayakan dan memunculkan perilaku menyimpang.
5) Alkoholisme merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengonsumsi minuman alkohol yang memiliki efek negatif terhadap saraf. Alkohol juga dapat mengakibatkan pengguna- nya mabuk dan tidak berpikir secara normal.
6) Tawuran yang diawali dengan adanya konflik/pertentangan antara dua kelompok yang bertikai. Tawuran juga menjadi salah satu masalah sosial yang serius yang membutuhkan per- hatian serius karena pelaku tawuran cenderung mengabaikan norma-norma yang ada dalam masyarakat, membabi buta, melibatkan korban yang tidak bersalah, dan merusak fasilitas yang ada di sekitar lokasi tawuran.
7) Penyimpangan dalam gaya hidup yang lain dari biasanya yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni; (a) arogansi adalah kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya, seperti kekayaan, kekuasaan, dan kepandaian. Sikap arogansi dapat saja dilakukan oleh individu yang ingin menutupi ke- kurangannya; dan (b) eksentrik adalah perbuatan yang

menyimpang dari biasanya, sehingga dianggap aneh, seperti anak laki-laki memakai anting, perempuan mengenakan anting di lidahnya, dan lain sebagainya.

3. Pengawasan sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, selama semua anggota masyarakat bersedia menanti atauran yang berlaku, kehidupan bermasyarakat akan berlangsung dengan lancar dan tertib. Namun demikian, dalam kenyataannya, tidak semua orang memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku. Bahkan, ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Secara eksplisit, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku, yakni; (1) kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau tidak memenuhi kebutuhan dasarnya; (2) kaidah yang ada kurang jelas perumusannya, sehingga menimbulkan beragam penafsiran dan penerapan; (3) dalam masyarakat terjadi konflik dalam peranan yang dipegang warga masyarakat; dan (4) tidak mungkin mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara rame-rata.

Pada situasi demikian, seseroang menganggap bahwa dengan melanggar atau menyimpang dari norma, ia dapat memperoleh penghargaan (*reward*) atau keuntungan yang lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, *enforcement* demi tegaknya norma harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri (*self-enforcing*), namun harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau memberikan beban sanksi kepada siapa saja yang terbukti melanggar atau menyimpang dari norma. Bilamana norma tidak lagi sebagai *self-enforcement* dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek yang positif, maka masyarakat atas dasar otoritasnya, mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (*social control*). Selanjutnya pengawasan sosial adalah suatu proses baik yang telah direncanakan maupun yang belum direncanakan yang bertujuan mengajak, membimbing, atau memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

a. Objek dan tujuan pengawasan sosial

Objek pengawasan sosial adalah perilaku masyarakat. Adapun tujuan pengawasan adalah kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola dan kaidah yang telah disepakati bersama. Pengendalian sosial pada

dasarnya mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

Adapun cakupan pengawasan dan pengendalian sosial, yakni; (1) pengawasan dari individu terhadap individu lain; (2) pengawasan dari individu terhadap kelompok; (3) pengawasan dari kelompok terhadap kelompok lain; dan (4) pengendalian dari kelompok terhadap individu lain.

b. Sifat pengendalian sosial

Secara sosiologis, pengawasan sosial dapat dilakukan dengan cara; (1) pengendalian preventif yaitu dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh orang tua memberikan nasehat kepada anaknya; (2) pengendalian represif adalah yang dilaksanakan setelah terjadi pelanggaran terhadap sistem nilai dan norma yang disepakati bersama yang bertujuan memulihkan keadaan seperti semula, sehingga kehidupan menjadi normal Kembali. Contoh pe- tugas Kepolisian memberikan sanksi tilang kepada pelanggar lalu lintas;
(3) pengendalian gabungan adalah perpaduan antara preventif dan represif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memulih-kan kembali keadaan seperti semula. Contoh operasi yustisi yang digelar oleh seluruh warga masyarakat (operasi pemeriksaan identitas KTP dan lain sebagainya); (4) pengendalian persuasif adalah pengendalian yang di-lakukan dengan cara mengajak, mengimbau, mengarahkan, dan mem-bimbing kepada anggota masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang positif. Contoh imbauan untuk dilarang membuang sampah disembarang tempat; dan (5) pengendalian kurasif adalah pengendalian yang dilakukan melalui ancaman dan kekerasan. Contoh seperti yang terdapat dalam seruan *dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopy/ memperbanyak isi buku ini tanpa seizin penerbit.*

c. Alat pengawasan sosial

Masyarakat menginginkan tercapainya ketertiban sosial agar akti-vitas hidupnya berlangsung dengan lancar. Menyadari adanya berbagai kepentingan individu dan adanya peluang terjadinya perilaku menyimpang sangat besar menyebabkan masyarakat membutuhkan berbagai alat pengendalian sosial, yakni; (1) ejekan yang justru merupakan hukuman yang sangat berat bagi pelaku penyimpangan, bahkan lebih menyakitkan dibandingkan dengan hukuman fisik; (2) desas-desus atau gosip dapat

menyebabkan rasa malu bagi yang digosipkan; (3) pendidikan yang baik terjadi di rumah, disekolah, maupun dilingkungan masyarakat merupakan salah satu cara pengendalian sosial yang telah melembaga dimasyarakat;
(4) ostrasisme yakni tindakan yang membiarkan seseorang hidup dan bekerja dalam kelompok, tetapi tidak berbicara dengannya dan tidak menegurnya, orang yang menerima perilaku seperti ini merupakan orang-orang berperilaku menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma kelom- pok atau masyarakat; (5) fraudulens merupakan bentuk bentuk pengen- dalian sosial yang terdapat pada anak usia dini, misalnya dua anak kecil yang bertengkar akan saling mengancam bahwa dia memiliki kakak yang dapat membelanya; (6) teguran merupakan bentuk pengendalian sosial melalui perkataan atau tulisan secara langsung; (7) agama merupakan pe- doman kepada para pemeluknya tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan dilarang dilakukan; (8) intimidasi merupakan cara pengendalian sosial yang dilakukan dengan paksaan, umumnya dengan cara menakut-nakuti;
(9) kekerasan fisik digunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang, diantaranya memukul, menampar, dan melukai; dan (10) hukum merupakan alat pengendalian sosial yang secara nyata memberikan sanksi terhadap pelaku penyimpangan.

d. Agen pengendalian sosial

Keteraturan sosial tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu diusahakan dengan mengoptimalkan peran lembaga (pranata) sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga (pranata) sosial memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pengendalian, yaitu terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang. Beberapa agen pengendalian sosial, yakni; (1) Kepolisian merupakan aparat negara yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi harus mengendalikan atau mengawasi perilaku masyarakat agar tidak menyimpang atau melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Polisi juga memiliki wewenang untuk menangkap dan menahan seseorang yang melanggar hukum; (2) Pengadilan merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan menjatuhkan hukuman kepada warga masyarakat yang melanggar hukum. Lembaga pengadilan yang ada di Indonesia, meliputi pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi; (3) Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan formal dan guru memiliki kewajiban mendidik dan

mengajar siswa. Dalam mendidik para siswa, guru menanamkan nilai dan norma sosial yang akan membangun kepribadian siswa. Dengan cara ini, para siswa dapat tumbuh menjadi individu beradab; (4) keluarga merupakan sebagai pranata pengendalian sosial bagi anak-anak dan orang tua; (5) pengadilan adat merupakan suatu Lembaga yang terdapat pada masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat; (6) Tokoh masyarakat merupakan para pemimpin masyarakat, baik formal maupuin non formal; (7) Media massa memiliki cakupan yang luas, sehingga dapat mengontrol perilaku para pemimpin/ pejabat dan warga masyarakat.

4. Penerapan konsep sosiologi dalam pemecahan masalah sosial

Sebagaimana ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, maka sosiologi memiliki peran besar dalam upaya pemecahan masalah sosial. Bahkan, upaya pemecahan masalah sosial secara terperinci dipelajari dalam kajian ilmu sosiologi. Oleh sebab itu, sosiologi menyuguhkan metode sosial yang mampu menjadi metode penanggulangan masalah-masalah tersebut. Masalah sosial yang dimaksud adalah masalah yang di-sebabkan oleh masyarakat. Dengan demikian, maka masalah sosial adalah masalah yang melibatkan sejumlah besar manusia dalam pemenuhan ke-hendak biologis dan sosial. Contoh, masalah yang berhubungan terjadinya benturan institusi, rendahnya pengawasan sosial, atau kegagalan dalam menjalankan kaidah-kaidah sosial.

Berbagai usaha dan cara telah dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial, melainkan belum ada metode yang ampuh untuk mengatasinya. Hal ini disebabkan masalah-masalah yang timbul tidak selalu sama, baik dari aspek latar belakang, waktu maupun pengaruh-pengaruh yang menyertainya. Selain itu, metode dan analisis yang ada dalam masyarakattidak dapat mengimbangi cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi. Adapun metode yang dipandang tepat dalam menanggulangi masalah sosial, diuraikan sebagai berikut.

a. Metode coba-coba

Metode coba (*trial and methods*) merupakan cara penanggulangan masalah sosial yang paling sederhana. Metode ini seringkali digunakan untuk menanggulangi masalah sosial pada masyarakat yang masih ter-golong sederhana.

b. Metode analisis

Metode analisis dengan cara penanggulangan masalah sosial yaitu melakukan penelitian-penelitian secara ilmiah. Para peneliti melakukan

pengumpulan data sebagai dasar untuk mencari penyebab timbulnya masalah sosial yang sedang terjadi, atau secara langsung menerapkan hasil keputusan pemikiran tertentu untuk menghilangkan masalah sosial tersebut. Penerapan metode analisis perlu disertai oleh pertimbangan tertentu terhadap nilai-nilai sosial beserta adat istiadat masyarakat setempat agar terjadi keseimbangan dan Kerjasama yang harmonis dalam usaha penanggulangan masalah-masalah sosial tersebut.

c. Perencanaan sosial

Perencanaan sosial yaitu metode yang didasarkan pada fakta menurut hasil penelitian ilmiah dan bukan berdasarkan pengalaman praktis atau penelitian tanpa perhitungan. Pemikirannya adalah usaha yang berorientasi pada masa depan dengan ukuran waktu dan biaya yang telah diterapkan. Perencanaan sosial berarti usaha yang memperhitungkan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih serasi dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bab 12
Masalah Sosial dan Fungsi Sosiologi

A. Mengidentifikasi Masalah Sosial dalam Masyarakat

1. Pengertian masalah sosial

Dalam pandangan Soerjono Soekanto masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial seringkali muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dan realitas yang ada. Masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki wewenang khusus, seperti misal-nya Tokoh Masyarakat, Pemerintah, Organisasi Sosial, Musyawarah Masyarakat, dan lain sebagainya.

2. Kategori masalah sosial

Adapun kategorisasi masalah sosial digolongkan kedalam empat faktor, yakni:

a. Faktor ekonomi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya masalah sosial dilingkungan masyarakat. Terlebih lagi pasca krisis ekonomi yang dialami pada tahun 1999, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memicu tindakan aksi kriminalitas disebabkan sulitnya mengakses pekerjaan.
b. Faktor budaya. Kenakalann remaja seringkali menjadi salah satu masalah sosial yang sangat sulit dihilangkan disebabkan remaja seringkali mencoba sesuatu hal yang baru tanpa memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan dikemudian hari. Padahal, remaja merupakan generasi penerus bagi bangsa.
c. Faktor biologis. Faktor ini biasanya disebabkan oleh penyakit menular yang dapat menimbulkan masalah sosial bilamana penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah atau menjadi pandemik sebagaimana yang telah melanda dunia yaitu pandemik Covid 19.
d. Faktor psikologis. Aliran sesat sudah banyak terjadi di Indonesia bahkan meresahkan masyarakat. Meskipun pelakunya telah diamankan oleh petugas berwenang, namun penyebarannya masih saja terjadi dan bermunculan di tengah masyarakat hingga saat ini.

3. Sumber masalah sosial di tinjau dari pendekatan individu dan pendekatan kelompok
   a. Pendekatan individu (faktor internal)

      Pendekata yang berorientasi pada teori interaksionisme simbolik. Dalam pendekatan ini memandang bahwa sumber masalah sosial (*problem sosial*) disebabkan oleh kondisi internal individu yang "error" atau di sebut juga 'menyimpang". Kondisi individu yang menyimpang ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni:

      1) Kondisi individu yang menyimpang karena faktor biologis (fisik) yang mendorong untuk melakukan kegiatan penyimpangan dan faktor mentalitas (kejiawaan) negatif yang mendorong perilaku menyimpang.
      2) Kondisi individu yang menyimpang karena faktor sosialisasi subbudaya menyimpang, misalnya disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga yang disharmonis.

   b. Pendekatan kelompok (faktor eksternal)

      Pendekatan ini cenderung berorientasi pada teori fungsional struktural dan teori konflik. Pendekatan ini memandang bahwa sumber masalah sosial disebabkan oleh dua faktor, yakni:

      1) Desain perencanaan pembangunan tidak disusun dengan baik atau pelaksanaan pembangunan telah menyimpang dari perencanaan yang telah ada sebelumnya.
      2) Adanya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat yang begitu besar.
      3) Terjadinya pemberontakan atau peperangan bahkan konflik politik dan militer (disintegrasi sosial-politik).
      4) Terjadinya bencana alam yang membawa kehancuran infrastruktur.
      5) Struktur kekuasaan negara yang bersifat absolut atau otoritarianisme atau berkembangnya sistem diskriminasi.

4. Pendekatan Masalah Sosial
   a. Person Blame Approach

      Person blame approach merupakan pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah menempatkan individu sebagai unit analisisnya. Sumber masalah

sosial di tinjau dari faktor-faktor yang melakat pada individu yang menyandang masalah. Melalui sebuah diagnosis tersebut, maka dapat diketemukan faktor penyebab yang bisa saja berasal dari kondisi fisik, psikis maupun proses sosialisasinya.

b. System Blame Approach

System blame approach merupakan unit analisis yang memahami pada level sistem. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa sistem dan struktur sosial lebih dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Individu sebagai warga masyarakat tundu dan patuh oleh sistem yang berlaku. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka masalah sosial terjadi karena sistem yang berlaku tidak mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penyesuaian antar-komponen dan unsur dalam sistem tersebut.

Dari kedua pendekatan tersebut, dapat diketahui bahwa sumber masalah dapat ditelusuri dari "kesalahan" individu dan "kesalahan" sistem. Mengimplementasikan kedua pendekatan tersebut akan sangat berguna untuk melacak akar masalah dalam mencari solusi pemecahannya. Dalam mendiagnosis masalah pengangguran misalnya, secara lebih komprehensif tidak hanya cukup dengan dilihat dari faktor yang melekat pada diri penganggur, seperti kurang inovatif atau malas mencari peluang, melainkan juga perlu melihat sumber masalahnya dari berbagai sudut pandang sistem, baik sistem pendidikan, sistem produksi, sistem perekonomian maupun sistem sosial politik pada tingkat yang lebih luas.

5. Beragam Masalah Sosial dalam Pembangunan

a. Masalah kemiskinan

Dalam kajian sosiologi pembangunan, konsep kemiskinan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. Kemiskinan absolut (*a fixed yardstick*). Konsep kemiskinan absolut ini dirumuskan dengan menggunakan indikator tertentu dengan cara konkret. Indikator ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sandang, pangan, dan papan. Indikator tersebut berbeda digunakan pada setiap negara.
2. Kemiskinan relatif (*the idea of relative*). Konsep kemiskinan relatif ini dirumuskan berdasarkan atau memerhatikan dimensi tempat dan waktu. Dengan asumsi, kemiskinan di daerah satu

dengan daerah yang lainnya tidaklah sama. Demikian juga, antara waktu terdahulu dan kondisi saat ini berbeda.

3. Kemiskinan subjektif. Konsep kemiskinan subjektif ini dirumuskan berdasarkan perasaan individu atau kelompok miskin. Kita menilai individu atau kelompok tertentu miskin, melainkan kelompok yang kita nilai menganggap bahwa dirinya bukan miskin, atau sebaliknya. Konsep kemiskinan ketiga inilah yang tepat bila- mana memahami konsep kemiskinan dan langkah strategis menanganikemiskinan.

Oleh sebab itu, secara sosiologis, maka kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang paling mencolok dan serius dialami oleh negara-negara berkembang. Secara umum, kajian tentang kemiskinan dapat ditinjau dari dua pendekatan, yakni pendekatan kultural (*cultural perspektive*) dan pendekatan struktural (*struktural perspektive*). Kedua pendekatan tersebut memiliki asumsi, metode, dan analisis yang berbeda dalam mengkaji setiap masalah kemiskinan. Adapun kedua pendekatan tersebut dijelaskan berikut ini.

a) Pendekatan kultural (*cultural perspektive*)

Metode dalam menganalisis kemiskinan dalam pendekatan kultural dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yakni.

(1) Tingkatan individu. Kondisi kemiskinan ini disebabkan oleh mentalitas individu yang malas, apatis, fatalistik, pasrah, boros, dan bergantung pada sesuatu hal.

(2) Tingkatan keluarga. Kondisi kemiskinan ini disebabkan jumlah anak dalam keluarga sangat besar. Memiliki pola budaya keluarga yang tidak produktif.

(3) Tingkatan masyarakat. Kondisi kemiskinan ini disebabkan tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masayarakat secara efektif.

b) Pendekatan struktural (*struktural perspective*)

Konsep kemiskinan dalam perspektif struktural merupakan kemiskinan yang terjadi karena dampak dari faktor-faktor struktur masyarakat (faktor eksternal) yang disebabkan oleh faktor, yakni;

(1) program perencanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran;

(2) pelaksanaan kekuasaan pemerintah (birokrasi pemerintah) yang korup; (3) kehidupan sosial-politik yang tidak demokratis dan cenderung otoriter; (4) sistem ekonomi liberalistik atau

kapitalis; (5) berkembangnya teknologi moderen atau industrialisasi yang mekanistik di segala aspek; (6) kesenjangan sosial-ekonomi di masayarakat masih tinggi; dan (7) dampak perkembangan globalisasi ekonomi dan pasar bebas.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan, yakni; (1) menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai aspirasi masyarakat; (2) melaksanakan program pembangunan di segala sektor yang berbasis kerakyatan; (3) meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara optimal sesuai dengan amant UUD 1945; (4) reformasi birokrasi (transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pembangunan); dan (5) menegakkan kepastian hukum dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, peran media massa dalam mengawal dan terlibat proses serta pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

b. Masalah perilaku menyimpang remaja dan kenakalan remaja

Perilaku menyimpang (deviasi sosial) merupakan segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ber-laku dilingkungan masyarakat. Perilaku menyimpang remaja adalah segala bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk dan macam perilaku menyimpang remaja, yakni; (1) tawuran antar pelajar; (2) penyimpangan seksual meliputi homoseksual, lesbian- isme, dan hubungan seksual sebelum menikah; (3) pecandu alkohol; (4) penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya; (5) balapan liar di fasilitas jalan umum; (6) terlibat kasus pidana, misalnya pencurian atau penipuan.

Adapun kemunculan gejala kenakalan remaja umumnya diawali dari gejala, yakni; (1) sikap apatis terhadap kewajiban normatif yang melekat pada dirinya; (2) cenderung untuk bersikap suka mengganggu teman lainnya; (3) sikap kecewa yang berlebihan disebabkan tidak terpenuhinya hasrat tertentu; (4) kurang fokus atau perhatian terhadap agenda kegiatan tertentu; (5) sikap takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap merugikan dirinya; dan (6) ketidakmampuan untuk berperan dalam kelompok atau sikap "manja" yang berlebihan.

Bentuk penyimpangan perilaku remaja dapat dibedakan menjadi empat bagian, yakni; (1) penyimpangan primer yaitu penyimpangan yang sifatnya temporer, sementara, dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat; (2) penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang dapat merugikan atau mengancam keselamatan orang lain, misalnya tindakan kriminal; (3) penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara kelompok, misalnya geng untuk berkelahi dan narkotik; dan (4) penyimpangan individu, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan secara sendiri.

Penyebab terbentuknya perilaku menyimpang pada remaja, yakni; (1) ketidaksanggupan menyerap norma budaya; (2) ikatan sosial yang berlainan dengan yang dimiliki; (3) akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan menyimpang; (4) akibat kegagalan dalam proses sosialisasi; (5) sikap mental yang tidak sehat; (6) keluarga yang *broken home* atau terjadi disharmonisasi; (7) pelampiasan rasa kecewa yang berlebihan; (8) dorongan yang berlebihan untuk dipuji; (9) proses belajar yang menyimpang; (10) dorongan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang salah; dan (11) pengaruh lingkungan dan media massa yang negatif.

Beberapa cara untuk meminimalkan kenakalan remaja, yakni; (1) menjunjung tinggi nilai spritual; (2) kehidupan keluarga yang harmonis; (3) kesamaan nilai dan norma yang dianut oleh orang tua dalam mendidik anak; (4) memberikan kasih sayang secara wajar atau proporsional (tidak memanjakan anak); (5) memenuhi kebutuhan anak; (6) memberikan pengawasan secara wajar atau proporsional terhadap pergaulan anak di lingkungan masyarakat atau teman bermain; dan (7) memberikan contoh tauladan yang terbaik kepada anak, dan setiap pemberian layanan kepada anak diarahkan pada upaya membentuk karakter atau mentalitas positif.

c. Masalah lingkungan hidup

Masalah lingkungan hidup menjadi perhatian yang sangat serius oleh karena persoalan lingkungan, yakni; (1) berkaitan dengan kualitas kelangsungan kehidupan generasi pada masa mendatang; dan (2) kegagalan dalam menangani persoalan lingkungan akan membawa dampak negatif pada seluruh sektor ke-

hidupan, baik dalam level lokal, nasional maupun internasional, seperti misalnya bencana alam, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Proses pembangunan dan industrialisasi di negara-negara maju dan berkembang umumnya memberikan dampak munculnya masalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran laut dan pencemaran air.

Meningkatnya pencemaran lingkungan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung mendorong munculnya masalah kehidupan pada berbagai aspek kehidupan, yakni; (1) tingkat kualitas kesehatan masyarakat semakin terancam; (2) kualitas kesuburan tanah dan ekosistem lingkungan fisik terancam; (3) kualitas air sebagai sumber kehidupan semakin tercemar; (4) terjadinya pencemaran udara karena polusi industri dan sebagainya.

Dengan melihat kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa langkah dan strategi dalam menangani masalah pencemaran lingkungan hidup, yakni; (1) menerapkan sistem hukum secara tegas dan berkeadilan terhadap setiap pelaku pencemaran lingkungan; (2) melakukan gerakan perlawanan terhadap pencemaran lingkungan hidup pada seluruh aspek lapisan masyarakat, misalnya gerakan reboisasi, menjalankan konservasi, dan melakukan daur ulang; (3) melakukan kontrol dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk; (4) melakukan inovasi teknologi, yaitu teknologi ramah lingkungan; (5) membudayakan gaya hidup masyarakat yang tadinya konsumtif dan mekanis (orientasi kekinian) berubah orientasi ke gaya hidup pada kelangsungan generasi mendatang (orientasi masa depan); dan (6) mengembangkan pendidikan disetiap jenjangnya.

d. Masalah konflik SARA

Masalah konflik suku, agama, ras dan antarkelompok (SARA), bagi negara-negara berkembang yang multikultural (termasuk Indonesia) adalah problem yang dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan. Oleh karena setiap desain pembangunan dan pelaksanaan pembangunan idealnya betul-betul meminimalkan terjadinya konflik SARA. Adapun unsur konflik SARA yakni; (1) dua pihak atau lebih yang bertikai; (2) tujuan yang menjadi sasaran konflik, dan tujuan tersebut menjadi sumber konflik; dan (3) terdapatnya perbedaan pikiran, perasaan, dan

tindakan untuk mendapatkan tujuan yang saling memaksakan atau menghancurkan.

Selain itu juga terdapat ciri-ciri konflik SARA, yakni; (1) bersifat alamiah; (2) anggota suku, agama, ras, kelompok yang terlibat konflik cenderung untuk melakukan konflik berikutnya dalam kepentingan kelompoknya; (3) umumnya terjadinya antara SARA mayoritas dan minoritas; (4) seringkali diikuti dengan terjadinya kekerasan yang berlangsung dalam ruang dan waktu; (5) mereka yang terlibat konflik merasa belum puas karena kebutuhan mereka belum terpenuhi; dan (6) konflik cenderung melibatkan dua kelompok kepentingan yang saling memperebutkan kebutuhan hidup.

Selanjutnya terdapat pula sumber-sumber konflik SARA, yakni; (1) terdapatnya perbedaan pandangan dalam budaya dan masing-masing menunjukkan egonya; (2) tidak adanya komunikasi diantara pihak yang berkonflik utamanya diantara pola budaya; (3) kebijakan pemimpin yang tidak efektif dan cenderung berat sebelah; (4) ketidakharmonisan peran sosial disertai pula dengan pemaksaan kehendak masing-masing; (5) rendahnya produktivitas dalam kelompok yang bertikai; (6) terjadinya perubahan sosial yang sifatnya revolusioner yang mengakibatkan disintegrasi sosial dan budaya; (7) memiliki latar belakang kedua belah pihak yang tidak baik; dan (8) terdapatnya kesenjangan ekonomi.

e. Masalah kriminalitas

Kriminalitas merupakan salah satu masalah sosial yang sifatnya laten (seringkali ada dan muncul dalam kehidupan masyarakat atau negara manapun). Namun demikian, tindakan kriminal merupakan bukanlah bentuk penyimpangan perilaku yang diperoleh sejak lahir, melainkan merupakan hasil sosialisasi subbudaya yang menyimpang. Tindakan kriminal seringkali dikategorikan sebagai tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Hal ini dapat diketemukan dalam contoh kasus tindakan korupsi, pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, pemalsuan, penculikan, perkosaan, sindikat narkotik, atau penyalahgunaan obat terlarang.

Adapun faktor yang menjadi daya dorong dalam melakukan tindakan kriminal, yakni; (1) perubahan sosial, politik, ekonomi yang sifatnya revolusi; (2) kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat yang begitu besar dan cepat, sebagai akibat dari kesalahan strategi atau perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan; (3) peluang dan kesempatan untuk terjadinya tindakan kriminal karena penegak hukum yang tidak tegas terhadap skepastian hukum di dalam masyarakat; (4) sistem pemerintahan yang tidak bersih dan aparat pemerintah yang korup, atau banyak muncul pejabat kerah putih (*white collar crime*); (5) jumlah penduduk yang tidak terkendali, sehingga terjadinya lonjakan pangangguran dan urbanisasi; (6) terjadinya disintegrasi dalam keluarga; dan (7) munculnya sikap mental negatif misalnya kehidupan yang hedonis, mengikuti jaman yang kekinian, jalan pintas dalam meraih kedudukan dan lain sebagainya.

Adapun metode yang dapat dilakukan untuk pencegahan yakni; (1) pendekatan preventif dengan cara pencegahan melalui pemberian informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan (2) represif dengan cara pencegahan dengan cara pemberian ancaman hukuman melalui penangkapan dan pemenjaraan dan jika perlu sampai pada hukuman mati.

f. Masalah protes, pergolakan daerah, dan pelanggaran HAM

Terdapatnya aksi protes di daerah dan pelanggaran HAM merupakan masalah sosial yang cukup kompleks, dan menuntut perhatian khusus dalam pemecahannya. Terlebih lagi kondisi sosial dan budaya masyarakat yang multikultural, seperti di Indonesia, sehingga hampir setiap hari terdapat aksi penolakan dan disertai dengan protes serta demonstrasi di wilayah. Kondisi tentunya dapat mengganggu proses perubahan atau pembangunan dalam masyarakat. Terjadinya aksi protes, pergolakan di daerah, dan pelanggaran HAM disebabkan yakni; (1) dominasi mayoritas pada minoritas disertai dengan tindakan sewenang-wenang dalam berbagai aspek kehidupan atau adanya pemaksaan kehendak antarkelompok di masyarakat; (2) kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat yang sangat meningkat; (3) perebutan antarkelompok di masyarakat tentang sumber mata pencaharian hidup;

(4) pemaksaan ideologi kelompok satu dengan kelompok lainnya; dan (5) tradisi masa lalu sebagai hasil warisan sejarah tentang konflikantar-kelompokatauantaretnik.

B. Fungsi Sosiologi dalam Kehidupan Masyarakat

Struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur sosial yang menunjuk pada keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat. Membahasa tentang struktur sosial dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tokoh sosiologi klasik Karl Marx dan Max Weber yang membahas dimensi stratifikasi sosial. Dalam tesis Karl Marx mengenai sistem stratifikasi sosial sangat berkaitan erat dengan adanya perbedaan kelas yang disebabkan oleh perbedaan dalam kehidupan perekonomian, uatamanya menyangkut mode produksi (*mode of producition*). Setiap masyarakat seringkali memiliki posisi dalam struktur sosialnya, dan posisi ini mengikuti pendapat Marx yang di- tentukan oleh aksesibilitas pada faktor ekonomi yang dalam konteks sosio- logi disebut sebagai stratifikasi sosial.

C. Peran Sosiologi dalam Penanganan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan, ditinjau dari perspektif sosiologi tentunya sangatlah komprehensif, dimana melibatkan beragam struktur yang saling berkaitan dan membentuk realitas yang disebut sebagai kemiskinan. Ilmu sosial sebagai ilmu historis-hermeneutis memandang bidang-bidang inter-subjektif yang senantiasa berubah-ubah karena terjadi dalam gejala sosial bukan fakta sosial, melainkan lahir dari pendapat manusia atas gejala yang dimaksud. Dengan demikian, maka objek sosial dalam gejala sosial itupun membutuhkan penelaahan yang disesuaikan dengan konteks interaksi yang dinamis.

Daftar Pustaka

Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Kelompok Masalah Sosial.* Jakarta: Fajar Agung.

Abraham, M. Francis. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Astrid S. Susanto. 1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial.* Jakarta: Bina Cipta.

Foucault, M. 1977. *Disciplen and Punish, The Birth of the Prison.* New York: Random House.

_____. 1980. *Power/ Knowledge: Selected Interviews and other Writing* 1972-1977. New York: Phanteon Books.

G. Kartasapoetra. 1994. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila.* Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Aksara.

Hassan Shadily. 1998. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

J.B.A.F. Mayor Polak. 1966. *Sosiologi, Suatu Pengantar Ringkas.* Cetakan Kelima. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar.

Kamanto, Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia.

Neal. A.W. 2009. "Michel Foucault", dalam Jenny Edkins and Nick Vaughan-Williams (Eds.) *Critical Theorist and International Relations.* London: Routledge.

Razak, Yusron. 2008. *Sosiologi Sebuah Pengantar.* Jakarta: Mitra Sejahtera.

Schoorl., J.W. 1991. *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Bwerkembang.* Jakarta: Gramedia.

Soerjono Dirjosisworo, 1985. *Asas-asas Sosiologi.* Bandung: Armico.

Soerjono, Soekanto. 1997. *Mengenal Tujuh Sosiologi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____.2013. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Edisi Revisi. Cetakan ke-45. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wiyono Hadi dan Isworo, 2007. *Kewarganegaraan Negara.* Jakarta: Ganeca Exact.

TentangPenulis

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si., adalah seorang dosen sosiologi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama di Universitas Sawerigading. Penulis menempuh pendidi- kan formal di Universitas Sawerigading Makassar dengan gelar Sarjana Sosiologi pada tahun 2007. Beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Universitas Hasanuddin, dengan fokus pada Perencanaan dan Pengem- bangan Wilayah yang diselesaikannya pada tahun 2010. Pada tahun 2017, penulis berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang Sosiologi dari Univer- sitas Negeri Makassar.

Selain pendidikan formal, penulis juga aktif mengikuti berbagai pelatihan non-formal untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan- nya. Di antaranya adalah pelatihan Bahasa Inggris dan TOEFL di Balai Bahasa Universitas Hasanuddin pada tahun 2008, serta pelatihan Sistem Informasi Geografi (SIG) tingkat operator pada tahun 2009. Beliau juga mendalami metodologi penelitian kuantitatif, khususnya aplikasi Structural Equation Modeling (SEM) dengan program LISREL dan AMOS, pada tahun 2010.

Karir sebagai dosen dimulai pada tahun 2012 di Prodi Sosiologi Fisipol Universitas Sawerigading Makassar. Beliau juga pernah menjadi tenaga ahli perencanaan dan pembangunan sosial di PT. Mareto Agri Persada dari tahun 2013 hingga 2015, dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Makassar dari tahun 2013 hingga 2016. Pengalaman lain yang menonjol adalah sebagai staf ahli di Perwakilan Kementerian Pertahanan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga 2019, serta menjadi tim ahli penyusun draft Ranperda Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2019 hingga 2021.

Dedikasinya terhadap dunia akademik dan profesi sosiologi tidak hanya terbatas di lingkungan kampus. Dr. Adi aktif sebagai narasumber di Radio Republik Indonesia (RRI) sejak tahun 2021 dan menjadi asesor internal Beban Kinerja Dosen (BKD) di lingkungan Universitas Sawerigading Makassar sejak tahun 2022. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai asesor eksternal BKD di lingkungan Universitas Kristen Tentena Palu dan di lingkungan Universitas Teknologi Sulawesi sejak tahun 2023. Pada tahun 2016-2020 menjabat sebagai Ketua Program Studi Sosiologi

Universitas Sawerigading dan tahun 2020-2024 menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sawerigading.

Keaktifannya dalam berbagai organisasi profesional menunjukkan komitmen penulis terhadap pengembangan ilmu sosiologi dan perencanaan. Penulis tergabung di beberapa organisasi profesi diantaranya anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) sejak tahun 2010, Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) sejak tahun 2016, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APPERTI) sejak tahun 2016, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APPSI), Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulawesi Selatan, Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Provinsi Sulawesi Selatan (IRMLA), Lembaga Anti Narkotika dan HIV Aids (LANHA), Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ADPERTISI), dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sawerigading periode 2016-2024.

Penghargaan yang diterima penulis mencerminkan pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa. Pada tahun 2022 dan 2023, beliau menerima piagam sebagai dosen penguji eksternal Program Doktor Sosiologi PPs UNM. Selain itu, pada tahun 2024, beliau dianugerahi piagam Satya Karya Pengabdian 12 Tahun oleh LLDIKTI Wilayah IX.

11. Buku Pengantar_Sosiologi.docx

ORIGINALITY REPORT

1%	0%	0%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
2	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1%
3	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	<1%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%
5	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
6	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	<1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to The University of Memphis Student Paper	<1%
9	pt.scribd.com Internet Source	<1%
10	jurnal.ensiklopediaku.org Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		